

Rekam Jejak Gerakan
Perempuan Aceh
Menyongsong Damai



Rekam Jejak Gerakan Perempuan Aceh Menyongsong Damai

Penulis

Ayu 'Ulya
Dian Guci

Editor

Ihan Nurdin

Penyelia Naskah

Suraiya Kamaruzzaman

Ilustrator

Agah Nugraha Muharam

Tata Letak

Mushaddiq

Diterbitkan oleh:

Bandar Publishing

Jl. Teungku Lamgugob, Syiah Kuala,
Banda Aceh Provinsi Aceh.

Hp. 08116880801 IG. bandar.publishing TW. @bandarbuku

FB. Bandar Publishing - Anggota IKAPI

Dicetak oleh:

Percetakan Bandar di Lamgugob Banda Aceh

**Isi di luar tanggung jawab percetakan*

Cetakan Pertama, Februari 2025

Ukuran : 20,5x 14,5 cm.

Halaman : xiv + 154 hal.

**" Benar bahwa kehidupan terus bergulir,
kisah perjuangan mungkin berakhir.
Namun rekam jejak memori yang dimaktubkan
akan terus abadi. "**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Rekam Jejak Gerakan
Perempuan Aceh
Menyongsong Damai



Kata Pengantar

Menjadi suatu kehormatan bagi kami karena diberi kepercayaan oleh Balai Syura Ureung Inong Aceh untuk mengumpulkan keping-keping cerita tentang gerakan perempuan Aceh dua dekade lalu. Lempengan-lempengan kisah itu kemudian terkumpul menjadi sebetuk buku yang diberi judul *Rekam Jejak Gerakan Perempuan Aceh Menyongsong Damai*. Sebagaimana yang tersurat di judul, buku ini memang berisikan narasi yang selama ini terpendam di hati para penggagasnya mengenai proses hingga lahirnya Duek Pakat Inong Aceh (DPIA) I pada tahun 2000.

Selama mempersiapkan buku ini, penulis dan tim kreatif lainnya—yang oleh Balai Syura disebut sebagai perwakilan kelompok muda—mendapatkan pengalaman batin yang luar biasa tentang sepak terjang perempuan Aceh dalam memperjuangkan perdamaian. Kisah-kisah mereka, sebagaimana yang tercantum di dalam buku ini, menjadi semacam “tesis” atau pembenaran atas heroisme perempuan Aceh seperti yang sudah sering diceritakan melalui representasi para pejuang perempuan Aceh. Dari kacamata penulis, terdapat segenap urgensi yang menjadikan buku ini harus dihadirkan.

Pertama, untuk mengumpulkan kembali ingatan kolektif perempuan Aceh tentang proses-proses panjang dalam memperjuangkan perdamaian Aceh. Ada banyak tenaga, pikiran, waktu, bahkan air mata yang ditumpahkan untuk menghadirkan sebuah *duek pakat* yang bisa menghimpun banyak perempuan. DPIA I adalah perhelatan mahaakbar yang untuk mewujudkannya diperlukan keberanian yang sangat besar dan kecerdasan strategi yang tidak sederhana. Maka, sudah sepatutnya perihal itu dibukukan agar abadi sebagai sejarah.

Kedua, buku ini akan menjadi estafet yang sangat berharga bagi generasi muda Aceh, khususnya yang lahir setelah damai direngkuh. Sebab kita tidak dapat memungkiri jika kelak orang-orang tua tak lagi “cerewet” mengisahkan sejarah ini kepada anak-anaknya, boleh jadi kelak cerita nyata masa lalu ini akan dianggap dongeng belaka oleh generasi-generasi berikutnya. Perlu digarisbawahi bahwa menceritakan masa-masa kelam yang sulit *tidak sama dengan* membangkitkan luka lama. Namun, dengan pengalaman yang sangat berharga itu, justru menjadi titik beranjak bagi kita untuk tahu dan merencanakan masa depan seperti apa yang ingin kita wujudkan.

Ketiga, buku ini lebih dari sebuah catatan, melainkan “panduan” untuk melihat aneka praktik baik yang dicontohkan oleh perempuan Aceh. *Duek pakat*, yang bermakna duduk bersama untuk bersepakat atau bermusyawarah, adalah cerminan karakter kolektif masyarakat Aceh (perempuan) yang mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Bukankah ini praktik baik dan perlu dipertahankan sebagai landasan bagi ruang partisipasi perempuan di masa kini dan nanti?

Kami para penulis sengaja menyajikan buku ini dengan narasi yang ringan agar mudah dicerna dan dipahami oleh para pembaca muda. Kami juga melengkapinya dengan ilustrasi-ilustrasi agar lebih berwarna dan kaya makna. Semoga kehadiran buku ini bisa membuka wawasan kita tentang banyak hal: tentang arti keadilan dan perdamaian; tentang perempuan dan kiprahnya; dan tentang perjuangan yang masih senantiasa digelorakan. Selamat membaca.

Banda Aceh, 24 Oktober 2024

Penulis

Kata Sambutan

Konflik bersenjata yang berlangsung sekitar 30 tahun di Aceh antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah menyebabkan banyak persoalan bagi masyarakat Aceh. Perempuan bersama dengan kelompok rentan lainnya menghadapi dampak lebih berat karena (terpaksa) menetap di Aceh. Berbeda dengan sebagian besar laki-laki remaja dan dewasa, yang dengan alasan keselamatan memilih untuk mencari tempat aman di luar Aceh. Perempuan sering kali menjadi korban penyiksaan atau mengalami kekerasan seksual dan berbagai bentuk kekerasan lainnya dengan berbagai modus yang melatarbelakanginya. Perempuan juga dijadikan tameng dalam beberapa situasi krisis, dicurigai dan dimata-matai, mengalami diskriminasi, hingga dieksploitasi. Selain itu, perempuan juga dituntut untuk mengambil berbagai peran sosial yang selama ini dilakukan oleh laki-laki. Pada waktu bersamaan, perempuan tetap harus menjalankan peran domestiknya. Dalam kondisi diri yang mengalami ketakutan, menghadapi berbagai intimidasi dan ruang gerak yang terbatas, perempuan tetap harus memberikan perlindungan bagi anggota keluarganya. Kehidupan yang dilewati perempuan di Aceh pada masa itu, semakin hari jadi semakin menakutkan.

Selama konflik berlangsung, pilihan damai telah diupayakan melalui dukungan banyak pihak. Namun, tidak ada yang berhasil membuat keduanya bersepakat untuk mengakhiri konflik bersenjata tersebut. Sehingga ratusan ribu masyarakat di Aceh kehilangan nyawa dan mengalami berbagai penderitaan, kerusakan berbagai infrastruktur dan sarana publik yang menghentikan berbagai layanan serta menghancurkan aset dan sumber penghidupan masyarakat. Teriakan merdeka semakin kencang terdengar dari kelompok-kelompok tertentu yang direspons dengan berbagai penerapan operasi militer oleh Pemerintah Indonesia. Hingga pada tahun 1998, gerakan reformasi terjadi di tataran nasional dan berhasil menjatuhkan rezim Orde Baru.

Semangat dan gejolak yang sama juga terjadi di Aceh. Tuntutan untuk segera mengakhiri konflik, mengadili para pelanggar HAM, serta memenuhi hak korban diajukan berbarengan dengan desakan agar Pemerintah Indonesia memberi kesempatan bagi masyarakat Aceh untuk menentukan nasib sendiri. Keinginan untuk referendum itu disampaikan oleh banyak pihak termasuk organisasi masyarakat sipil, dengan pilihan merdeka atau tetap bersama dengan Indonesia.

Berbeda dengan pihak-pihak tertentu dan sebagian organisasi masyarakat sipil pro kemerdekaan Aceh yang menuntut dilaksanakannya referendum, beberapa individu atau tokoh perempuan dan organisasi masyarakat sipil yang concern pada isu perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Aceh justru melakukan gerakan bersama untuk mendorong adanya ruang yang kondusif dalam membahas dan merumuskan penyikapan masa depan Aceh yang lebih baik—atlas nama perempuan Aceh yang mengalami banyak penderitaan. Ruang politik yang aman ini dikemas dalam Duek Pakat Inong Aceh (DPIA) atau Kongres Perempuan Aceh, yang dilaksanakan di Anjong Mon Mata Banda Aceh pada 19-22 Februari 2000.

DPIA I menghasilkan 22 poin rekomendasi dengan tuntutan utama adalah mendorong keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan dan penyelesaian konflik Aceh melalui dialog perdamaian. Advokasi rekomendasi ini mendapatkan penerimaan positif oleh pemerintah yang memberikan ruang pelibatan perempuan pada berbagai upaya penyelesaian konflik yang diupayakan, meski dalam jumlah yang masih sangat terbatas. Sayangnya, langkah dan gerak positif ini tidak cukup mendapat tempat dalam lembaran sejarah Aceh. Nyaris tidak ada dokumen resmi yang melegitimasi penyikapan perempuan yang menyuarakan penyelesaian konflik bersenjata di Aceh dengan mengedepankan upaya damai. Dalam berbagai penelitian pun, pengalaman ini tidak terekam dengan baik.

Balai Syura Ureung Inong Aceh (Balai Syura) dibentuk pada 22 April 2000, dengan mandat untuk mengadvokasi pelaksanaan rekomendasi DPIA. Tidak hanya itu, Balai Syura juga diberi tanggung jawab untuk menyelenggarakan DPIA selanjutnya secara periodik sebagai ruang politik perempuan di Aceh untuk merumuskan rekomendasi terkait dengan arah dan gerak strategis perempuan di Aceh dalam menyikapi secara kritis agenda pembangunan Aceh dari perspektif kesetaraan dan keadilan gender. Hingga saat ini, sudah terselenggara 4 (empat) kali DPIA, yakni pada tahun 2000, 2005, 2011, dan 2017. Bernasib sama dengan yang pertama kalinya, DPIA ke-2 hingga ke-4 juga tidak terdokumentasi dengan baik. Informasi yang beredar masih sebatas lisan dari para pelaku sejarah yang semakin hari jumlahnya semakin berkurang.

Buku ini diberi judul Rekam Jejak Gerakan Perempuan Aceh Menyongsong Damai yang berisikan semua pengalaman dalam penyelenggaraan DPIA pertama. Keberadaan buku ini tidak hanya sebatas untuk menyediakan informasi dan fakta tentang aksi nyata gerakan perempuan yang merambah jalan menuju kesepakatan damai, tetapi juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi banyak pihak, terutama kalangan generasi muda Aceh yang akan menjalani masa depan Aceh menjadi lebih baik.

Salam takzim dan terima kasih untuk para pelaku sejarah—yang namanya tidak mungkin disebutkan satu per satu—karena sudah bersedia terlibat dan berbagi pengalaman untuk melengkapi informasi dan memberi warna dalam buku ini. Terima kasih kepada Ayu ‘Ulya dan Dian Guci (penulis), Ihan Nurdin (editor), Agah Nugraha Muharam (ilustrator), dan Mushaddiq (layout) yang merupakan kelompok muda di Aceh, karena sudah berupaya keras untuk memahami komunikasi dan gaya atau ritme kerja lintas generasi yang tentunya tidak mudah. Terima kasih karena sudah menuangkan semua informasi yang bersumber dari pengalaman langsung, dalam bentuk tulisan dan karikatur, menjadi buku sejarah yang apik dan menarik untuk dipublikasi. Terima kasih

juga kepada Asian Muslim Action Network (AMAN) melalui program Pendokumentasian Buku Sejarah Gerakan Perdamaian Perempuan Aceh: She Builds Peace Seri 2 yang telah mendukung mewujudkan ide ini. Semoga kehadiran buku ini menjadi secuil pelengkap bagi semua pihak yang sedang berjuang.

Banda Aceh, 20 Oktober 2024

Presidium Balai Syura

Daftar Isi

vi	Kata Pengantar
viii	Kata Sambutan
xii	Daftar Isi
xiii	Daftar Apendiks
01	Merambah Jalan Menuju Sepakat
11	Jalan Perempuan Bukan Jalan Tol
25	Menyuarakan Suara Perempuan Aceh
37	Duek Pakat Inong Aceh I : Perempuan Gemakan Suara Damai Perdana di Nanggroe
53	Konklusi Suara Perempuan Aceh
63	Selayang Pandang : Makna Damai & Kenangan Perjuangan
107	Galeri Perjuangan
115	Daftar Pustaka
116	Biodata Penulis
118	Apendiks

Daftar Apendiks

118	Apendiks I : Peserta DPIA I
131	Apendiks II : Peserta DPIA II
135	Apendiks III : Peserta DPIA III
148	Apendiks IV : Peserta DPIA IV

Merambah Jalan
Menuju Sepakat

Kantor Flower Aceh, Lampriek, Mei 1999

Beberapa perempuan muda duduk dengan formasi melingkar. Semangat yang dipancarkan melalui gerak-gerik, tak dapat menyembunyikan ketegangan dalam suara serta ekspresi wajah mereka. Hari itu, dinding-dinding kantor Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Flower Aceh menjadi saksi timbulnya kuntum penting dalam sejarah pergerakan perempuan Aceh dalam memperjuangkan perdamaian.

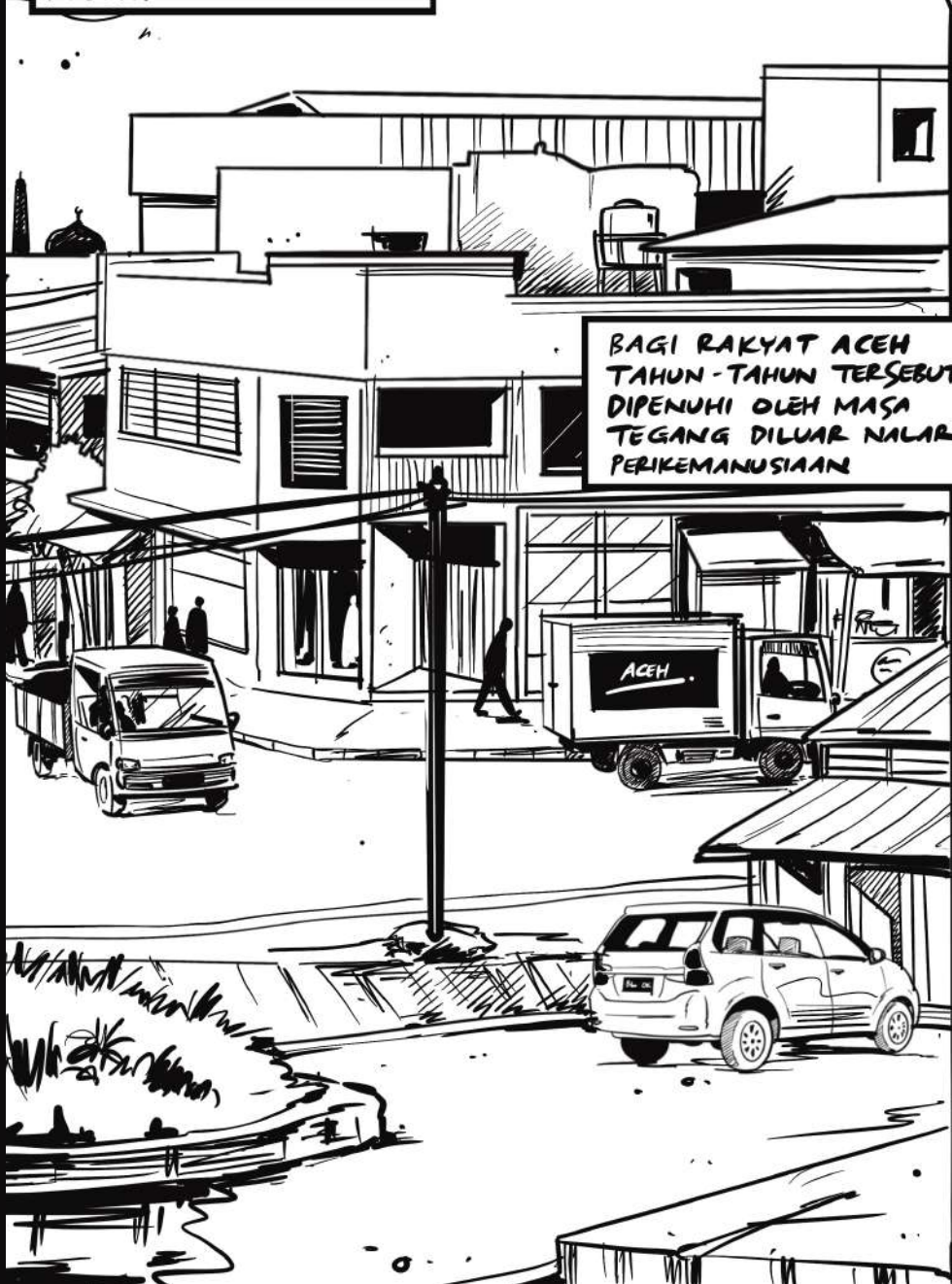
Di luar sana, Banda Aceh—julukan modern Kutaraja—setia menghangatkan jiwa penduduknya dengan pasokan sinar matahari yang konstan. Anak-anak sekolah masih menunggu bel terakhir tanda pulang, para pekerja tekun ber jihad mencari rezeki. Suasana tampak tenang. Hanya mereka yang benar-benar paham, tahu bahwa ketenangan Banda Aceh saat itu adalah tenangnya langit sebelum badai.

Sembilan tahun lamanya Pemerintah Indonesia menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) sejak 1989 hingga 1998. Bagi masyarakat Indonesia di luar Aceh, penetapan DOM beserta seluruh dampaknya, hanya menjadi berita samar-samar yang mereka dapatkan dari media massa yang masih berani menyuarakan kebenaran. Namun, bagi mereka yang paham, apalagi tentunya bagi rakyat Aceh sendiri, tahun-tahun tersebut adalah masa-masa tegang lagi mencekam yang dipenuhi peristiwa di luar nalar kemanusiaan.

Peristiwa-peristiwa yang dialami rakyat di daerah-daerah yang dijuluki wilayah hitam dan merah, terus mengalir memenuhi telinga dan pikiran orang-orang yang peduli

9 TAHUN LAMANYA
PEMERINTAH JAKARTA
MENETAPKAN ACEH
SEBAGAI DAERAH OPERASI
MILITER

BAGI RAKYAT ACEH
TAHUN-TAHUN TERSEBUT
DIPENUHI OLEH MASA
TEGANG DI LUAR NALAR
PERIKEMANUSIAAN



pada nasib bangsanya. Pengalaman turun ke daerah untuk membantu para pengungsi, mendampingi korban kekerasan, dan sebagainya, menguatkan kesimpulan bahwa sudah saatnya mengambil satu tindakan nyata.

“Cepat lipat planonya.”

“Segera lipat. Kita simpan di tempat aman.”

Suara-suara tegang terdengar di ruangan tempat rapat itu.

Para perempuan muda di kantor Flower itu, semula membahas pembentukan organisasi relawan perempuan untuk masalah pengungsi. Kemudian, pembicaraan dalam rapat berkembang ke arah upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan perdamaian di Aceh. Hari itu, para perempuan muda itu baru selesai membahas bujet untuk rencana gelaran sebuah acara besar: kongres perempuan Aceh. Acara ini direncanakan harus melibatkan wakil-wakil dari seluruh perempuan di Aceh, agar kesimpulan akhir yang didapat dan rekomendasi setelah kongres nanti benar-benar dapat dianggap mewakili pendapat dan keinginan perempuan Aceh.

Karena itu, penyusunan bujet merupakan salah satu poin penting dalam rangkaian persiapan acara. Namun, hari itu para perempuan penggagas kongres yang berkumpul di kantor Flower, yaitu Suraiya Kamaruzzaman, Samsidar, Azriana Manalu, Khairani Arifin, Evi Elviza, Syarifah Rahmatillah, dan Nurhasdiana, paham betul adanya faktor eksternal yang menjadikan mereka harus ekstra hati-hati dalam bertindak.

Walaupun status Daerah Operasi Militer yang melekat pada Aceh sejak 1989 telah resmi dicabut pada 7 Agustus 1998, dan diikuti permintaan maaf Presiden Habibie kepada rakyat Aceh pada 17 Agustus 1998, tetapi pada kenyataannya praktik-praktik operasi militer masih terus terjadi. Misalnya,

Operasi Sadar Rencong I baru saja dimulai pada bulan Mei 1999. Sebelum tahun berganti, telah terjadi berbagai peristiwa memilukan yang kelak membekas pada halaman hitam sejarah Aceh. Sebut saja Tragedi Simpang KKA Aceh Utara (Mei), Tragedi Peudada Bireuen (Mei), Tragedi Alue Nireh Aceh Timur (Juni), dan Tragedi Beutong Ateuh—Teungku Bantaqiah—(Juli) yang menembus atmosfer internasional sebagai kebengisan yang bertolak belakang dengan keinginan perdamaian dan keadilan. Rentetan tragedi tersebut seolah menjadi “klimaks” dari berbagai peristiwa memilukan yang terjadi sepanjang tahun 1999 di Aceh, yang diawali dengan dua tragedi tak terlupakan, yaitu Tragedi Gedung KNPI Aceh Utara (Januari) dan Tragedi Idi Cut Aceh Timur (Februari).

Halaman utama media massa lokal Aceh tahun itu masih terus memuat berita-berita yang mendirikan bulu kuduk: penculikan, penghilangan paksa, penembakan misterius, pembakaran sekolah, dan pengungsian ribuan rakyat—yang tentu saja termasuk perempuan dan anak-anak.

Kian hari, kengerian semua peristiwa itu semakin terasa dekat pada perempuan-perempuan muda yang berkumpul di Kantor Flower Aceh itu. Untuk Azriana, akrab disapa Nana, misalnya. Saat itu ia tinggal di Aceh Utara, dan ketika berada di Banda Aceh ia menginap di kantor Flower. Suatu pagi, lepas subuh, Nana keluar untuk menikmati udara pagi sekaligus mencari sarapan. Langkahnya terhenti oleh sebuah benda asing yang menggeletak di halaman. Saat dipungut dan dibuka, ternyata benda itu adalah sebongkah batu yang dibungkus kertas. Bukan kertas biasa karena pada permukaannya tertulis data pribadi Azriana: nama lengkap, nama orang tua, hingga alamatnya di Lhokseumawe.

07 AGUSTUS 1998

STATUS DAERAH OPERASI MILITER
DI ACEH.. RESMI DICABUT!

MASIH ADA
API DALAM
SEKAM

17 AGUSTUS 1998



SAYA
MINTA
MAAF!

- PRESIDEN
B.J. HABIBIE -



Ada pula kalimat-kalimat yang menyebutkan asal-usul Azriana sebagai “orang non-Aceh” dan larangan baginya untuk “ikut campur” dalam masalah Aceh. Siapa pun yang melemparkan kertas itu ke halaman kantor Flower, seperti ingin menunjukkan bahwa mereka tahu betul siapa Azriana, bagaimana menemukannya, dan bahwa mereka ingin Azriana menghentikan apa pun yang tengah dilakukannya untuk menangani isu Aceh.

Bagi Suraiya Kamaruzzaman, teror yang didapat lain lagi. Dia mendapati dirinya ada dalam daftar 60 orang “wajib tembak” yang dimuat dalam majalah aparat, *GARDA*. Namanya tertulis lengkap dengan posisinya sebagai “Direktur Flower Aceh”. Masuknya nama Suraiya dalam daftar itu tidak mengandung arti lain, selain bahwa bila aparat berhasil “menemukan” Suraiya, maka perintah yang akan dijalankan adalah “dor” di tempat.

Samsidar, yang masa itu telah bergiat di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai salah satu komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Indonesia, mendapat bagian juga. Rumah dinasnyanya di Jalan Cemara, Jakarta, diacak-acak. Beberapa dokumen hilang.

Para penggagas kongres yang lain juga tak lolos dari teror. Naimah Hasan yang seorang dosen dan Rosmawardani Muhammad yang menjabat sebagai hakim pun “ketiban” ancaman. Keduanya mendapatkan surat kaleng berisi ultimatum agar mereka berhenti.

“Hentikan sepak terjangmu. Jangan jual Aceh!” Antara lain begitu bunyi surat kaleng yang ditujukan pada Naimah Hasan.

Surat-surat kaleng ini juga memainkan banyak ujaran kebencian dan isu SARA. Misalnya: “Orang Jawa, keluar dari

OPERASI SADAR BENCONG 1
MEI 1999



MENYEBABKAN
TERJADI BERBAGAI
PERISTIWA MEMILUKAN

TRAGEDI
ALUE NIREH
SIMPANG KKA
GEDUNG KNPI
ACEH UTARA
PEUDADA
IDI CUT
BEUTONG
ATEUH



Aceh! Orang Gayo tidak tahu diri!”

Untuk Evi, baru berusia 26 tahun saat itu, dia dicekam ngeri ketika makan di sebuah restoran cepat saji. Ada beberapa persona militer tengah makan, senjata api mereka diletakkan di atas meja. Melihat itu, Evi gemetar. Dia tidak pernah mengalami kontak senjata secara langsung. Namun, kengerian yang dirasakannya itu nyata, membuatnya merasa seperti lumpuh seketika.

Di Banda Aceh, saat itu, kuku-kuku perang seperti api dalam sekam. Nyalanya tak tampak, tetapi panasnya terasa menyambar hingga ubun-ubun. Kepentingan mengadakan kongres dirasa kian mendesak, seiring dengan semakin bulatnya suara dukungan untuk referendum, dengan kemungkinan hasil 80 persen rakyat memilih lepas dari Republik Indonesia.

Bagi para penggagas Duek Pakat Inong Aceh (DPIA), referendum dinilai belum menjadi solusi terbaik. Pertimbangannya, bila hasil referendum adalah menyatakan Aceh “lepas” dari NKRI, maka kemungkinan besar Pemerintah Republik Indonesia (RI) akan mengirimkan pasukan keamanan secara besar-besaran ke Aceh. Pilihan yang diberikan oleh pemerintah pusat adalah otonomi, tetapi tidak diterima oleh faksi yang berseteru langsung dengan Pemerintah RI di Jakarta. Jelas ini pun akan kembali menyulut baku senjata.

Para perempuan itu berpikir, apa pun pilihannya, maka yang akan menjadi korban, lagi-lagi, adalah rakyat. Terutama perempuan dan anak-anak. Tentu saja mereka tak ingin itu terjadi.

Maka, sebuah kongres yang menghimpun suara sejati perempuan Aceh dipandang penting sebagai jalan keluar:

sebuah jalan damai, tempat bagi semua suara didengarkan dan diberi ruang. Meski nyatanya jalan damai yang dipilih tetap mengucur peluh dan menetes tangis. Walau rute yang ditempuh tak semulus jalan tol, tetapi para perempuan Aceh itu paham betul makna dari harga perwujudan sebuah perdamaian.

Disadari atau tidak, tindakan yang dilakukan oleh para perempuan Aceh ini menjadi bukti nyata perdamaian Aceh yang hadir dari hasil perjuangan. Damai Aceh tidak hadir secara cuma-cuma. Konon lagi disebut sebagai anugerah dari sebuah bencana. Benar bahwa perdamaian Aceh merupakan anugerah, tetapi dia hadir melalui beragam pengorbanan dan juga rasa sakit.

Jalan Perempuan
Bukan Jalan Tol

Medio 1999, Samsidar mendapat telepon dari Prof. Dr. Saparinah Sadli. Ketua Komnas Perempuan periode 1998—2003 itu mengatakan ada sesuatu yang teramat penting yang ingin didiskusikannya. Walau tengah mengalami gangguan kesehatan, begitu kembali ke Jakarta, Samsidar segera menemui Saparinah Sadli.

Saparinah menyampaikan kepada Samsidar bahwa Komnas Perempuan dan Komnas HAM mendapat kunjungan dari beberapa perempuan anggota Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Aceh, yang mengajukan permintaan dukungan untuk mengadakan kongres perempuan Aceh. Kongres itu, sebut Saparinah, bertujuan untuk mencari jalan keluar terbaik bagi masalah yang tengah dihadapi perempuan Aceh kala itu.

Saparinah pun mengulang kembali pernyataannya kepada delegasi dari BKOW Aceh tersebut kepada Samsidar, bahwa salah satu komisioner Komnas Perempuan, yaitu Samsidar, berasal dari Aceh. Saparinah Sadli mendorong agar delegasi BKOW berdiskusi langsung mengenai rencana tersebut dengan Samsidar.

Sementara itu di Aceh, Suraiya Kamaruzzaman beserta rekan-rekannya di Flower Aceh secara teratur mengadakan “operasi lapangan”, membantu mereka yang terdampak konflik. Flower Aceh didirikan oleh tiga perempuan Aceh pada 23 September 1989. Mereka adalah Suraiya Kamaruzzaman, Jawarah, dan (almh.) Hijriati.

Saat itu, Suraiya merupakan mahasiswa di Universitas Syiah Kuala. Sebagai “anak kota”, kegiatan bersama organisasi yang didirikannya itu membuat Suraiya sadar betapa gentingnya situasi di luar Kota Banda Aceh. Kian sering

PADAHAL ..
BELUM TENANG

MASIH ADA DAMPAK
PERISTIWA YANG
BELUM DISUARAKAN ..

DOR!

PERDAMAIAN
DI ACEH..

PENGUNGSI..

KORBAN
KEKERASAN..

KITA
HARUS
BERTINDAK ..



Flower turun ke daerah konflik, kian jelas betapa perempuan dan anak-anak di sana menjadi lapisan utama yang terdampak sangat buruk.

Dalam salah satu kegiatan di daerah Geumpang, Pidie, Flower mengusahakan penanaman tanaman obat-obatan. Program ini dipicu permintaan masyarakat setiap kali relawan Flower turun ke lapangan. Saat itu, masyarakat yang ditemui selalu menanyakan obat-obatan, mulai untuk menangani keluhan ringan seperti sakit kepala, sampai pada pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) untuk luka.

Dalam situasi konflik, obat-obatan adalah salah satu kebutuhan yang sangat sulit didapat. Bagi perempuan, situasi ini bertambah pelik dengan hadirnya keluhan khas perempuan. *Pre-menstrual syndrome* (PMS) dan *dysmenorrhae* (nyeri haid). Belum lagi jika melahirkan dan dalam masa nifas. Sampai sejauh itu problematika yang harus dihadapi perempuan di masa konflik, tetapi perhatian yang diterima oleh perempuan yang terdampak konflik sangat terbatas. Andaipun tersedia, perhatian atau bantuan itu bersifat umum. Sedangkan kebutuhan spesifik khas perempuan tidak ada, meski saat itu sangat dibutuhkan.

Ditambah lagi kenyataan pahit tentang kaum laki-laki di wilayah “hitam” dan “merah” saat itu banyak yang meninggalkan gampong—sebutan khas untuk desa dalam bahasa Aceh. Bahkan ada yang menyelamatkan diri dengan kabur ke luar provinsi atau luar negeri. Alasannya sederhana, karena kaum lelaki menjadi sasaran kecurigaan pihak-pihak tertentu yang dituduh sebagai bagian dari mata-mata aparat RI ataupun Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Akibatnya, yang tertinggal di gampong rata-rata adalah perempuan dan anak-

DALAM KONFLIK
PEREMPUAN SANGAT
TERDAMPAK

KEKERASAN
SEKSUAL

KAUM LAKI
LAKI DISANGKA
MATA-MATA
GAM

MENANGGUNG
KELUARGA..

PRE-MENSTRUAL
SYNDROME

NYERI
HAID..



anak, atau para lelaki yang sudah gaek. Pada akhirnya, segala urusan kehidupan termasuk kondisi-kondisi tertentu yang terjadi sebagai dampak konflik—termasuk segala bentuk kekerasan atau melakukan proses-proses fardu kifayah—harus ditanggung oleh perempuan.

Semua itu mengantarkan para aktivis perempuan Aceh pada kesimpulan bahwa suara perempuan Aceh harus digemakan ke tingkat nasional, bahkan internasional. Suraiya bersama Flower menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) atau yang dikenal juga dengan sebutan *civil society organization* (CSO) lainnya.

Para aktivis perempuan Aceh, termasuk Suraiya, mulai secara teratur menghadiri Sidang Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di Jenewa, untuk mengadvokasi kasus-kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual, terhadap perempuan lintas usia di Aceh.

Pada 1998, Suraiya bersama Saparinah Sadli—dari Komnas Perempuan—bertemu dengan para jenderal di Jakarta untuk menuntut penyelesaian kasus-kasus pemerkosaan terhadap perempuan di Aceh. Bersama Amnesty Internasional, Suraiya juga mengampanyekan isu perempuan di beberapa forum internasional, semisal di Melbourne, Australia dengan tujuan mendorong dialog damai dalam menyelesaikan konflik dan genosida (pembantaian massal) di Aceh.

Kian hari, kebutuhan untuk mengomunikasikan secara jelas pada dunia akan perihalan kebenaran yang dirasakan perempuan Aceh semakin mengental. Gagasan untuk mengadakan sebuah rapat besar yang melibatkan seluruh elemen perempuan Aceh terpatri di benak Suraiya, selaku aktivis perempuan Aceh. Gagasan ini mendapat porsi

pembahasan besar dalam rapat-rapat bersama pegiat Flower serta CSO lain, yaitu Khairani Arifin, Samsidar, Azriana, Syarifah Rahmatillah, Nursiti, dan lain-lain. Tajuknya saat itu adalah “Kongres Perempuan Aceh”.

Sementara itu, saat Samsidar mudik ke Aceh pada sekitar Mei atau Juni 1999, ia dihubungi oleh Naimah Hasan—pimpinan delegasi BKOW yang datang ke Komnas Perempuan. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala yang juga Ketua BKOW Aceh itu mengajak bertemu dan berdiskusi.

Naimah Hasan mengungkapkan bahwa tim dari BKOW dan Forum Peduli HAM telah lebih dulu melakukan investigasi terhadap korban-korban pelanggaran HAM pada Juli 1998 sebelum DOM dicabut pada bulan Agustus. Menurutnya, perempuan Aceh saat itu bukan saja menjadi korban konflik bersenjata, tetapi juga digunakan sebagai alat legitimasi untuk memperkuat keinginan pihak-pihak tertentu. Keresahan itu membuat Naimah bersama para sejawatnya melakukan penelusuran ke lokasi pengungsian menggunakan dua moda darat (bus dan mobil) menuju Pidie, lalu dilanjutkan ke Bireuen, kemudian Lhokseumawe, lalu Aceh Utara, hingga Aceh Timur.

Setelah pencabutan DOM, muncul gejolak politik lainnya. Rakyat menjadi tidak nyaman karena banyaknya kasus pengungsian yang “direayasa”. Padahal menurut keterangan yang Naimah dapatkan, masyarakat Aceh di sana tidak nyaman menjadi pengungsi. Disinyalir pihak GAM ingin menunjukkan bukti konkret kepada dunia bahwa kondisi Aceh tidak baik-baik saja. Dan memang benar, kondisi masyarakat Aceh saat itu jelas terpuruk, hanya saja tak ada dokumentasi konkret yang dapat dijadikan sebagai bukti. Namun, terlepas alasan apa pun, pada akhirnya masyarakat terpaksa mengungsi ke jalan-jalan

besar, seperti di wilayah Pidie. Naimah menyebutkan bahwa dirinya menyaksikan langsung kondisi tersebut saat mengajak kawan-kawannya untuk mendatangi lokasi pengungsian.¹

Kemudian pernyataan senada juga diungkapkan pula oleh Suraiya. Menurut kesaksiannya, saat itu, daerah pengungsian dikuasai oleh GAM. Ketika itu, terdapat kasus perempuan hamil yang meminta izin kepada pihak-pihak tertentu agar bisa berangkat ke Banda Aceh untuk melahirkan di tempat kakaknya, tetapi tidak diizinkan. Benar bahwa pada awalnya alasan masyarakat mengungsi karena aparat RI masuk ke kampung-kampung dan membakar rumah warga. Namun sayangnya, bak memakan buah simalakama, posisi warga laki-laki di pengungsian kerap terhimpit di antara ancaman pihak GAM dan TNI. Pada akhirnya, lagi-lagi perempuan yang menjadi tameng. Menurut Suraiya, alasan kerapnya perempuan dijadikan penengah ancaman di masa konflik disebabkan stigma bahwa perempuan tidak akan ditembak. Namun pada kenyataannya, kala itu di Aceh Selatan, tiga orang perempuan justru terluka karena ditembak.²

Menariknya, penelusuran Tim Forum Peduli HAM dan BKOW ini dilakukan lebih dahulu dibandingkan rangkaian investigasi oleh Tim Komnas HAM yang dipimpin Baharuddin Lopa. Tim Komnas HAM dibentuk pada 19 Agustus 1998, yaitu setelah Gubernur Aceh Syamsuddin Mahmud meminta kepada Presiden BJ Habibie agar pelanggaran HAM yang terjadi selama berlangsungnya operasi militer di Aceh dituntaskan secara hukum.

Tim BKOW dan Forum Peduli HAM melakukan

¹ Wawancara Focus Group Discussion (FGD) I, Ruang Memorial Perdamaian Aceh, 24 Februari 2024

² Wawancara Focus Group Discussion (FGD) I, Ruang Memorial Perdamaian Aceh, 24 Februari 2024

**BANDA ACEH
YANG HANGAT..**

**PARA PEKERJA
& ANAK SEKOLAH
BERKEGIATAN**



**..TAMPAK
TENANG..**

**YUK!
AMANKAN
DOKUMENNYA
...**



24 AGUSTUS 1998

PENGUMUMAN
HASIL INVESTIGASI
KONFLIK ACEH

781
TEWAS

163
HILANG

368
DIANIAYA

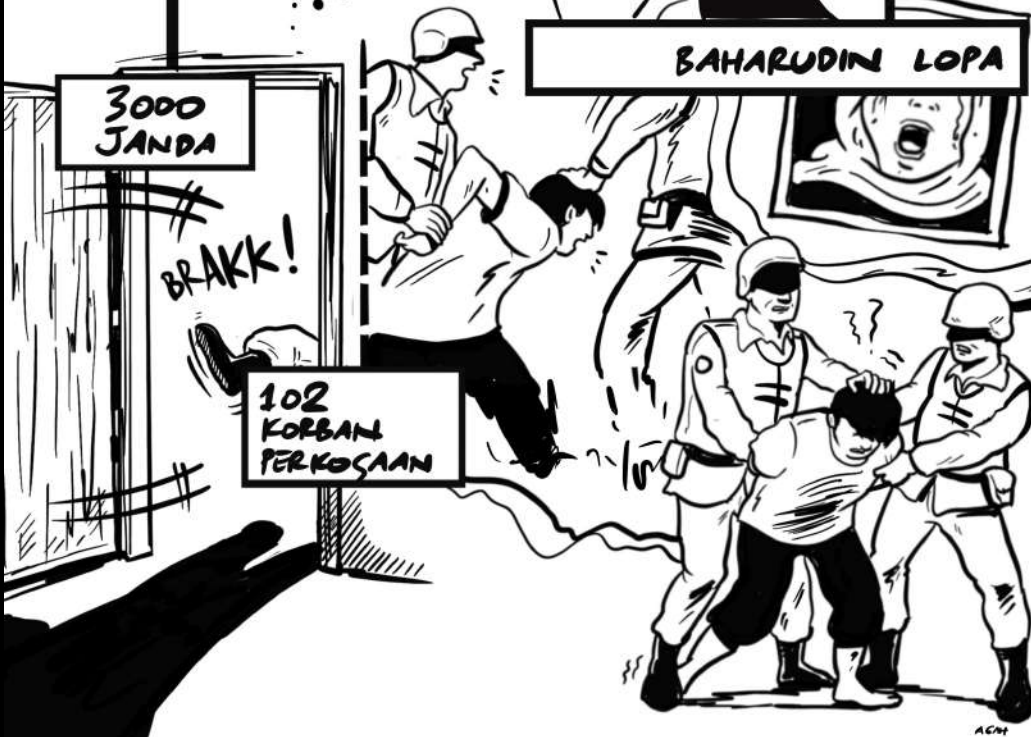
3000
JANDA

BRACK!

102
KORBAN
PERKOSAAN



BAHARUDIN LOPA



penelusuran dengan cara mengundang korban untuk datang ke masjid yang telah ditentukan. Sebelum diminta bersaksi, para korban atau saksi korban diminta berwudu terlebih dahulu. Pada pertemuan kesaksian ini, muncul beberapa perempuan yang berani bercerita. Mereka memberikan pernyataan pernah mengalami pelecehan seksual.

Investigasi dilakukan dua kali dan pada kesempatan kedua penelusuran dilakukan hingga ke Kecamatan Tangse, Pidie. Temuan Tim BKOW dan Forum Peduli HAM kemudian diturunkan dalam laporan majalah TEMPO.

Temuan Tim BKOW yang diserahkan kepada wartawan berhasil dirilis persis beberapa saat sebelum Panglima ABRI yang kala itu dijabat Jenderal Wiranto menyatakan bahwa seluruh pasukan nonorganik di Aceh akan ditarik pulang. Pengumuman pada 7 Agustus 1998 itu menjadi pertanda ditutupnya secara resmi lembar hitam status Daerah Operasi Militer di Aceh.

Kemudian pada 24 Agustus 1998, bertempat di Jakarta, tim yang dipimpin oleh Baharuddin Lopa mengumumkan hasil investigasi mereka terhadap korban konflik bersenjata yang terjadi di Aceh. Ditemukan setidaknya 781 orang tewas, 163 orang hilang, 368 orang dianiaya, janda akibat suaminya tewas/hilang mencapai 3.000 orang, anak yang menjadi yatim diperkirakan mencapai 15.000—20.000 orang, dan 102 perempuan mengalami perkosaan.³

³ Marzuki, Nashrun (Ed), dkk. 2011. *Fakta Bicara: Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005*. Koalisi NGO HAM Aceh: Banda Aceh.

437 PESERTA
TERBAGI
DALAM
5 KOMISI



"MERDEKA" BERARTI..
TIDAK LAGI MENGALAMI
KEKERASAN..
MUDAH Mencari
NAFKAH..
& ANAK-ANAK DAPAT
BERSEKOLAH TANPA GANGGUAN..

DPIA ADALAH AJANG BAGI
PEREMPUAN ACEH UNTUK MENYUARAKAN
HATI & NURANI SESUAI DENGAN
SUDUT PANDANG SENDIRI



NASIB PEREMPUAN
ACEH, HARUS
DITENTUKAN OLEH
PEREMPUAN ACEH
SENDIRI..

- NAIMAH -



DPIA DIHARAPKAN
BISA MENGHASILKAN
STATEMENT POLITIK

- SURAIYA -



Sementara itu, sebelum pencabutan DOM oleh Panglima ABRI, Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) melaksanakan sebuah penelitian di Aceh Tengah. Penelitian ini bertujuan mengetahui pendapat masyarakat Aceh Tengah terkait pencabutan DOM, situasi Aceh, dan jalan keluar yang diharapkan rakyat. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian itu mengajukan referendum dan merdeka sebagai opsi utama dan satu-satunya pemecahan masalah konflik Aceh.

Di sisi lain, sebagai Komisioner Komnas Perempuan, Samsidar turut terlibat dalam investigasi yang diadakan Komnas HAM tentang peristiwa Simpang Kertas Kraft Aceh (KKA) di Kabupaten Aceh Utara. Investigasi ini membawanya bertemu dengan masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Pidie. Dalam kesempatan investigasi di Aceh Tengah, Samsidar bertanya kepada para responden tentang definisi merdeka. Para responden yang 70 persennya terdiri atas perempuan itu pun menjawab, “Merdeka berarti tidak lagi mengalami kekerasan, mudah mencari nafkah, dan anak-anak dapat bersekolah tanpa gangguan.”

Para responden tersebut nyaris tidak peduli tentang siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan kelak. Kenyataan ini memberi perspektif baru pada situasi psikologis masyarakat Aceh. Cukup jelas, rakyat Aceh lelah berada dalam situasi konflik. Siapa pun yang berkuasa, mereka hanya berharap dapat menjalani hidup dengan aman, damai, dan sejahtera.

Di sepanjang tahun 1999, Aceh mengalami gelombang pengungsian. Masyarakat dari daerah dengan eskalasi konflik bersenjata yang intens meninggalkan kampung halamannya

menuju tempat-tempat yang dianggap dapat memberikan keamanan. Mereka menempati halaman-halaman masjid dan meunasah, sekolah, serta gedung pemerintahan. Dengan fasilitas penunjang hidup sangat terbatas, masalah kesehatan, serta berbagai masalah lain segera melanda para pengungsi tersebut.

Para relawan dari organisasi masyarakat sipil menengarai satu hal yang sama, yaitu bahwa dalam rangkaian peristiwa Aceh, perempuan kerap dijadikan alat untuk mencapai tujuan pihak tertentu. “Pasukan kemanusiaan” utusan Flower Aceh, BKOW, dan belakangan disusul oleh Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK), serta beberapa lembaga kemanusiaan lainnya, saat membawa bantuan ke kantong-kantong pengungsian menyaksikan fenomena “menarik”. Apabila ada jurnalis yang ikut serta, apalagi jurnalis tersebut berpenampilan asing, maka boleh dipastikan beberapa pengungsi akan membentangkan bendera bulan bintang. Namun, ketika jurnalis tak hadir, bendera pun otomatis tiada.

Dalam satu kesempatan, Suraiya dan para relawan mendapati kasus seorang pengungsi yang mengalami kesulitan saat akan melahirkan. Ibu tersebut mengalami pendarahan. Bayi sulit keluar. Dia sangat membutuhkan bantuan medis. Namun, ada pihak yang melarang para relawan membawa sang ibu ke rumah sakit. Mencuat alasan demi membuka mata dunia bahwa Pemerintah Indonesia memperlakukan pengungsi Aceh dengan sangat tidak layak. Miris, pelarangan tersebut menyebabkan perempuan yang sedang hamil besar itu terlambat hadir di rumah sakit. Dia pun akhirnya mengembuskan napas terakhir. Dua nyawa hilang bersamaan.[]

Menyuarakan
Suara Perempuan Aceh

Konflik Aceh menjadi salah satu bukti bahwa suara dan kepentingan perempuan belum diakomodasi secara wajar sesuai porsi yang patut. Dalam tarik ulur perdamaian, perempuan kerap disebut sebagai pihak yang sangat berkepentingan. Namun, ketika perempuan menjadi korban akibat keputusan yang diambil tanpa melibatkan mereka, hal itu disikapi sebagai “*collateral damage*”, kematian atau kerugian yang dianggap tidak sengaja dan wajar-wajar saja.

Dalam hal krisis kemanusiaan di Aceh, faksi-faksi yang bertikai menghadirkan wakil-wakil perempuan yang sikapnya jelas berpijak pada salah satu kepentingan politik tentang posisi negeri dan rakyat Aceh di forum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Orang-orang yang dipilih sebagai “wayang” untuk memuluskan tujuan sang “dalang”. Mereka yang hadir untuk kepentingan segelintir orang, bukan mewakili suara perempuan Aceh kebanyakan.

“Ada pihak yang tampil seraya mengatasnamakan perempuan Aceh. Kemudian mereka menyuarakan pendapat tertentu. Padahal belum tentu itu yang dimaui perempuan Aceh.”⁴

Menengarai potensi konflik di antara kelompok-kelompok di Aceh yang semakin meruncing, maka menghadirkan tokoh kunci untuk menetralkan keadaan saat itu dianggap penting. Seorang ilmuwan yang dapat memberikan pandangan tentang masalah Aceh secara lugas dan logis. Sang ahli yang dapat menawarkan perspektif yang diperlukan untuk persiapan gerakan.

Keperluan tersebut sangat mungkin untuk terfasilitasi, apalagi mengingat Flower Aceh sebagai CSO yang bergerak

⁴ Wawancara Focus Group Discussion (FGD) II, Hotel Seventeen Seutui, 7 Juli 2024

aktif di lapangan dan juga kehadiran BKOW Aceh yang memiliki jaringan hingga ke elite di Jakarta. Sudah tentu ilmuwan politik untuk melengkapkan strategi gerakan dapat dihadirkan.

Debra Yatim, jurnalis dan seniman pengabdian kemanusiaan berdarah Aceh, berperan sebagai penyambung lidah bagi tim penggagas kongres untuk mencari tokoh ini.

Maka munculah nama Dr. Chusnul Mar'iyah, dosen ilmu politik Universitas Indonesia. Dia segera menyanggupi untuk datang ke Aceh pada pertemuan yang direncanakan selanjutnya, 26 Desember 1999—yang mengambil momentum Hari Ibu.

Dr. Chusnul hadir secara pro bono—bekerja secara profesional tanpa mau dibayar—dalam dialog tersebut. Dia pun memilih untuk menginap di rumah Debra Yatim di kawasan Ulee Lheue, Banda Aceh.

Dalam pertemuan di Kantor BKOW bertajuk “Dialog Ureung Inong Aceh”, Dr. Chusnul membeberkan telaahnya tentang situasi Aceh. Dia mengkaji opsi-opsi politik yang saat itu berkembang subur di kalangan masyarakat, termasuk pilihan referendum dan merdeka.

Orang-orang yang hadir pada dialog tersebut adalah pegiat CSO. Di sinilah terjadi kesepakatan di antara hadirin bahwa perempuan Aceh memerlukan sebuah wadah untuk mengakomodasi pendapatnya. Wadah temu untuk perempuan Aceh mencari solusi tentang krisis dimensional yang menimpa Aceh, kebutuhan perempuan Aceh, dan segala dukungan yang dapat negara berikan untuk mengampu kebutuhan tersebut. Wadah yang hadir melalui sebuah rapat raksasa, yang harus melibatkan perempuan Aceh seluruhnya. Sebuah pertemuan akbar yang diberi nama Duek Pakat Inong Aceh (DPIA).

Kata *duek* pakat dan *inong* disepakati menjadi penggalan nama bagi kegiatan kubra itu setelah melalui berbagai pertimbangan serta debat panjang. Pada awalnya, istilah “kongres” yang mencuat. Namun, mengingat konstelasi budaya, sosial-politik dan kedudukan unik Aceh dalam sejarah negara Republik Indonesia, mengusung nama yang lebih mewakili jati diri Aceh lantas dipandang sebagai prioritas.

Kata *duek pakat* terdiri atas kata ‘*duek*’ dan ‘*pakat*’. *Duek* atau *taduek* berarti duduk. Sedangkan *pakat* berarti ‘mengajak’, bersepakat atau bersetuju. Dalam konteks budaya Aceh, *duek pakat* menunjukkan sebuah peristiwa sosial ketika seluruh unsur masyarakat berkumpul untuk bermusyawarah atau merembukkan sebuah isu, demi mencari kesepakatan dan jalan keluar. *Duek pakat* dilakukan orang Aceh dari lapisan sosial mana pun, baik untuk peristiwa bahagia seperti pernikahan, maupun untuk mengatur strategi perlawanan terhadap penjajah seperti yang dilakukan ketika menghadapi bangsa asing. Konsep ini sesuai dengan *asbabun nuzul* lahirnya gagasan kongres perempuan Aceh. Maka, kata itu dipilih untuk menggantikan kata “kongres”. Sedangkan kata perempuan diganti dengan *inong*—kata yang dalam bahasa Aceh berarti perempuan.

Sempat muncul keraguan di antara yang hadir tentang kata *inong*. *Inong* adalah istilah dalam bahasa Aceh bagi manusia yang memiliki rahim. Masalahnya, bangsa Aceh memiliki tak kurang dari 12 suku, dengan bahasa dan budayanya masing-masing.

**PEREMPUAN RENTAN
DIJADIKAN KOMODITAS
UNTUK KEPENTINGAN
TERTENTU..**

**PERTEMUAN BERLANGSUNG
HINGGA MALAM HARI..**

**YANG
MENGHASILKAN..**

**.. 22 BUTIR
REKOMENDASI..**

**KRU SEUMANGAT INONG ACEH
BAK DUEK PAKAT KEU AMAN,
MAKMU DAN ADEE
20 - 22 FEBRUARI 2000**



Di Pulau Simeulue saja, misalnya, dalam jarak hanya berbilang kilometer, sudah terdapat dua suku dengan budaya dan bahasa yang berbeda. Bila istilah “*inong*” digunakan untuk menyebut rapat raksasa yang akan diselenggarakan, maka problem yang muncul adalah rasa keadilan. Rapat ini dimaksudkan untuk mewakili semua perempuan Aceh, tanpa kecuali. Dengan demikian, istilah yang digunakan juga harus mewakili semua kalangan.

Selain itu, bagi masyarakat Indonesia di luar Aceh, kata *inong* ini lebih identik dengan “Inong Balee”. Dalam sejarah termaktub bahwa Inong Balee adalah pasukan legendaris angkatan perang Aceh Darussalam pimpinan Laksamana Keumalahayati. Anggotanya adalah para janda (*balee*) yang suaminya tewas dalam perang. Namun, pada tahun-tahun 1989–2005, istilah ini mengalami pergeseran makna. Nama *inong balee* kemudian melekat pada laskar perempuan dalam TNA (Tentara Neugara Aceh), sayap militer dari Geurakan Acèh Meurdèka.

Sempat dikhawatirkan penggalan nama *inong* akan memancing sikap kontra dari Pemerintah RI di Jakarta. Dampaknya tentu akan mempersulit terwujudnya cita-cita penyelenggaraan kongres perempuan Aceh.

Namun, setelah melalui serangkaian diskusi panjang, akhirnya kata *inong* disepakati untuk dipilih. Maka lahirlah nama Duek Pakat Inong Aceh (selanjutnya disebut DPIA). DPIA akan membuka ruang bagi semua kelompok untuk menyatakan pendapatnya. DPIA mengusung tema “*Krue Seumangat Ureung Inong Aceh, Bak Duek Pakat keu Aceh nyang Aman, Dame, ngon Ade*” (Semangat bagi Perempuan Aceh yang Duduk Bersama untuk Aceh yang Aman, Damai,

dan Adil).

Para penggagas DPIA tahu betul bahwa banyak organisasi sipil, *buffer* aksi mahasiswa, bahkan pelajar, menekankan agar DPIA mengusung gagasan referendum. Wacana referendum Aceh mengemuka pada awal 1999. Wacana tersebut muncul dalam Kongres Mahasiswa dan Pemuda Aceh Serantau yang dihelat pada 31 Januari hingga 4 Februari 1999. Untuk mengawal ide referendum itu terbentuklah Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA).

SIRA dimotori oleh para mahasiswa Aceh. Ketua presidiumnya, Muhammad Nazar, kala itu baru lulus dari IAIN Ar-Raniry dan menjadi pengajar di sana. Tugas utama SIRA adalah mengampanyekan terlaksananya referendum di Aceh dengan opsi merdeka atau tetap bersama dengan Indonesia.

Sepanjang 1999, SIRA mengadakan serangkaian mobilisasi massa untuk mendukung referendum. Perlahan, usaha SIRA memperoleh dukungan tokoh-tokoh elite di Aceh. Bahkan deklarator GAM, Hasan Tiro, dan panglimanya, Abdullah Syafi'i, ikut mendukung referendum sebagai solusi terbaik, dibandingkan mengangkat senjata.⁵

Beberapa *buffer* aksi mahasiswa pro-referendum, secara terpisah, mengirim wakil menemui para penggagas DPIA: yang di antaranya adalah Suraiya Kamaruzzaman, Naimah Hasan, dan Khairani Arifin. Salah seorang tokoh pro-referendum, Cut Nur Asyikin, menjumpai Samsidar. Sempat mengira bahwa Samsidar adalah Suraiya, sang Ketua *Steering Committee* (SC) DPIA. Lantas, Cut Nur Asyikin mendesak Samsidar agar DPIA merekomendasikan referendum.

⁵ Firdausi, Fadrik Aziz. 2019. *Aceh Menuntut Referendum, Dua Dekade Lalu*. Tirto.id. Terbit 10 Juni 2019 08.00 WIB <https://tirto.id/aceh-menuntut-referendum-dua-dekade-lalu-d9pZ> diakses pada 26 Agustus 2024 pukul 18.57 WIB

Dalam sebuah wawancara tahun 1999, anggota DPR RI asal Aceh, Hasballah M. Saad (alm.), mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM), 80% responden menginginkan referendum. Sementara jajak pendapat lain menyebut bahwa 20% responden menginginkan merdeka. Hasballah menyebut bahwa suara untuk merdeka itu muncul di luar isu Gerakan Aceh Merdeka.⁶

Majalah *UMMAT* merilis berita bahwa pada 2 Februari 1999, IAIN Ar Raniry mengadakan *polling*, 85% responden setuju untuk referendum. *Polling* diadakan kepada para ulama, mahasiswa, pelajar, anggota partai politik, dan kalangan pemerintah. Bentuk Aceh yang diinginkan pasca referendum adalah merdeka (52% dengan sampling error 5%).⁷

Bulan Oktober 1999, Pemerintah Pusat mengesahkan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Isi Undang-undang (UU) itu, antara lain, berupa pelaksanaan pengenalan syariat Islam, pendidikan, peraturan adat serta pembentukan Majelis Ulama (*Board of Ulama*) Aceh. Undang-undang tersebut ditanggapi dingin oleh banyak pihak, yang menganggap bahwa hal tersebut hanya mekanisme pembujuk belaka.

Dalam bulan Januari 2000, beberapa pekan sebelum DPIA dilaksanakan, muncul pernyataan sikap tertulis dari CSO serta *buffer* aksi, yang ditunjukkan kepada MPR, DPR, dan presiden. Isi pernyataan sikap itu adalah desakan untuk gencatan senjata serta diadakannya pembicaraan penyelesaian masalah Aceh, dengan menghadirkan mediator dari kalangan masyarakat internasional. Desakan ini disertai ultimatum

⁶Widjanarko, Tulus dan Sambodja, Asep (Ed). 1999. *Aceh Merdeka Dalam Perdebatan*. Hal 183. PT Cita Putra Bangsa: Jakarta.

⁷Ibid. Hal 330-331

bahwa bila MPR/DPR dan presiden tidak segera menyetujui hadirnya mediator, maka akan terjadi boikot terhadap segala bentuk dialog dengan Jakarta serta pembubaran partai-partai politik di Aceh. Pernyataan sikap ini diteken oleh 18 CSO dan *buffer* aksi mahasiswa/pelajar, termasuk SIRA.⁸ Sementara itu, sikap perempuan Aceh sendiri saat itu terkotak-kotak antara mereka yang cenderung pada referendum, memilih otonomi, dan mereka yang netral.

Sedangkan di tingkat pemerintah pusat, Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan akan mengakomodasi tuntutan referendum. Dia berharap wacana tersebut dapat menurunkan intensitas konflik, dan membuka jalan perundingan. Namun, pemikiran Gus Dur tentang referendum tidak mencakup opsi merdeka, melainkan bentuk-bentuk otonomi.⁹

Seiring semakin nyaringnya suara-suara dukungan terhadap referendum, tekanan yang dirasakan oleh rakyat pun semakin berat. Tantangan muncul silih berganti, mulai dari yang bersifat teknis hingga psikologis.

Beberapa hari sebelum pelaksanaan DPIA, mendadak saja sejumlah panitia mengundurkan diri. Bersamaan, mereka membatalkan pesanan atas kamar-kamar di hotel yang telah dipeservasi untuk peserta dari luar Banda Aceh. Belakangan diketahui bahwa pengunduran diri ini disebabkan adanya desakan oleh pihak yang merasa yakin bahwa perempuan Aceh “belum siap” untuk mengadakan kongres.

Muncul juga isu bahwa panitia menyelewengkan dana dari donatur, yang oleh media massa disebutkan mencapai

⁸ Mahmud Adan, Mahyuddin., 2011. *Mendekap Damai Aceh: to see the reality*. Ha 3-6. Trim Komunikata: Bandung

⁹ Firdausi, Loc.cit

miliaran rupiah. Keberadaan donatur ini juga menyebabkan panitia dan *steering committee* (SC) dituding membawakan misi asing ke dalam usaha penyelesaian konflik Aceh.

Kenyataannya, donatur DPIA saat itu, Office of Transitional Initiative (OTI), sebuah subkontraktor Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (United States Agency for International Development-USAID), memiliki kebijakan “*zero cash*”. Alias, mereka tidak memberikan bantuan berupa uang tunai, melainkan dalam bentuk barang-barang yang diperlukan untuk mendukung jalannya kegiatan. Misalnya poster, kertas, konsumsi, dan sebagainya. Sisi ngeri-ngerinya sedapnya, saat itu Rosmawardani Muhammad sering dicandai sebagai anak buah mereka.

“Bu Ros sedang banyak sekali uang nih, bagilah sedikit untuk kami, Bu,” ujar mereka.¹⁰ Walaupun bercanda, tetapi pernyataan semacam itu menunjukkan betapa seriusnya stigma yang dilekatkan kepada panitia DPIA saat itu. Stigma tak berdasar yang mengklaim DPIA memanfaatkan perempuan Aceh untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Bahkan akron DPIA pun sempat diplesetkan menjadi “Duek Publoe Inong Aceh” (Kesepakatan untuk Menjual Perempuan Aceh).

Sejatinya, pergerakan persiapan DPIA ini sudah dimulai jauh-jauh hari oleh para perempuan Aceh, bahkan sebelum pihak donatur terlibat. Sang hakim di Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh ini cukup aktif terlibat mengirimkan bantuan untuk masyarakat di tempat pengungsian. Salah satunya ke wilayah Pegunungan Jeunieb pada tahun 1999. Rosmawardani menjadi perwakilan untuk mengantarkan sumbangan dari masyarakat Aceh, khususnya ibu-ibu, untuk

¹⁰ Wawancara Focus Group Discussion (FGD) 1, Ruang Memorial Perdamaian Aceh, 24 Februari 2024

para pengungsi. Sebuah gerakan bersama, dari kita untuk kita. Dari perempuan untuk perempuan. Berbagai jenis sumbangan yang diserahkan semampunya. *Saboh u, saboh mok breuh pih jeut* 'sebutir kelapa, satu muk beras pun boleh', demikian prinsipnya. Selama perjalanan tersebut, Duek Pakat Inong Aceh turut disosialisasikan kepada masyarakat. Demikianlah strategi *sipat tak dua pat lut* (sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui) yang digunakan aktivis perempuan Aceh dalam rangka menyukseskan DPIA.

Kemudian, hari-hari jelang DPIA pun melecut. Seluruh SC dan panitia telah bekerja keras, mempersiapkan segalanya. Setiap hari diadakan rapat, terus menerus dilakukan cek dan ricek terkait semua persiapan.

Samsidar, sebagai salah satu SC, bertanggung jawab untuk menentukan kriteria peserta, merancang tata tertib, dan menyusun agenda sidang. Dia dan Syarifah Rahmatillah membahas apa saja yang akan dimasukkan ke dalam agenda sidang, siapa saja yang akan diundang, dan sebagainya.

Azriana Manalu bertugas sebagai Korlap Aceh Utara. Tugasnya memastikan bahwa peserta atau undangan dari Aceh Utara dan Lhokseumawe dapat menghadiri DPIA. Bagi Khairani Arifin, juga Nursiti, keduanya terpaksa tidak banyak terlibat dalam proses persiapan akhir, karena baru saja melahirkan. Khairani masih sempat ikut rapat di BKOW tanggal 16 Februari 2000. Namun, apa hendak dikata, pulang rapat, ketubannya pecah saat dia sedang mencari kado ulang tahun untuk suaminya. Sebagaimana tradisi Aceh, perempuan yang baru melahirkan dilarang keluar rumah sebelum 40 hari berlalu. Khairani pun tidak dapat aktif lagi dalam persiapan DPIA. Sejak itu, Khairani harus puas dengan membaca

perkembangan DPIA dari koran. Bahkan pada Hari H-pun dia terpaksa tidak ikut hadir.

Bagi Nursiti, kejadiannya agak berbeda: dia melahirkan pada November 1999. Karena itu, keluarga Nursiti sudah mengizinkannya menghadiri DPIA pada Februari tahun berikutnya. Sebab dia telah melewati 40 hari “pingitan” masa nifas. Namun, karena masa 40 hari itu baru saja lewat, Nursiti masih tetap diharuskan membawa gunting dan bawang putih di seputar pinggangnya. Sebuah tradisi tolak bala untuk menjaga keselamatan perempuan hamil dan menyusui.

Pada jam-jam terakhir jelang DPIA, draf sidang pleno yang telah disepakati, sudah dicetak untuk dibagikan kepada peserta. Namun kemudian diketahui bahwa draf tersebut diubah oleh relawan yang bertugas mengetik dan memperbanyak dokumen tersebut. Versi yang dicetak itu mengandung hal-hal yang dapat menggiring sidang pada situasi jalan buntu, *deadlock*.

Beruntung, tim DPIA sempat menyadari kegagalan tersebut sebelum sidang berlangsung. Mereka pun memperbaiki isi draf agar kembali sesuai dengan kesepakatan awal. Tentu hal tersebut bukan perkara gampang. Samsidar melakukannya dengan membandingkan draf yang sudah dicetak, dengan versi yang ada dalam laptopnya. Masalah masih ditambah dengan perbanyakkan dokumen, yang ratusan angkanya. Penggandaan dokumen dengan fotokopi yang memakan waktu lebih dari satu jam itu dilakukan di dua toko fotokopi sekaligus. Semua pekerjaan itu selesai mepet, tapi tepat pada waktunya.[]

Duek Pakat Inong Aceh I:

Perempuan Gemakan

*Suara Damai Perdana
di Nanggroe*

Hari Pertama, 20 Februari 2000

Pembukaan DPIA I di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh dihadiri ratusan *inong* Aceh selaku peserta *duek pakat*, dan ratusan masyarakat Aceh lainnya yang turut menyaksikan. Pemilihan masjid ikonik kebanggaan masyarakat Aceh tersebut sebagai tempat pembukaan agenda Duek Pakat Inong Aceh menyiratkan makna mendalam akan fungsi masjid yang menjadi milik seluruh umat Islam, termasuk kaum perempuan.

Acara dibuka dengan penabuhan *rapa-i* di halaman masjid oleh tujuh perempuan ulama dari beberapa daerah di Aceh. Filosofi memukul tambur tersebut menyiratkan keberanian perempuan Aceh untuk memecah kebisuan atas pembungkaman penderitaan perempuan Aceh di masa konflik. Kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Rosmawardani Muhammad. Saat itu, suasana kompak terasa kental di antara panitia dan peserta. Keinginan untuk memberikan solusi terbaik bagi Aceh oleh para perempuan Aceh sendiri. Kemudian, kerumunan itu menyebar ke beberapa titik berbeda sesuai lokasi sidang komisi masing-masing peserta.

Sementara pembukaan Duek Pakat Inong Aceh sedang berlangsung di Masjid Raya Baiturrahman, di Taman Sari justru terdapat beberapa puluh perempuan yang duduk diam seraya memegang karton dan spanduk. Mereka adalah massa unjuk rasa *buffer* aksi, yang mengatasnamakan perwakilan 14 organisasi perempuan dan mahasiswa. Mereka menyatakan bahwa Panitia DPIA tidak berhak mengklaim telah mengatasnamakan perempuan Aceh secara menyeluruh.

Menurut mereka, dampaknya akan sangat membahayakan bagi eksistensi pergerakan politik perempuan Aceh disebabkan, menurut mereka, DPIA belum melibatkan seluruh elemen perempuan Aceh.

Menanggapi hal tersebut, Suraiya Kamaruzzaman menjelaskan keterbatasan kemampuan panitia untuk melibatkan seluruh perempuan di Aceh. Bukan tidak mau, melainkan tidak mungkin, bahkan tidak masuk akal: mengingat situasi dan kondisi lapangan, daya tampung lokasi acara *duek pakat*, minimnya pendanaan, serta keterbatasan lainnya. Karena itulah sejak awal diputuskan bahwa: satu, peserta DPIA harus merupakan perempuan perwakilan masyarakat/ organisasi; dua, satu orang peserta DPIA disimbolkan sebagai perwakilan 1.000 perempuan di daerahnya.

Benar bahwa tidak banyak kisah yang menceritakan betapa peliknya usaha para perempuan Aceh di daerah-daerah untuk dapat hadir pada pergelaran DPIA di Banda Aceh kala itu. Ada yang mendapatkan undangan hadir, tetapi dilarang pergi oleh pasangan atau sanak saudaranya. Ada yang melakukan salat istikharah berulang-ulang, demi memantapkan hati menempuh perjalanan riskan. Ada yang berangkat sebagai rombongan, tetapi hanya sebagian yang tiba di lokasi pertemuan. Sebab sebagian peserta lainnya dicegat saat *sweeping* kendaraan.¹¹

Sungguh risiko melakukan perjalanan di masa pemberlakuan KTP Merah Putih bagi masyarakat Aceh saat itu sangatlah besar, terutama bagi perempuan. Perjalanan dengan niatan mulia untuk menghadiri DPIA tersebut, bagi perempuan Aceh saat itu merupakan tindakan berisiko

¹¹ Wawancara Tim Balai Syura Ureung Inong Aceh, Kantor BSUIA, 10 Februari 2024

tinggi yang berpotensi bagi mereka untuk mengalami tindak kekerasan, penculikan, bahkan penghilangan nyawa oleh oknum tidak dikenal.

Mengerikan pada masa itu, tetapi menjadi “lucu” ketika dikenang kembali saat ini. Pengalaman Azriana membawa para peserta *duek pakat* dari Aceh Utara misalnya. Perjalanan dari Aceh Utara menuju Banda Aceh dengan bus terasa lebih lama dari biasanya. Bukan karena jaraknya yang bertambah, melainkan karena sepanjang perjalanan itu sopir bus memutar kaset pidato tokoh GAM, Ishak Daud, yang berapi-api.

Bagaimana jika bus melewati pos-pos militer dan sayup-sayup suara itu terdengar hingga ke pos? Pertanyaan itu terus mengusik Azriana. Akhirnya, jurus pamungkas pun dilakukan. Azriana mengeluarkan beberapa kaset lagu-lagu lawas dari dalam tas dan menyerahkan kepada sopir untuk diputar. Suasana di dalam bus pun berubah. Tak lagi terasa mencekam seperti sebelumnya.

Panitia juga telah berusaha untuk merangkul semua elemen perempuan Aceh agar bisa menjadi peserta *duek pakat*. Tak terkecuali dari kalangan Inong Balee. Karena para Inong Balee ini berada di bawah komando Panglima GAM, Abdullah Syafi'i, maka izin dari Tgk. Lah—panggilan akrabnya—dirasa sangat penting oleh panitia. Berbekal mobil pinjaman dari Rektor IAIN Ar-Raniry, Prof. Safwan Idris (alm.), yang disopiri oleh seorang anak muda bernama Zainuddin T, berangkatlah Naimah Hasan, Chusnul, Ade Warni, Muslihah, dan Aida Riani ke pedalaman Pidie di Jiemjiem. Dalam mobil itu juga ada Debra Yatim dan seseorang yang mereka sebut sebagai Robert.

Sepanjang perjalanan mereka hanya bisa berzikir, berharap dan berdoa agar tak berpapasan dengan aparat atau terjadi kontak senjata. Naimah bahkan tak izin pada suaminya karena yakin pasti tak diizinkan pergi.

Setelah melalui perjalanan berjam-jam dari Banda Aceh, bertemu juga mereka dengan Tgk. Lah. Kedatangan mereka disambut dengan hangat. Namun, jawaban yang didapat dari Tgk. Lah sungguh di luar prediksi.

“Saya panglima lapangan,” begitu ia memulai ucapannya, “saya tidak berhak memberikan izin untuk mereka ikut (perwakilan Inong Balee). Tapi ini saya berikan nomor telepon.”

Sampai di situ, belum ada yang *ngeh* nomor siapa yang hendak diberikan oleh Tgk. Lah, sampai kemudian ia melanjutkan ucapannya. “Ibu-ibu telepon saja Wali Nanggroe.”

Wali Nanggroe yang dimaksud adalah Tgk. Hasan di Tiro yang saat itu memimpin perjuangan GAM dari luar negeri. Untuk sesaat mereka termangu. Kemudian tersadar, mana mungkin mereka menelepon Hasan Tiro untuk meminta izin agar ada perwakilan Inong Balee di DPIA. Akhirnya diputuskanlah, bahwa yang mewakili Inong Balee dalam pertemuan itu sifatnya individu saja. Sebagai kenang-kenangan sebelum berpisah, Tgk. Lah juga memberikan bros kepada para perempuan itu. Dengan demikian, upaya untuk menghadirkan semua unsur perempuan Aceh sudah dirasaka maksimal.

Saat DPIA I berlangsung, turut hadir Wali Kota Banda Aceh Zulkarnain, mantan Wagub Aceh Teuku Djohan, dan juga sejumlah LSM, di antaranya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK). Hadir pula sebagai narasumber, Dr. Chusnul Mar’iyah, pengacara

beken, Nursyahbani Katjasungkana—yang dikenal konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan—dan Debra Yatim. Panitia juga mengundang para ulama, yang kehadiran mereka diharapkan merepresentasikan dukungan tokoh agama terhadap pelaksanaan kongres.

Secara khusus, Nursyahbani mengatakan bahwa DPIA adalah ajang bagi perempuan Aceh untuk menyuarakan hati nurani dan kepentingannya sesuai perspektifnya sendiri. Dia mengungkapkan keprihatinannya kepada perempuan Aceh yang dulu dikenal mendapat kedudukan tinggi dalam kehidupan sosial dan politik, kini (tahun 2000) terus-menerus menjadi korban kekerasan dan menjadi bulan-bulanan keadaan.

Pada kesempatan lain, Naimah Hasan mengatakan bahwa nasib perempuan Aceh harus diubah oleh perempuan Aceh sendiri. Dia mengutip Al-Qur'an surah Ar-Raad ayat 11, di mana Allah berfirman, bahwa nasib suatu bangsa tidak akan berubah bila tidak diubah oleh bangsa itu sendiri. Seorang tokoh perempuan Aceh lain, Hj. Ha'dyah Sabi, berharap DPIA dapat melahirkan keputusan yang membawa keselamatan hidup bagi masyarakat Aceh, terkhusus perempuan, di dunia dan akhirat.

DPIA I secara resmi dihadiri 437 orang peserta. Tak hanya dari Aceh, para peserta juga berasal dari perantauan, seperti Medan, Surabaya, hingga Jogjakarta. Sebagai bentuk netralitas, panitia sengaja tidak mengundang unsur pemerintah. Bahkan, meskipun salah satu lokasi kegiatan bertempat di Anjong Mon Mata yang notabenenya satu kompleks dengan Meuligoe Gubernur Aceh, tetapi panitia tetap tidak mengundang gubernur.

Para peserta kemudian dibagi menjadi lima komisi yang meliputi Komisi A: Posisi Perempuan dalam Syariat Islam dan Hukum Adat; Komisi B: Keikutsertaan Perempuan dalam Proses Politik; Komisi C: Keikutsertaan Perempuan dalam Kehidupan Ekonomi Aceh dan Akses Perempuan ke Sumber-Sumber Ekonomi Lokal; Komisi D: Perempuan dan Perubahan Sosial di Aceh; dan Komisi E: Keikutsertaan Perempuan Aceh dalam Mewujudkan Perdamaian. Sidang-sidang komisi dilaksanakan di dua tempat berbeda, yaitu Gedung Cut Nyak Dhien (BKOW) dan Anjong Mon Mata.

Sejak awal, Suraiya Kamaruzzaman mengarahkan agar DPIA dapat melahirkan sebuah *statement* politik. Dengan demikian, aspirasi para perempuan dalam forum akbar tersebut dapat diangkat ke kancah internasional. Pernyataan politik mencerminkan pemikiran serta aspirasi yang jelas, terukur, dan telah mempertimbangkan berbagai aspek. Bila DPIA I menghasilkan pernyataan politik yang dapat dipandang sebagai suara bulat perempuan Aceh, maka rencana tindak lanjut sidang akan dapat ditentukan dan diukur.

Dalam sidang di Anjong Mon Mata, terangkum beberapa pertanyaan dan usulan peserta. Pertanyaan utama yang mencuat adalah, “Apakah yang diharapkan akan dihasilkan oleh DPIA I?” Kemudian, mencuat pula pernyataan akan keraguan peserta DPIA terkait penerimaan usulan tersebut oleh “orang Jakarta” kelak, mengingat posisi dan situasi Aceh saat itu. Lalu hadir pula usulan tentang alih-alih mengadakan DPIA, mengapa tidak dipilih saja beberapa tokoh perempuan yang punya “nama” di Aceh untuk “mendemokan” masalah Aceh ke Jakarta. Kemudian, ada pula peserta yang mengatakan bahwa materi yang disampaikan dalam DPIA “terlalu teoretis”

dan sulit diaplikasikan di lapangan. Bahkan ada peserta lainnya yang dengan lantang menyuarakan, “Beri kesempatan pada kami untuk menentukan nasib bangsa kami sendiri!”

Narasumber dari FISIP UI, Dr. Chusnul Mar’iyah, menyatakan bahwa referendum adalah hal yang biasa dalam bernegara. Sebagai contoh, untuk memutuskan apakah akan melepaskan diri dari Persemakmuran Inggris (*Commonwealth of England*) atau tidak, Australia sudah sering melakukan referendum. Dalam kajian politik, hal ini tentunya sah. Namun, pernyataan Chusnul Mar’iyah ini sempat membuat tegang sebagian peserta yang berpikir bahwa Chusnul mengarahkan rekomendasi akhir DPIA pada referendum. Padahal sebagai ahli, Chusnul hanya meluruskan makna dan fungsi dari referendum itu sendiri.

Ketegangan semakin terasa mengingat kondisi fisik ruang sidang yang sangat khas. Beberapa sisi ruangan terdapat jendela-jendela kaca yang lambung hingga mencapai langit-langit. Di luar ruangan itu dikerumuni massa pendukung referendum. Seiring berjalannya sidang, sebagian peserta yang duduk di dalam ruangan merasa semakin tidak nyaman. Sebab bila mereka menoleh ke belakang, para “penonton” di luar sontak menggaungkan kata “referendum”, seraya membuat gerakan tangan untuk menegaskan agar sidang merekomendasikan hal itu.

Azriana Manalu mengatakan bahwa saat itu dia memilih untuk duduk tak berkutik di kursinya. Tekanan massa yang menonton berjalannya sidang saat itu terasa sangat berat baginya. Sehingga Nana, panggilan akrabnya, enggan untuk menoleh ke belakang.¹²

¹² Wawancara Focus Group Discussion (FGD) II, Hotel Seventeen Seutui, 7 Juli 2024

PERSIAPAN
DRAFT..

PERTEMUAN DPIA
BERLANGSUNG INTENS..



TAK TIK!

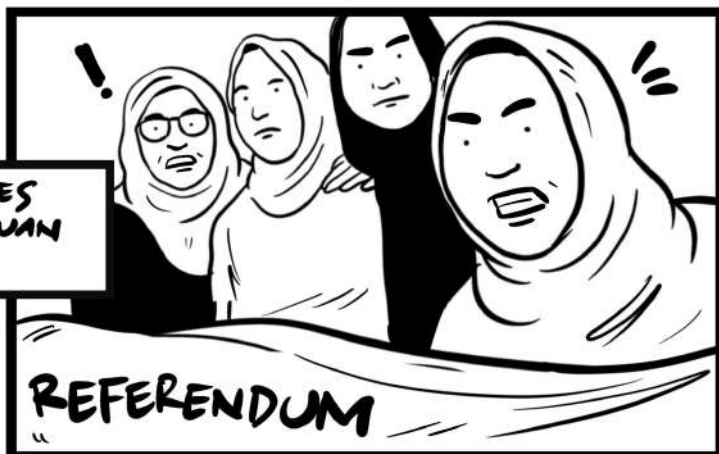


AGENDA
"TITIPAN"
YA?

BERBAGAI PRASANGKA
KEPADA PANITIA DPIA
...

KAMI
INGIN
BICARA!

BERBAGAI PROTES
SELAMA PERTEMUAN



REFERENDUM



KAMI
WALKOUT!

.. CERITA PENGALAMAN
KEKERASAN YANG
DIALAMI KORBAN
KONFLIK

Ketika di Banda Aceh, para aktivis perempuan pejuang damai bergelut dengan stigma dan ketegangan, di Jakarta, anggota DPR/MPR RI, Ir. Abdullah Puteh sebagai Ketua Presidium Angkatan Muda Iskandar Muda (AMIM) Jakarta, menyatakan bahwa DPIA dapat menjadi jembatan emas dalam upaya penyelesaian konflik Aceh secara damai dan adil.

Sementara itu, Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengelola Peningkatan Peran Wanita (TP P2W) se-Aceh, telah merekomendasikan tugas TP P2W menurut landasan Islam. Di antaranya, peningkatan atau pemberdayaan intelegensi perempuan, memberi kesempatan pada perempuan untuk lebih berperan dalam pembangunan sesuai kapasitasnya, meningkatkan kinerja perempuan, dan meningkatkan peran perempuan dalam pelestarian serta pengendalian dampak lingkungan hidup, juga penghapusan tindak kekerasan dalam usaha perlindungan perempuan.

Rakor tersebut menghadirkan tiga pembicara, yaitu T. Alamsyah Husen (Ka Bapedal Regional I Sumatera), Nursyahbani Katjasungkana (Direktur LBH APIK Jakarta), dan Dr. Yusny Saby, MA (dosen UIN Ar Raniry).

Hari Kedua, 21 Februari 2000

Pertemuan hari kedua diwarnai isak tangis mengiringi kesaksian derita perempuan korban konflik Aceh. Saat itu hadir para korban yang memenuhi undangan DPIA. Pengalaman kekerasan yang dipaparkan korban secara jujur dan apa adanya membangkitkan bulu kuduk peserta sidang. Tidak semua peserta DPIA pernah bersentuhan langsung dengan kondisi nyata korban konflik. Alhasil, segmen kesaksian para perempuan korban kekerasan konflik bersenjata tersebut benar-benar menjadi penggugah kesadaran, betapa getirnya kondisi perempuan Aceh saat itu.

Ketua LSM Yayasan Srikandi Aceh, Cut Nur Asyikin, menyampaikan tentang Referendum Aceh pada 8 November 1999 di Masjid Raya. Dia mengklaim bahwa referendum itu dihadiri sekitar 2 juta rakyat Aceh. Jumlah tersebut merujuk pada hasil Kongres Mahasiswa dan Pemuda Aceh Serantau (KOMPAS), Januari 2000, yang dihadiri 106 organisasi mahasiswa pemuda, taliban, pelajar, *buffer* aksi, dan LSM dari dalam dan luar negeri. Terdapat 16 delegasi memilih merdeka, 2 delegasi abstain, dan 84 delegasi menuntut referendum. Kesimpulan Cut Nur Asyikin, referendum adalah keinginan sebagian besar rakyat Aceh.

Kenyataan bahwa referendum tidak dibahas dalam sidang DPIA menyebabkan sebagian pihak berang. Mereka menyatakan DPIA sebenarnya, tak lain tak bukan, adalah taktik Pemerintah RI untuk menyampaikan agenda-agendanya, terkait posisi Aceh di NKRI.

Suraiya Kamaruzzaman membantah tegas tuduhan bahwa DPIA sarat dengan pesan sponsor dari Pemerintah RI. Dia juga menyanggah tuduhan bahwa panitia DPIA menerima dana sebesar Rp4,5 miliar dari USAID. Suraiya mengiyakan bahwa DPIA memang menerima bantuan, dari siapa saja, asalkan tidak mengikat. Tetapi donatur (dalam hal ini OTI-USAID) hanya memberikan bantuan berupa barang, yaitu konsumsi, ATK, dan sebagainya. Tidak dalam bentuk uang sepeser pun.

Meski sudah dijelaskan demikian, berbagai protes tetap muncul. Suraiya menilai kondisi tersebut sebagai cerminan bahwa, “Kita belum dewasa dalam berdemokrasi.” Agaknya, kata-kata Suraiya ini masih bisa digunakan untuk menilai masyarakat kita sampai saat ini. Sebab, kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat ternyata masih lebih kerap “tubruk tembok” daripada mendapatkan apresiasi yang layak.

Hari Ketiga, 22 Februari 2000

Pada 21 Februari 2000, media *Serambi Indonesia* menurunkan berita dengan judul “DPIA hari pertama: persidangan dilaporkan panas”. Namun, hari terakhir merupakan titik kulminasinya.

Sidang Paripurna berlangsung cukup tegang. Nurmasyithah Ali, orator ulung yang tergabung dalam Komisi D, tetap mempertahankan pendapatnya bahwa referendum merupakan opsi pilihan rakyat Aceh. Sementara peserta lain bertahan pada agenda sidang yang telah disepakati, yang tidak menjadikan referendum sebagai agenda pembahasan.

Menurut Naimah Hasan, selaku Ketua Sidang, sebagian besar peserta terpancing emosi saat pembahasan agenda. Suara para peserta mulai naik, giliran bicara terabaikan karena semua peserta secara bersamaan ingin mengemukakan pendapat. Suasana menggelincir ke arah *chaos*.

Samsidar, yang diberi tanggung jawab untuk menjaga agar sidang tetap kondusif, mencoba mengambil langkah baru. Dia dan Chamsiah Jamal mengusulkan agar diadakan voting, dengan tiga opsi. Opsi pertama adalah referendum.

“Siapa yang setuju referendum, sila tunjuk jari,” ujar Samsidar dan Chamsiah Jamal bergantian.

Opsi lainnya adalah dialog damai, dan yang terakhir adalah merdeka. Naimah Hasan berdiri dan menyerukan hal yang sama dari meja pimpinan sidang. Tiga kali hal tersebut diserukannya.

Saat itulah kekacauan terjadi. Tensi antara peserta yang berbeda pendapat mencapai titik kulminasi. Kursi-kursi di ruang sidang bahkan turut jadi korban, bergelimpangan ditendang para peserta yang emosi. Ujung-ujungnya, Cut Nur Asyikin dan Nurmasyithah Ali melakukan *walk out*, diikuti belasan peserta lainnya.

Hal ini telah diperingatkan oleh Chusnul Mar'iyah, pada kesempatan konsultasi awal 26 Desember 1999. Chusnul mengatakan bahwa dalam situasi panas (*deadlock*) melakukan *walk out* (tindakan meninggalkan suatu tempat sebagai bentuk ketidaksetujuan) adalah opsi paling akhir, yang sebaiknya tidak diambil. Betapa pun alotnya diskusi, bertahan dalam ruangan diskusi tetap merupakan opsi terbaik.

Melihat panasnya situasi, Naimah Hasan sigap menyambar mikrofon, dan mulai melantunkan selawat Nabi. Mendengar selawat, emosi peserta melunak. Ruang sidang kembali relatif tenang. Pembahasan dilanjutkan tanpa dihadiri kelompok pro-referendum.

Di luar ruang sidang, Tim SC dan OC berkali-kali menemukan media massa yang alih-alih memberitakan substansi dari isu yang diangkat dalam sidang komisi DPIA, malah menurunkan artikel sensasional tentang perilaku segelintir peserta DPIA. Media melakukan *framing* dengan menerbitkan berita tentang peserta DPIA yang disebut tidak mengenakan jilbab atau merokok selama sidang.

Meski telah memasuki abad 21, kenyataan pemberitaan terkait DPIA membuktikan bahwa tubuh perempuan masih tetap menjadi medan perang. Mirisnya, perempuan tetap dijadikan komoditas untuk mencapai tujuan oleh pihak-pihak berkepentingan.

Sebelum pembukaan DPIA, Geumala Yatim selaku penanggung jawab bagian keamanan telah menemui aparat berwenang (TNI) untuk menegosiasikan jam akhir sidang. Didapati kesepakatan bahwa sidang boleh berlangsung hingga pukul 21.00 malam. Walau sudah mengantongi izin, tetapi panitia DPIA tetap waspada. Sebab MoU dengan TNI memuat poin, “Pelanggaran terhadap jam malam akan ditindak dengan tembak di tempat”. Apalagi, saat itu situasinya memang sedang dalam masa Operasi Sadar Rencong II yang diberlakukan sejak Januari 2000.

Karenanya, pada setiap akhir acara, Geumala Yatim membawa lampu senter untuk mengecek semua ruangan, menjaga agar tak ada peserta yang masih tertinggal ketika jam malam tiba. Dia bahkan menyorotkan senter ke kolong-kolong kursi dan ke balik tirai, khawatir ada peserta yang tertidur di sana.

Hari terakhir DPIA, ternyata pembahasan rekomendasi berlangsung hingga melewati jam malam. Pengalaman tidak menyenangkan sebelumnya terhadap draf agenda sidang yang diubah tiba-tiba oleh relawan, menjadikan lembar rekomendasi ditik langsung oleh Samsidar. Pembahasan dilakukan pasal demi pasal, dan akhirnya menghasilkan 22 butir rekomendasi. Rekomendasi inilah yang kemudian diserahkan kepada Presiden Abdurrahman Wahid di Jakarta pada 11 Maret 2000. Naimah termasuk salah satu perwakilan yang mengantarkan langsung rekomendasi tersebut kepada Presiden RI.[]

Konklusi
Suara Perempuan Aceh

Rekomendasi Duek Pakat Inong Aceh I

BANDA ACEH, 20 - 22 FEBRUARI 2000

POSISI PEREMPUAN DITINJAU DARI SYARIAT ISLAM DAN HUKUM ADAT

1. Perlu lahirnya generasi Rabi Radhia yang muncul dari rumah tangga Mawaddah Sakinah dan Rahmah.
 - » Meningkatkan kegiatan penyuluhan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, mulai dari wilayah TK I sampai ke pedesaan yang bekerja sama dengan instansi terkait
 - » Kurikulum yang diterapkan khusus untuk taman kanak-kanak (TK) diutamakan pada pendidikan agama, mulai dari menghafal doa-doa, ayat-ayat pendek dan memperkenalkan lagu-lagu islami, serta ditambah bahasa asing (Arab dan Inggris)
 - » Kurikulum untuk Sekolah Dasar (SD) sampai dengan SLTA/ sederajat serta Perguruan Tinggi (PT) mengutamakan pendalaman pelajaran Agama dalam bidang hokum-hukum Islam (Aqidah, ibadah, dan lain-lain) dan jumlah jam pelajaran agama diperbanyak
 - » Membuat kurikulum khusus tentang pendidikan akhlak sesuai Syariat Islam mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi dan pada setiap pengajian non formal dan TPA
 - » Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana pesantren tradisional, guna meningkatkan mutu pendidikan pada pesantren-pesantren tradisional yang selama ini banyak kekurangannya
 - » Mengupayakan busana muslim dan muslimah sesuai Syariat Islam yang mengacu kepada surat An-Nur ayat

31 dan Al Ahzab 59

- » Mengupayakan dan menghimbau kepada seluruh masyarakat yang berdomisili di daerah Istimewa Aceh untuk mengikuti adat istiadat Aceh
- 2. Diperlukan ketentuan tugas-tugas perempuan baik di dalam rumah tangga dan masyarakat mitra seajar.
 - » Merumuskan ketentuan-ketentuan dan dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab perempuan, hak dan kewajiban perempuan dalam kemitraan seajar sesuai Syariat Islam
- 3. Pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga (hak dan kewajiban) hendaknya dijadikan pelopor kerja oleh organisasi kemasyarakatan, kelompok-kelompok perempuan.
 - » Perlu lahirnya generasi Rabi Radhia yang muncul dari rumah tangga Mawaddah Sakinah dan Warrahmah
 - » Meningkatkan kemampuan perempuan untuk menjalankan hak & kewajibannya dalam mensejahterakan rumah sebagai ibu, untuk melahirkan generasi penerus yang mendapat julukan Rabi Radhia yang penuh Sakinah Mawwadah dan Warrahmah
 - » Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan perempuan untuk kesejahteraan keluarga dengan cara mengadakan pelatihan khusus untuk perempuan tentang penataan dan pengelolaan rumah tangga
 - » Mengadakan pelatihan kemitraan seajaran sesuai dengan adat-istiadat Aceh dan Syariat Islam
 - » Mengingat jumlah perempuan lebih banyak dari kaum laki-laki agar dapat lebih ditingkatkan jumlah perempuan dalam setiap lembaga yang ada baik

sebagai pemerintah maupun swasta

- » Mengupayakan terus untuk menempatkan kaum perempuan pada bidang-bidang untuk pelayanan perempuan seperti rumah sakit dan lain-lain
- » Melatih dan meningkatkan kemauan perempuan untuk lebih berani mengeluarkan pendapat yang berguna disegala bidang melalui pelatihan mulai dari tingkat pedesaan sampai di tingkat propinsi
- » Melalui para ulama perlu memberi pengertian kepada kaum laki-laki, suami tentang hak dan kewajiban laki-laki dengan perempuan adalah sama dengan kaum perempuan

4. Masalah HAM tidak hanya terjadi di dalam konflik tetapi juga di dalam rumah tangga dan perlu di cari upaya pemecahannya

- » Mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam rumah tangga yang terjadi antara suami dengan istri dan antara orang tua dengan anak serta sesama perempuan
- » Melalui lembaga adat menyelesaikan konflik dalam rumah tangga (HAM) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam dan hokum adat yang berlaku
- » Segera membentuk KPP HAM untuk Aceh dan diupayakan anggotanya 50% kaum perempuan guna menyelesaikan konflik yang samapi saat ini belum terselesaikan di Aceh
- » Mengirim utusan perempuan (inong Aceh) untuk ikut serta mewujudkan perdamaian, keamanan, keadilan dan kemakmuran baik ke tingkat pusat

- » Menempatkan hakim-hakim perempuan Aceh untuk daerah Istimewa Aceh, disemua tingkat peradilan baik peradilan agama maupun pengadilan umum
- 5. Adalanya lembaga efektif yang mampu mengontrol masalah keluarga
 - » Perlu segera membentuk sebuah lembaga perempuan yang Islami (Qanun Ureung Aceh) untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dan masyarakat Aceh di tingkat I sampai ketinggian pedesaan

KEIKUTSERTAAN PEREMPUAN DALAM PROSES KEHIDUPAN POLITIK

1. Mengingat dan memperhatikan prosentase jumlah penduduk, DPIA mengharapakan ke pada semua pihak, agar memberi porsi yang lebih besar, minimal 30% ke pada Inong-inong Aceh dalam penentuan pengambilan kebijakan/keputusan
2. Motivasi ureung inong Aceh supaya mengubah norma-norma kaku yang selama ini mentradisi dengan cara memperluas wawasan antara lain: dalam bidang politik
3. Memberikan rasa aman dan damai ke pada seluruh warga masyarakat Aceh dengan berusaha memohon diri dan mengadakan gencatan senjata supaya pihak-pihak tertentu dalam hal ini, provokator tidak memanfaatkan situasi dengan menangguk di air keruh.
4. Mendesak pemerintah pusat untuk segera mengadili pelanggaran HAM di Aceh baik semasa DOM maupun pasca DOM sehingga terciptanya Aceh yang Adil dan

damai

5. Mendesak pemerintah daerah untuk mengadakan dialog dengan semua komponen masyarakat termasuk inong Aceh
6. Mendesak pemerintah pusat, MPR, DPR RI untuk segera bersidang khusus untuk membicarakan penyelesaian kasus Aceh secara tuntas
7. Mendukung terlaksananya referendum sebagai solusi terbaik dalam penyelesaian konflik Aceh secara damai
8. Mendesak Komnas HAM agar segera membentuk KPP HAM di Aceh dalam rangka mengusut dan mengajukan ke pengadilan baik masa DOM maupun pasca DOM.

KEIKUTSERTAAN PEREMPUAN DALAM KEHIDUPAN EKONOMI ACEH DAN AKSES PEREMPUAN KE SUMBER-SUMBER EKONOMI LOKAL

1. Upah
 - » Tidak ada diskriminasi upah antara perempuan dan laki-laki
 - » UMR untuk perempuan harus sesuai dengan UMR standar
2. Perempuan pekerja migrant
 - » Pengiriman perempuan pekerja migrant harus dengan syarat-syarat yang ketat
 - » Pembekalan ketrampilan, akhlak dan agama bagi calon perempuan pekerja migrant

- » Peningkatan perlindungan bagi perempuan pekerja migrant
- 3. Tingkat Pemberantasan KKN
- 4. Perimbangan keuangan antara daerah dan pusat
 - » Hasil laut, 85% untuk Aceh, 15% untuk pusat
 - » Hasil hutan, 80% untuk Aceh, 20% untuk pusat
 - » Hasil pertambangan 75% untuk Aceh, 25% untuk pusat
 - » Khusus hasil LNG, kami menuntut agar 100% diberikan untuk Aceh, karena sisa waktu proyek hanya 5 tahun
 - » Menuntut agar perimbangan ini segera dilaksanakan, mulai april 2000
- 5. Pembangunan di Aceh tidak menggunakan hutang luar negeri

PEREMPUAN DAN PERUBAHAN SOSIAL

1. Memberikan ruang gerak yang luas bagi perempuan Aceh ke arah kemajuan tanpa mendiskreditkan perempuan
2. Meminta pemerintah untuk segera merehabilitasi sarana pendidikan yang telah hancur selama ini, demi untuk mencerdaskan generasi Aceh di masa yang akan datang
3. Difungsikan kembali maunasah-maunasah Aceh sebagai tempat beribadah dan Duek Pakat
4. Adanya hak yang sama untuk perempuan di dalam lembaga adat
5. Mengikut sertakan perempuan dalam perencanaan pembangunan khususnya dalam masalah pelestarian alam dan lingkungan

6. Pemerintah harus menerapkan kembali cuti haid pada pekerja perempuan
7. Adanya perubahan yang menguntungkan perempuan dalam hukum waris adat
8. Membentuk lembaga-lembaga kajian dalam rangka pemberdayaan perempuan
9. Memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan hak reproduksinya
10. Meminta pemerintah dan semua pihak bertanggung jawab melakukan rehabilitasi untuk pekerja seks
11. Adanya tempat bagi ibu-ibu pekerja
12. Adanya bantuan sosial dan pemberdayaan bagi perempuan lansia dan tidak mampu
13. Memberikan kesempatan yang sama di bidang pendidikan, kesehatan serta jaminan sosial untuk anak yatim dan anak jalanan
14. Menegakkan supremasi hukum dan melakukan usaha-usaha pencegahan terhadap masalah narkoba
15. Perempuan yang tidak mampu berpotensi agar dibekali dengan pelatihan ketrampilan dan penyediaan modal usaha
16. Meminta pemerintah untuk menindak tegas pengedar dan pemakai narkoba

KEIKUTSERTAAN PEREMPUAN ACEH DALAM MEWUJUDKAN PERDAMAIAN

1. Tarik semua aparat non-organik dari Aceh

2. Mengadakan pendekatan ke pada pihak-pihak yang bertikai agar menghentikan kekerasan
3. Tindak tegas pelanggar HAM di Aceh
4. Kembalikan harkat dan martabat rakyat Aceh
5. Selesaikan semua masalah berdasarkan Syariat Islam
6. Perdamaian tercipta dengan adanya keadilan
7. Hilangkan rasa dendam dari semua pihak
8. Perdamaian dapat dicipta dengan mengikut sertakan hukum adat
9. Perdamaian dapat dilakukan dari diri pribadi
10. Kembalikan hasil kekayaan rakyat Aceh
11. Dengarkan dan pertimbangkan aspirasi rakyat Aceh
12. Lakukan aksi-aksi non kekerasan secara berkesinambungan
13. Menuntut kepada pemerintah agar memberikan kompensasi dan rehabilitasi ke pada korban kekerasan
14. Mengikutsertakan perempuan didalam setiap pembahasan dan solusi untuk terciptanya perdamaian

Jika diringkas, maka hasil dari DPIA I pada 20-22 Februari 2000 berupa rancangan masa depan perempuan dan masyarakat Aceh yang terletak pada pelaksanaan Syariah Islam secara konsekuen, memberi tempat bagi keikutsertaan perempuan mewujudkan perubahan sosial dalam suasana damai, mengikutkan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, dan memberi akses kepada sumber-sumber ekonomi lokal, serta pemberian 30 persen suara bagi perempuan dalam setiap penentuan pengambilan kebijakan dan keputusan.

Mengingat pentingnya rekomendasi yang telah terbentuk pada pelaksanaan Duek Pakat Inong Aceh perdana tersebut,

kehadiran wadah kumpul untuk mengawal pelaksanaan bulir-bulir pikir para perempuan Aceh lintas sektor tersebut dirasa perlu. Oleh karenanya, dibentuklah Balai Syura Ureung Inong Aceh. BSUIA menjadi saksi nyata bagaimana perempuan Aceh mampu berkumpul, berpikir, dan bekerja sama hingga berhasil menghadirkan damai di Aceh.

Selayang Pandang
Makna Damai &
Kenangan Perjuangan

Penafian (*disclaimer*)

Para perempuan yang termaktub dalam selayang pandang ini hanyalah segelintir orang dari banyaknya perempuan Aceh lainnya—para penyongsong perdamaian Aceh—yang mampu penulis jangkau dan temui dalam waktu yang sangat terbatas. Mereka dipilih berdasarkan pengalaman keterlibatannya di DPIA dan Balai Syura.



“Duek Pakat Inong Aceh bukan hal kecil. Ini sebuah pekerjaan besar untuk mendudukkan semua perempuan Aceh, baik di Aceh maupun di perantauan, untuk berkontribusi dalam penyelesaian konflik dan terciptanya damai.”

NAIMAH HASAN

Damai menurut saya adalah perasaan aman dan tenteram bagi rakyat. Ketika masyarakat dapat merasakan kenyamanan hidup, tenang secara fisik maupun emosional. Mereka dapat bepergian mencari nafkah secara bebas dan tenang; siang maupun malam.

Damai adalah bagaimana rakyat dapat melaksanakan tugas kewajiban kehidupan, beribadah dengan tenang, dan mencari rezeki dengan aman di mana pun tempatnya. Kondisi aman diharapkan dapat menciptakan kehidupan yang sehat dan harmonis, dapat bergaul dengan siapa saja tanpa perasaan curiga. Sebuah kondisi ketika anak-anak dapat bermain bercengkerama sesama mereka dan dapat sekolah dengan aman tanpa ada gangguan.

Oleh karenanya, untuk meneruskan estafet perdamaian Aceh ini, saya rasa penting bagi perempuan Aceh diperkenalkan pada idealisme Balai Syura, yaitu kesadaran untuk merancang dan mempertahankan kehidupan masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian, untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan rekomendasi DPIA yang dilaksanakan secara periodik, lima tahun sekali. Sebuah mekanisme evaluasi untuk melanjutkan program membuat yang dapat membuat masa depan masyarakat Aceh menjadi lebih baik. Oleh karenanya, dalam proses ini, mempersiapkan kader ke depan sangatlah penting. Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA) harus tetap berkelanjutan.

Saat mengenang prosesi Pelaksanaan Duek Pakat Inong Aceh (DPIA), saya sadari bahwa hal tersebut bukanlah pekerjaan kecil, melainkan sebuah pekerjaan besar. Kita ingin mengajak seluruh perempuan Aceh untuk berkumpul dan duduk bersama, baik yang ada di Aceh maupun di perantauan, untuk berkontribusi pikiran dan tenaga untuk menghadirkan rasa aman dan damai untuk masyarakat Aceh, terutama para perempuan dan anak di masa konflik.

Di tengah tegangnya suasana Aceh saat itu, panitia DPIA berusaha agar semua peserta bisa hadir ke Banda Aceh, padahal situasi sebenarnya sulit bagi peserta untuk hadir. Kenyataannya, para perantau Aceh dari Jakarta, Bandung, dan kota lainnya tiba dengan selamat di Aceh. Demikian juga para perempuan daerah yang berasal dari kabupaten/kota di Provinsi Aceh—di tengah gemuruh perang—juga berhasil menghadiri DPIA. Hanya Aceh Singkil yang saat itu tidak dapat mengirimkan peserta.

DPIA I pada tahun 2000 dilaksanakan pada saat intensitas konflik sangat tinggi. Terdapat hasil riset yang menyatakan bahwa setiap harinya rata-rata ada tiga orang Aceh yang terbunuh akibat konflik bersenjata. Bisa dibayangkan betapa konflik dan kontak senjata terjadi secara meluas. Belum lagi mereka yang diambil dari rumahnya, ada yang ditembak di tempat disaksikan oleh istri-anaknya, ada yang diculik dan tidak pernah kembali.

Saat itulah para perempuan Aceh berkumpul membicarakan apa yang mungkin dilakukan agar Aceh keluar dari kondisi konflik, menuju damai. Perempuan Aceh tidak boleh diam saja, perempuan Aceh harus melakukan sesuatu untuk menyelesaikan konflik.

Berkaitan dengan situasi keamanan yang tidak kondusif, saya selaku Ketua OC saat itu berusaha memikirkan cara terbaik demi menjamin keamanan diri. Sehingga dapat agak leluasa bergerak untuk menjalankan tugas-tugas menjelang DPIA. Akhirnya, saya dan Suraiya (selaku Ketua SC) memutuskan untuk menghadirkan tim pengamanan, semacam bodyguards. Tim pengamanan ini bukan aparat, melainkan masyarakat sipil yang paham bela diri. Ini disebut keamanan tertutup. Tim ini ikut ke mana pun saya pergi, memantau dari jauh.

Saat itu cukup banyak upaya yang dilakukan pihak tertentu untuk menggagalkan DPIA. Tentu hal ini menimbulkan kesulitan yang berarti bagi kami. Ada juga intervensi terhadap agenda Duek Pakat yang sebenarnya sudah diputuskan sejak awal. Tujuan DPIA I adalah memformulasikan posisi, kebutuhan, dan nilai-nilai yang dianut perempuan Aceh dalam

merumuskan masa depan Aceh yang damai, setara dan adil, dengan mengikutsertakan seluruh pihak yang berkepentingan. Selain itu juga memantapkan peran perempuan sebagai pemegang andil besar masa depan Aceh.

Agenda DPIA yang menolak membahas hal-hal yang dapat memicu konflik seperti referendum dan merdeka, mengakibatkan beberapa orang yang berseberangan pendapat mendatangi saya. Saya pernah mendapat ancaman yang berbunyi, “Darahnya telah halal untuk dimasukkan ke dalam karung dan ditanam di tanah, Naimah dan tujuh keturunannya akan dihabisi, rumahnya akan dibom.”

Walau berbagai halangan dan rintangan dirasakan oleh para perempuan Aceh demi menyongsong damai, pada akhirnya 22 butir Rekomendasi DPIA I mencakup usulan pembagian hasil bumi Aceh dengan pusat—di mana selama itu Aceh tidak mendapatkan bagian yang adil—berhasil diterbitkan. DPIA I mengusulkan angka persentase yang dianggap adil.

Salah satu butir usulan lainnya adalah terkait pembangunan Aceh yang tidak boleh menggunakan utang luar negeri. Aceh harus dibangun dengan memanfaatkan dana yang didapat dari hasil bumi Aceh sendiri. Rekomendasi ini langsung diserahkan kepada Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid.

Balai Syura yang dibentuk saat itu berfungsi sebagai mandat DPIA I dalam melakukan pengawalan terhadap rekomendasi yang telah dihasilkan, membawahi Komite Perdamaian, Komite Pemberdayaan Ekonomi, dan Majelis Qanun.

Mini Profil Naimah Hasan

Sejak pra-DPIA I, Naimah Hasan sudah menjadi sosok penggerak yang aktif terlibat dalam setiap usaha menuju damai Aceh. Sebagai Ketua BKOW Aceh, dia mengusung ide mendudukkan perempuan Aceh dari semua unsur, untuk ikut berembuk memikirkan bagaimana Aceh dapat keluar dari konflik berkepanjangan.

Usaha melibatkan berbagai pihak dalam Duek Pakat ini mengantarkan Naimah Hasan menemui Panglima GAM Abdullah Syafii, agar pasukan Inong Balee mengirimkan wakilnya saat berlangsungnya DPIA I.

Pasca-DPIA I, Naimah Hasan tergabung sebagai Presidium BSUIA dalam dua periode, yaitu periode 2000—2005 dan periode 2005—2010. Namun hingga kini, dia masih tetap terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan Balai Syura, termasuk mempersiapkan DPIA V yang akan dilaksanakan pada Oktober 2024 ini.



“ Melalui DPIA, perempuan akan berkumpul bersama-sama. Sehingga posisi tawar perempuan semakin besar. Kelak apapun yang diperjuangkan dan diadvokasi akan semakin mudah. ”

KHAIRANI

Damai itu ketika kita bisa hidup aman, bebas dari kekerasan, memiliki kesempatan yang sama dalam proses pengambilan keputusan, dan bisa mengeluarkan pendapat tanpa paksaan, tanpa kekerasan, tanpa intervensi.

Kala perempuan datang berkomitmen untuk membuat perubahan, untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, itulah kekhasan Duek Pakat Inong Aceh (DPIA) yang tidak terlupakan. Setiap digelarnya DPIA, perempuan dari berbagai profesi, berbagai daerah, dengan berbagai masalah, dengan berbagai potensi berkumpul, dengan serius mengeluarkan pendapat, berdebat, dan berembuk dengan sangat luar biasa. DPIA menjadi wadah penting bagi perempuan untuk bisa bersama-sama menyuarakan kepentingan-kepentingan mereka. Itulah hal yang selalu membekas.

Sebagai aktivis perempuan, tentu kita berhadapan dengan banyak sekali persoalan dan tantangan. Tidak semua isu yang kita perjuangkan akan mendapatkan dukungan, semisal isu gender dan kesetaraan. Masih banyak orang yang menggunakan patron berpikir ala-ala patriarki dan interpretasi agama menurut keyakinannya sendiri.

Sehingga tak jarang aktivis perempuan dianggap sekuler. Yang berakhir pada pendapatnya disalahtafsirkan, bahkan diabaikan. Akan tetapi, seiring waktu kita berjuang, merangkul banyak pihak, dan berusaha untuk tidak mengonfrontasi perbedaan-perbedaan, berusaha untuk benar-benar mendengarkan, maka semua rintangan dan halangan itu dapat kita lewati.

Melalui DPIA, kita akan ikut serta bersama perempuan-perempuan lainnya untuk mengadvokasi pemenuhan hak-hak dasar perempuan. Sehingga perempuan terlibat secara bermakna dalam setiap proses pengambilan keputusan. Para perempuan yang hadir mengikuti DPIA berkontribusi besar untuk kesejahteraan perempuan di Aceh. Selain itu, kehadiran Balai Syura sebagai lembaga yang mewadahi proses advokasi kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan, lebih memaksimalkan partisipasi perempuan, agar lebih bermakna dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Mini Profil Khairani Arifin

Khairani Arifin berperan di DPIA I sebagai panitia bidang acara, akan tetapi dua hari menjelang pergalaran Duek Pakat Inong Aceh tersebut, dia terpaksa absen karena melahirkan. Adapun pada DPIA II, dia berperan sebagai bagian anggota organizing committee (OC). Untuk DPIA III dan IV, dia terlibat aktif sebagai steering committee (SC) di bagian penyelenggaraan acara. Tugasnya sebagai bagian dari DPIA dalam hal merancang, memberi masukan, dan menyelenggarakan acara sesuai agenda yang telah disusun.



Damai adalah ketika perempuan dapat menjalankan kehidupannya dan memenuhi hak-hak dasarnya secara kondusif, tidak ada lagi kejadian, situasi, regulasi, tindakan yang membuat perempuan tidak nyaman atau mengalami berbagai tindakan kekerasan, diskriminasi, dan diabaikan atas alasan apa pun dan di mana pun. Baik dalam kehidupan pribadi, sosial dan bernegara, di rumahnya, di komunitas, di tempat kerja dan di ruang-ruang publik.

Keberhasilan digelarnya DPIA I adalah hasil pertama kalinya terjadi "keterpaduan konsep-kerja bersama" antara aktivis perempuan NGO Aceh dengan organisasi perempuan yang berafiliasi dengan pemerintah, ormas, juga mahasiswa. Semua ini terjadi dalam situasi konflik bersenjata, saat independen digugat, dipertanyakan, dan rasa curiga tumbuh subur. Pelabelan terhadap berbagai pihak termasuk etnik

serta tekanan dari berbagai pihak juga menambah pelik situasi. Namun, DPIA I tetap berhasil digelar, dan sukses menghasilkan 22 butir rekomendasi.

Fakta paling berkesan dalam proses perdamaian Aceh bagi saya adalah ketika bertemu dan menangani korban konflik, khususnya korban kekerasan seksual, padahal mereka bukan para pihak yang berkonflik. Juga ketika berdialog dengan petinggi GAM di tempat terpencil. Kami menyampaikan harapan agar pekerja kemanusiaan yang membantu anak-anak, perempuan, dan masyarakat bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dan tidak mendapat ancaman maupun kekerasan. Kami juga menyampaikan bahwa kami ingin situasi damai.

Harapan saya, semua korban konflik terutama korban kekerasan seksual memperoleh haknya. Kemudian pemerintah menjadikan pengalaman perempuan dalam proses perdamaian sebagai pelajaran penting, termasuk kebijakan yang digagas oleh komunitas dan kelompok perempuan. Selain itu, kita perlu mengakui inisiatif dan kerja-kerja perempuan dalam perdamaian, memastikan empat agenda-pilar WPS-1325 dapat dijalankan dengan serius, dan dievaluasi pencapaiannya. Perdamaian berkelanjutan dan proses perdamaian yang sesungguhnya di tataran komunitas dapat terus diupayakan secara substantif, bukan sekadar perdamaian seremonial, simbolik, dan hanya di tataran elite.

Penting untuk dihadirkan tempat-tempat “monument of a memory”, museum, dan pusat pembelajaran tentang “peristiwa masa lalu dan perdamaian” yang didesain berdasarkan suara, kebutuhan, dan partisipasi bermakna dari korban, juga keluarga korban, terutama perempuan.

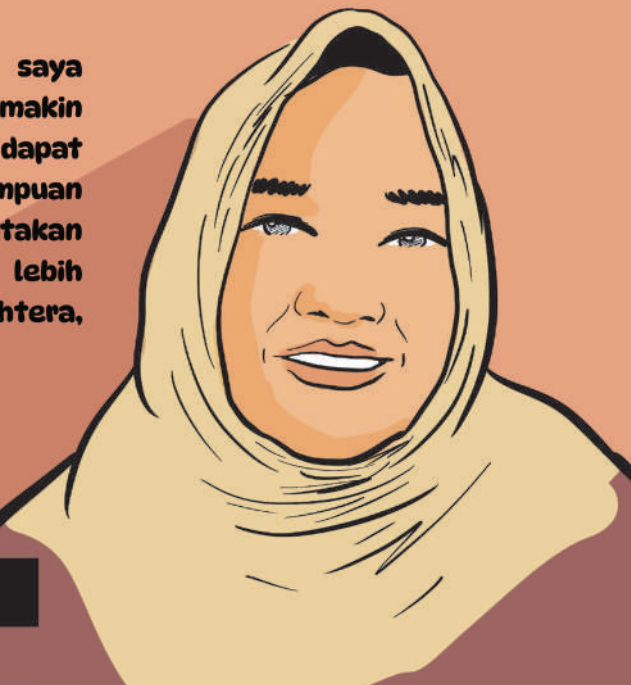
Mini Profil Samsidar

Dalam DPIA I, Samsidar terlibat aktif sebagai steering committee, walaupun pada saat itu dia baru saja sembuh dan tengah dalam masa pemulihan. Di akhir Duek Pakat, Samsidar terpilih sebagai salah satu Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh, yang merupakan amanat DPIA. Demikian juga dalam DPIA II, ia terlibat aktif. Samsidar kemudian sekali lagi terpilih menjadi anggota Presidium BSUIA.

Sebagai SC saat DPIA I, Samsidar harus siap bekerja dengan siapa pun dan menyiapkan diri untuk melakukan berbagai skenario-tindakan, strategis-taktis dan darurat, yang bisa terjadi kapan pun. Termasuk menangani ancaman pembunuhan terhadap salah satu rekannya, yang terjadi saat DPIA II.

“ Untuk ke depannya, saya berharap BSUIA semakin kuat dan dapat mempersatukan perempuan Aceh untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermanfaat, lebih sejahtera, dan lebih bahagia. ”

NUR SITI



Damai adalah suatu kondisi indah dan nyaman ketika semua orang dapat beraktivitas tanpa rasa cemas, bepergian tanpa rasa takut, beribadah dengan tenang, dan dapat bersosialisasi dengan sesama tanpa dibebani rasa curiga. Bagi para aktivis perdamaian, yang paling berat adalah berdiri di antara dua kepentingan, mencoba untuk tetap netral. Namun, saya dan rekan-rekan perempuan harus menghadapi tantangan luar biasa, antara lain, berupa ketidakpercayaan orang terhadap kenetralan sikap tersebut.

Tiap-tiap pergelaran Duek Pakat Inong Aceh (DPIA) memiliki poin yang berbeda-beda. Pada DPIA I yang dilakukan di tengah kondisi konflik yang sangat panas, tujuannya adalah keterlibatan perempuan dalam perdamaian. DPIA II, dilaksanakan pascatsunami Samudera Hindia di tahun 2004, tujuannya adalah merangkul keterlibatan perempuan dalam

proses rehabilitasi dan rekonsiliasi. DPIA III memiliki tujuan yang lebih jauh lagi, yaitu keterlibatan perempuan dalam politik. Sedangkan DPIA IV bertujuan memenuhi hak-hak perempuan.

Setelah DPIA I, diadakan rencana strategis (renstra) yang kemudian melahirkan lembaga Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA). Saat itu terpilih lima orang presidium. Di bawah BSUIA terdapat Komite Perdamaian, Komite Pemberdayaan Ekonomi, dan Majelis Qanun. Sesuai namanya, tiap-tiap majelis memiliki tugas yang berbeda. Rekomendasi yang dilahirkan DPIA disampaikan kepada banyak pihak, untuk mendorong adanya perwakilan perempuan dalam tim perundingan perdamaian Aceh.

Pada DPIA II, yang dilaksanakan setelah musibah gempa dan tsunami Aceh, pelaksanaan DPIA dipenuhi duka dan keterbatasan prasarana dan sarana. Penginapan para peserta terpaksa berpencar-pencar. Listrik dan air bersih sangat terbatas. Ditambah hadirnya suasana “mistis” yang menyebabkan setiap harinya ada saja peserta yang kesurupan.

Sedangkan DPIA III berhasil menghasilkan dokumen reparasi mendesak bagi perempuan korban konflik yang diserahkan kepada Pemerintah Aceh. DPIA III mengubah struktur organisasi BSUIA, yakni sekretaris jenderal tidak lagi dikenal, melainkan lima presidium yang dibantu seorang kepala sekretariat.

DPIA IV, saya selaku ketua steering committee (SC) harus mempersiapkan laporan pertanggungjawaban Balai Syura Ureung Inong Aceh. Saat itu BSUIA memperbanyak partisipasi masyarakat sipil melalui pembentukan dewan-dewan BSUIA di kabupaten/kota, memperkecil angka kekerasan terhadap

perempuan dengan berbagai program paralegal komunitas dan mulai terlibat dalam program lingkungan hidup.

Untuk ke depannya, saya berharap BSUIA semakin kuat dan dapat mempersatukan perempuan Aceh untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermanfaat, lebih sejahtera, dan lebih bahagia.

Mini Profil Nursiti

Memulai keterlibatannya sejak pra-kelahiran BSUIA, dengan menjadi peserta DPIA I mewakili Kelompok Kerja Transformasi Gender yang dibentuk pada 1995. Menemukan fakta memprihatinkan tentang pelabelan pada perempuan yang dilakukan semua kalangan termasuk kalangan perempuan sendiri, Nursiti terlibat dalam Majelis Qanun BSUIA yang lahir sebagai amanat DPIA I. Sebagai Ketua OC DPIA II pascagempa dan tsunami, Nursiti menghadapi banyak tantangan termasuk tantangan dari dunia tak kasat mata.

“ Risiko sebenarnya yang dihadapi aktivis perempuan Aceh di masa konflik adalah kehilangan nyawa. Pascaperang, sistem patriarki menjadi tantangan cukup serius lainnya. Sehingga aktivis perempuan sangat mudah memperoleh stigma. ”



SURAIYA

Damai itu bukan hanya absennya konflik, tetapi juga hadirnya keadilan sosial, pengakuan terhadap hak-hak perempuan dan kelompok rentan lainnya. Damai juga berarti adanya partisipasi aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini perempuan masih sering kali absen.

Damai bagi saya adalah sebuah keadaan saat semua orang, tanpa kecuali, dapat hidup dengan aman, saling menghormati, mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang, dan bebas dari ketakutan serta ancaman kekerasan seksual, baik di rumah atau di luar rumah.

Salah satu pengalaman paling berat bagi saya sebagai aktivis adalah menghadapi stigma dan tantangan ketika memperjuangkan hak perempuan di tengah sistem yang sering kali patriarki. Di masa perang, perempuan sering sekali dijadikan sebagai tameng. Ketika perang, perempuan

mendapatkan ancaman dari kedua belah pihak, baik dari TNI maupun dari GAM.

Saya pikir, tampaknya itu merupakan salah satu risiko yang akan dihadapi seorang aktivis hak asasi manusia. Sebab fokus utama kita adalah korban, bukan pelaku. Waktu itu saya sempat masuk daftar tembak dari TNI. Kemudian pernah juga diancam dan diikuti oleh GAM. Kantor saya pun pernah diancam akan dibom.

Pascaperang, tantangan lainnya yang harus dihadapi aktivis perempuan adalah seputar kentalnya sistem patriarki. Apalagi kalau kita memperjuangkan hak-hak perempuan terkait dengan substansi dari isi Qanun Jinayat. Kebanyakan orang tidak memahami akan lemahnya poin terkait perlindungan hak perempuan korban perkosaan dan pelecehan seksual di qanun tersebut. Sehingga kebanyakan orang langsung memberi stigma untuk para aktivis perempuan yang memperjuangkan keadilan melalui perubahan kebijakan atau qanun tersebut sebagai sekelompok orang yang antisyariat, sekuler, atau sebutan lainnya.

Hal tersebut tidaklah mudah. Apalagi keyakinan kita terhadap agama. Tantangan untuk meluruskan kesalahpahaman itu berat sekali. Akan tetapi, terlepas dari semua tantangan, sedikit demi sedikit peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya andil perempuan dalam perdamaian Aceh semakin terlihat. Hari demi hari, para perempuan yang muncul dan secara konsisten memperjuangkan hak perempuan memberikan harapan dan motivasi untuk seluruh aktivis perempuan di Aceh untuk terus melanjutkan kerja-kerja mereka. Termasuk saya sendiri, yang telah bergelut di bidang ini selama 32 tahun terakhir.

Hal paling berkesan terjadi saat Duek Pakat Inong Aceh (DPIA) perdana di tahun 2000. Saat itu sedang konflik, situasi sangat tegang. Pergelaran DPIA I menunjukkan semangat dan keberanian perempuan Aceh untuk duduk bersama menyuarakan aspirasi perempuan dengan menolak segala macam intervensi dari kedua pihak yang berkonflik.

Di waktu itu, banyak perempuan yang menjadi korban, baik secara langsung maupun tidak. Duek Pakat Inong Aceh menjadi salah satu wadah untuk memperjuangkan hak perempuan dan mendesak perlindungan bagi perempuan-perempuan yang terpinggirkan. Acara ini juga menjadi ruang yang menyampaikan pesan kuat tentang pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi.

Para perempuan yang hadir pada DPIA I berasal dari latar belakang daerah, profesi, aktivitas, umur, karakter, pemikiran, dan pendapat yang berbeda-beda. Ada yang bergerak di isu-isu politik, penggiat seni, aktivis, ulama, praktisi hukum, pendidik, tenaga kesehatan, pendamping desa, petani, pedagang, ibu rumah tangga, dan berbagai peran lainnya. Ada yang berpendapat, “Pokoknya Aceh harus Merdeka!”, tetapi ada juga, “Yang penting kita damai,” atau ada juga, “Saya pokoknya harus pro Indonesia”. Bagaimana mengelola orang-orang dengan sudut pandang yang begitu beragam, usia beragam, latar belakang beragam, itu sebuah pembelajaran yang luar biasa buat saya.

Meskipun situasi politik sangat kompleks dan dalam Duek Pakat Inong Aceh sendiri ada dinamikanya, akan tetapi para perempuan Aceh berhasil menunjukkan bahwa mereka memiliki peran penting dalam membangun kembali masyarakat Aceh. Perkumpulan perempuan Aceh ini termasuk kelompok

perdana yang secara terbuka menyuarakan pentingnya dialog damai di tengah perang yang terus berkecamuk dan korban yang terus berjatuhan.

DPIA menunjukkan kekuatan solidaritas perempuan dari berbagai latar belakang yang berkumpul dan saling mendukung satu sama lain. DPIA menunjukkan bahwa perempuan memiliki kekuatan untuk menjadi agen perubahan bahkan di tengah situasi konflik. DPIA menjadi pengingat bahwa suara perempuan itu penting untuk didengarkan dan diakui dalam proses perdamaian dan pembangunan.

Fakta unik lainnya yang sangat berkesan bagi saya adalah keterlibatan perempuan di Aceh meskipun mengalami berbagai tantangan. Para perempuan Aceh tetap berjuang untuk terlibat dalam proses perdamaian. Banyak perempuan yang menjadi jembatan komunikasi antarkelompok yang berkonflik dan memberikan kontribusi nyata, termasuk di tingkat tapak (grassroots).

Semisal ibu-ibu yang datang ke posko TNI untuk mempertanyakan di mana anak, suami, atau saudara laki-laki mereka yang sebelumnya dibawa paksa. Atau bahkan ibu-ibu yang naik gunung untuk bertanya kepada GAM akan kondisi anak-anak mereka. Para ibu tersebut punya kontribusi yang cukup serius, meskipun mereka sering diabaikan, terutama ketika proses dialog damai formal digelar.

Keterlibatan perempuan sangat penting untuk menciptakan masa depan yang lebih inklusif. Pengalaman ini menguatkan keyakinan saya akan pentingnya pemberdayaan perempuan dan keterlibatan aktif perempuan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam upaya menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

Mini Profil Suraiya Kamaruzzaman

Suraiya Kamaruzzaman berperan sebagai Ketua Steering Committee (SC) DPIA I. Dia menilai pengalaman tersebut sangatlah berkesan baginya karena dia belajar untuk menaungi dan mengorganisasi para anggota DPIA dari berbagai latar belakang profesi, pemikiran, dan usia yang sangat beragam; dari usia 20-an hingga 70-an.

Pada DPIA II, setelah kembali dari kuliahnya di Hongkong, Suraiya kembali mendapatkan tawaran menjadi ketua SC menggantikan Syarifah Rahmatillah yang mengundurkan diri, tetapi Suraiya menolak peran tersebut. Kemudian, bersama Azriana, Suraiya memutuskan terlibat sebagai juru bicara dan bekerja sama dengan tim SC lainnya.

Pada DPIA III dan IV, Suraiya terpilih sebagai salah satu Presidium Balai Syura. Sehingga dia menjabat sebagai presidium selama dua priode. Presidium merupakan peran yang menjadikan Suraiya otomatis harus terlibat sebagai bagian SC untuk DPIA. Sehingga dia ikut mempersiapkan konsep, tujuan, dan rancangan besar agenda DPIA bersama-sama teman-teman SC yang lain.



“Damai adalah ketika segala akibat konflik yang menimpa rakyat telah ditangani, pendidikan telah merata, masyarakat telah berdaya, dan tak ada lagi ketimpangan hukum, termasuk dalam pelaksanaan Syariat Islam.

”

ROSMAWARDANI

Kenangan tak terlupakan bagi saya adalah saat naik mobil pick up terbuka berkeliling Aceh Rayeuk, menggunakan megafon menyosialisasikan rencana pelaksanaan DPIA. Tak terlupakan juga betapa kompaknya perempuan Aceh ketika itu, termasuk dengan para pejabat, berkumpul di Masjid Raya Baiturrahman duduk bersama untuk membicarakan damai dalam masa konflik yang begitu panas.

Damai bagi saya ketika segala akibat konflik yang menimpa rakyat telah tertangani, pendidikan telah merata, masyarakat telah berdaya, tak ada lagi ketimpangan, termasuk dalam pelaksanaan syariat Islam.

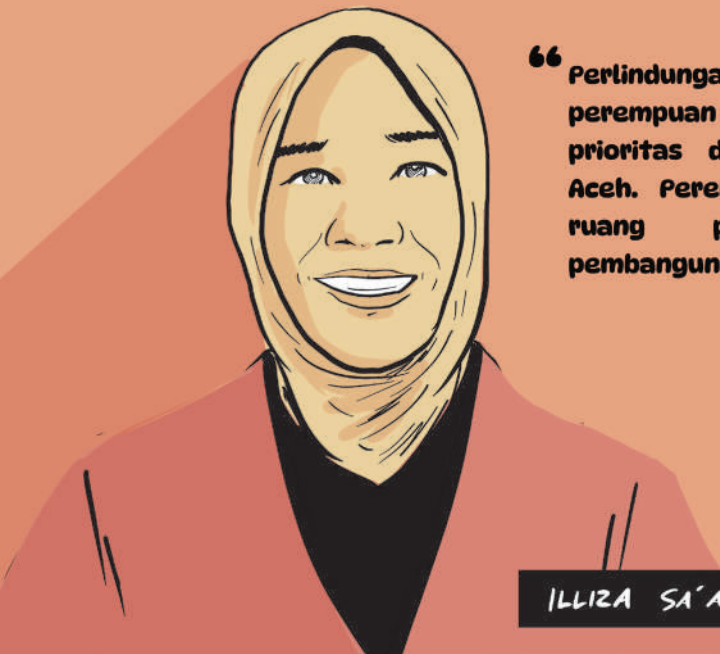
Terdapat memori tak terlupakan bagi saya saat berkesempatan mengantarkan bantuan ke kamp pengungsian dan menyaksikan seorang ibu yang hendak melahirkan. Begitu beratnya tugas perempuan, di tengah situasi darurat sekali

pun perempuan tetap dituntut untuk menjadi panutan dan acuan keluarga.

Saya berharap, damai dapat menjadi landasan kesetaraan di muka hukum bagi perempuan, terutama tentang hak-hak perempuan dalam pernikahan, dan setelah perceraian. Selain itu, ada harapan besar terhadap rancangan peraturan gubernur (pergub) tentang hal ini, yang telah diajukan sejak tiga tahun lalu. Semoga segera ditindaklanjuti.

Mini Profil Rosmawardi

Rosmawardani Muhammad adalah seorang perempuan yang semasa dinasny menjabat sebagai hakim. Pada DPIA I, dia terlibat sebagai bagian dari OC.



“ Perlindungan & pemenuhan hak perempuan di Aceh mesti menjadi prioritas dalam Pembangunan Aceh. Perempuan harus diberi ruang partisipasi dalam pembangunan Aceh. ”

ILLIZA SA'ADUDDIN

Sebagai perempuan, saya menyadari kehidupan perempuan itu tidaklah mudah. Dalam damai saja perempuan banyak yang menjadi korban kekerasan seksual. Apalagi saat konflik bersenjata, perempuan dan anak adalah korban yang paling menderita. Perempuan sering menjadi korban ganda bahkan ganda tiga di masa perang. Perempuan menjadi korban kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, bahkan menjadi korban secara finansial karena dipaksa menjadi kepala keluarga karena keadaan.

Masa damai menjadi titik tolak pembangunan di Aceh. Kerentanan yang dimiliki perempuan hadir bersamaan dengan kontribusi positif yang nyata untuk perwujudan perdamaian di Aceh. Peran dan kesaksian perempuan sebagai penyintas merupakan bagian dari inisiator perdamaian. Perempuan memiliki peran yang sangat strategis dalam pengambilan

keputusan penyelesaian konflik. Oleh karenanya, pascakonflik pun perempuan harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan guna menjalankan perannya untuk menjaga perdamaian dan mengurangi konflik sosial.

Saya memiliki hubungan emosional dengan Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA). Para perempuan hebat Aceh ini sangat mendukung saya sejak awal dalam kontestasi politik sebagai kepala daerah. Saya juga pernah dipercaya sebagai bagian dari anggota Presidium BSUIA.

Berbekal pengalaman tersebut, saya ingin perlindungan dan pemenuhan hak perempuan di Aceh menjadi prioritas dalam pembangunan Aceh. Perempuan harus diberi ruang partisipasi dalam pembangunan Aceh. Jangan ada lagi diskriminasi terhadap perempuan dalam segala aspek kehidupan.

Penegakan syariat Islam yang kafah seharusnya diamati dari perspektif kesejahteraan, perlindungan, dan pemenuhan hak perempuan dan anak di Aceh. Islam adalah agama rahmatan lil'alam, sehingga perempuan dan anak sangat dimuliakan. Tidak seharusnya ada penafsiran keliru yang mendiskreditkan ajaran agama Islam yang telah sempurna. Bangsa yang sukses adalah bangsa yang mampu memberdayakan dan memberikan perlindungan bagi perempuan dengan aman dan nyaman.

Masih membekas dalam ingatan saya saat DPIA I tentang perjuangan perempuan-perempuan Aceh yang terlibat dalam proses perdamaian untuk menyelesaikan konflik Aceh yang berkepanjangan. Melalui DPIA I inilah lahir butir-butir rekomendasi untuk melibatkan perempuan dalam musyawarah pengambilan keputusan untuk penyelesaian konflik di Aceh. Dari DPIA I pula terwujud wadah perkumpulan

organisasi-organisasi perempuan di Aceh yang dinamakan Balai Syura Ureung Inong Aceh. Alhamdulillah, contoh pengimplementasian program tersebut terwujud saat saya menjabat sebagai Wakil Wali Kota dan juga saat menjadi Wali Kota Banda Aceh.

Saat DPIA II, hal yang masih saya ingat adalah perjuangan perempuan-perempuan Aceh untuk kembali berdaya setelah terjadinya bencana megatsunami Aceh. Pertemuan tersebut melahirkan rekomendasi terkait hak-hak perempuan dan anak pascatsunami, serta keterwakilan perempuan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Sehingga, saat saya diundang dalam kegiatan Seminar Internasional yang dilaksanakan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), hasil rekomendasi pada DPIA II menjadi rujukan yang memperkuat program rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami di Aceh.

Adapun dari DPIA III, perempuan-perempuan Aceh mampu mendorong lahirnya rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dalam Syariat Islam serta Partisipasi Politik Perempuan di Aceh. Sedangkan DPIA IV menjadi momentum bagi para perempuan Aceh melahirkan petisi untuk mendukung Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dari Pemerintah Aceh. Saya ikut menandatangani petisi tersebut. Proses perjuangan ini berbuah manis dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia.

Mini Profil Illiza Sa'aduddin Djamal

Illiza Sa'aduddin Djamal ikut aktif terlibat sebagai anggota SC pada pergelaran DPIA III. Dia juga pernah menjabat sebagai Pengurus Balai Syura selama dua periode berturut-turut, dari 2005—2015.



“Cara perempuan beradu argumentasi tidak memunculkan bahasa yang kasar. Diskusi berjalan penuh semangat namun tetap santun.”

AZRIANA MANALU

Dari pengalaman mengikuti berbagai pertemuan pra-DPIA I, saya menemukan dinamika pembahasan yang khas di setiap persidangan yang mungkin tidak didapati pada kegiatan serupa di kesempatan lainnya. Saya menyadari keunikan cara perempuan dalam beradu argumentasi. Walaupun diskusi berlangsung hangat, bahkan cenderung tegang, tetapi tidak muncul bahasa yang kasar. Tak ada saling hina antarpeserta, diskusi berjalan penuh semangat, tetapi tetap santun.

Mendapatkan kesempatan menjadi Koordinator Lapangan (Korlap) Aceh Utara memberikan pengalaman tak terlupakan bagi saya pribadi. Saat itu saya mendampingi peserta dari daerah menuju Banda Aceh menggunakan bus yang pengemudinya terus-menerus memasang kaset rekaman ceramah tokoh GAM. Padahal saat itu, mobil yang kami tumpangi harus melewati pos-pos penjagaan aparat TNI.

Tentu itu merupakan momentum yang sangat menegangkan. Hingga akhirnya saya memasang strategi untuk menyerahkan kaset berisi rekaman lagu-lagu untuk diputarkan oleh supir bus. Dengan harapan perjalanan kami aman saat melewati pos-pos penjagaan tersebut dan kami bisa tiba sampai ke lokasi tujuan dengan selamat.

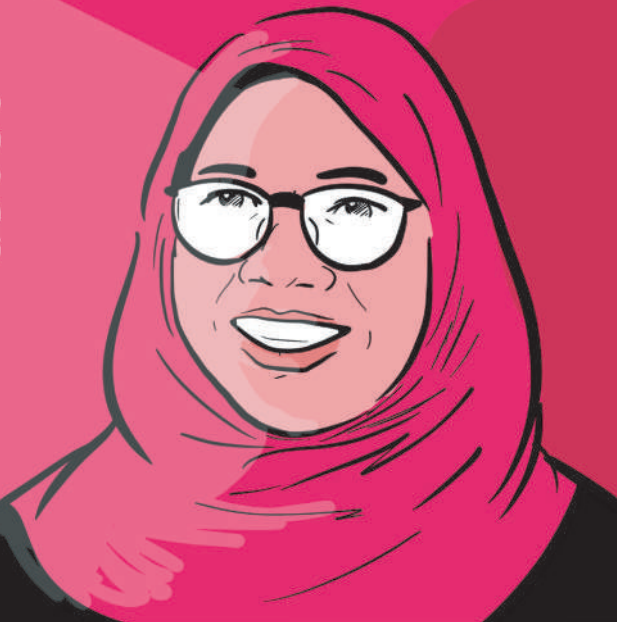
Demi merasa aman, damai adalah hal vital yang harus kita miliki. Damai adalah ketika seluruh rakyat merasakan keamanan dan kesejahteraan. Masyarakat dapat berekspresi tanpa dirundung ketakutan dan dapat memperjuangkan hak-haknya tanpa intervensi atau diskriminasi.

Mini Profil Azriana Manalu

Dalam DPIA II Azriana terlibat aktif sebagai steering committee (SC), juga terpilih sebagai pimpinan sidang dari SC, sebelum pimpinan sidang baru dipilih oleh peserta DPIA. Dalam DPIA III Azriana masih tetap duduk sebagai SC, sementara dalam DPIA IV Azriana telah menjabat sebagai Ketua Komnas Perempuan, yang berkedudukan di Jakarta. Namun, dia tetap hadir dalam Sesi 1 Pembukaan DPIA IV sebagai narasumber, dan kemudian terpaksa harus meninggalkan DPIA karena telah memiliki agenda lain di ibu kota. Azriana merasa sangat senang pernah terlibat sebagai SC DPIA, sebab hal ini memberinya kesempatan untuk mendesain arah dan tujuan pergerakan perempuan.

“ Damai buat saya adalah situasi dan kondisi yang dirasakan, bukan slogan dan simbol-simbol yang hanya bertahan di permukaan. ”

NORMA SUSANTI



Damai itu harusnya berdampak pada keamanan dan kesejahteraan seluruh masyarakat tanpa kecuali. Tidak ada ketakutan akan mengalami kekerasan, dieksploitasi, dan semua dampak buruknya. Layanan publik yang berkualitas bisa diakses masyarakat dengan mudah, murah, dan pasti. Tersedia ruang kondusif yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat menyampaikan pendapat. Komplain atas layanan ditangani dengan baik oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait. Terdapat jaminan yang mendukung perlindungan hak dan peningkatan kesejahteraan kelompok rentan. Intinya, damai adalah kondisi ketika setiap individu bisa hidup sejahtera dan mengaktualisasikan diri secara maksimal. Sehingga mampu berkontribusi positif untuk mendukung dan mempertahankan pembangunan perdamaian di aceh.

Oleh karenanya, Duek Pakat Inong Aceh (DPIA) menjadi salah satu ruang bagi kita untuk mendiskusikan berbagai strategi gerak bersama yang aplikatif dalam mengadvokasi pemenuhan dan perlindungan hak perempuan di Aceh. Menariknya, di setiap pelaksanaan DPIA, kepanitiaannya dibangun dengan pendekatan kerelawanan (*volunteering*), bahkan sejak DPIA I.

Siapa pun yang menjadi bagian dari DPIA akan memiliki kenangan indah tersendiri. Ada rasa bangga karena dapat berkontribusi mendukung gerakan perempuan dalam merumuskan agenda kerja untuk mengadvokasi pemenuhan dan perlindungan hak perempuan di Aceh.

Saya punya pengalaman berkesan ketika mendapat kepercayaan menjadi koordinator panitia teknis (OC) pada DPIA III yang dilaksanakan di Asrama Haji Aceh. Saat itu, fasilitas asrama haji belum sebaik sekarang. Agar peserta yang hadir nantinya merasa nyaman, maka seluruh panitia bersepakat membersihkan serta mempersiapkan kamar tidur dan ruang pertemuan secara mandiri. Sebab tidak ada dana khusus untuk membayar jasa kebersihan dari orang lain. Selama dua hari, panitia datang ke Asrama Haji Aceh membawa sapu, alat pel, ember, cairan pembersih, dan lainnya. Bahkan ada yang berkontribusi menyediakan snack untuk dimakan bersama selama kegiatan bersih-bersih tersebut.

Waktu pelaksanaan DPIA III ternyata berdekatan dengan momentum pemilihan kepala daerah saat itu. Disebabkan terbatasnya dana, maka *steering committee* (SC) berupaya menggalang dukungan dari berbagai pihak, termasuk para kandidat politik, sebab waktunya bertepatan dengan pemilu. Agar tidak terjadi konflik kepentingan dari masing-masing

kandidat, maka SC pun membuat peraturan khusus terhadap dukungan yang diterima dari para kandidat tersebut. Semua hal tersebut menjadi pengalaman yang luar biasa dan tak terlupakan.

Mini Profil Norma Susanti RM

Norma Susanti RM menerima kepercayaan sebagai ketua OC pada DPIA III tahun 2017. Dia juga menjadi bagian dari Kepengurusan Balai Syura untuk periode 2017—2022 (dengan perpanjangan tugas hingga 2024).



“DPIA merupakan forum istimewa karena seluruh kekuatan dan potensi Perempuan Aceh tergabung di sana. DPIA juga mampu membidik dengan detail persoalan dan tantangan untuk kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.”

AMRINA HABIBI

Damai bagi saya adalah memiliki akses, ruang, dan peluang baik untuk berkarya, serta memperkecil potensi konflik yang disebabkan oleh perbedaan. Sebab sejatinya keindahan kehidupan ini berasal dari hadirnya perbedaan. Adapun untuk mencapai kedamaian hakiki maka sudah seharusnya perempuan tidak lagi menjadi korban, tetapi justru diharapkan perempuan bisa mengambil serta mengisi peran strategis di banyak tempat dan ruang.

Oleh karenanya, saya pikir penting bagi kita untuk mampu menindaklanjuti rekomendasi yang telah ada melalui dukungan dan kemitraan dari berbagai pihak terkait. Termasuk dukungan dari pemerintah untuk menjamin fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Terkait nostalgia DPIA I dan DPIA II, saya hanya mendengarkan kisah tersebut dari mulut ke mulut dan

membaca ceritanya melalui beberapa tulisan yang sangat terbatas. Kakak ipar saya di masa itu pernah beberapa kali mengajak saya ke sekretariat, tempat DPIA dipersiapkan. Saat itu saya hanya mangut-mangut mendengarkan diskusi para aktivis perempuan Aceh tersebut dalam proses mempersiapkan pergelaran DPIA.

Beruntung, saat DPIA III, saya ikut hadir sebagai peninjau. Ternyata memang benar, luar biasa sekali semangat para peserta. Tak jarang perbedaan pendapat muncul, tetapi tetap dalam satu koridor tujuan gerakan besar perempuan dalam mewujudkan kesejahteraan Aceh.

Saat DPIA IV, saya memiliki hak suara dan ikut memilih. Saat itu terlihat pemilihan berjalan cukup demokratis, walau sedikit intrik. Disebabkan oleh keinginan sebagian calon untuk menang menjadikan para pendukungnya rela menyebarkan informasi miring dan mencari celah untuk menjatuhkan lawan yang ikut diusung.

Akhirnya, atas dukungan sejumlah rekan, saya pun terpilih sebagai salah satu Presidium Balai Syura periode 2017–2022. Sebuah pilihan menakutkan bagi saya karena memiliki profesi utama sebagai aparatur sipil negara (ASN). Sebab berpotensi menerima pelabelan, “Hati-hati, dia bagian dari LSM. Dia aktivis.”

Bagi saya, DPIA merupakan forum istimewa karena seluruh kekuatan dan potensi perempuan Aceh tergabung di sana. Terjadi pertukaran informasi, pengalaman, pengetahuan, dan praktik keterlibatan perempuan untuk kemajuan Aceh. DPIA juga mampu membidik dengan detail persoalan dan tantangan untuk kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

Mini Profil Amrina Habibi

Amrina Habibi pertama kali terlibat langsung dalam Duek Pakat Inong Aceh (DPIA) saat terjun sebagai peninjau di DPIA III, walaupun sebelumnya dia sudah pernah mendengarkan cerita-cerita terkait DPIA I dan DPIA II dari mulut ke mulut. Kemudian, pada DPIA IV, dia terlibat langsung sebagai salah satu anggota SC. Lantas dia pun terpilih menjadi salah satu Pengurus Balai Syura untuk periode 2017—2022 (dengan perpanjangan tugas hingga 2024).



“Memang berat menyatukan pemahaman terkait makna damai. Namun, saya menjadi saksi akan kemampuan para perempuan Aceh dalam memberi pendapat dan menghasilkan buah pikir cemerlang dalam bermufakat.”

RIA FITRI

Damai merupakan kondisi aman, terlindungi, dan terpenuhinya hak-hak individu, kelompok, dan hak konstitusi. Damai juga berarti kita dapat saling menghormati dan menghargai tatanan norma serta kaidah yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tanpa adanya diskriminasi, kekerasan, dan intimidasi.

Fakta unik yang saya sadari bahwa para aktivis perempuan pra-perdamaian Aceh lebih memilih jalur perundingan dan musyawarah dari pada menggunakan jalur adu fisik. Walaupun tetap ada perempuan Aceh yang berjuang secara fisik dan menjadi tameng pelindung bagi masyarakat lainnya. Mereka dikenal dengan sebutan Inong Balee. Pada masa itu, nyaris seluruh perempuan Aceh harus dihadapkan dengan intimidasi dan potensi kehilangan jiwa.

Saya terlibat sebagai peserta DPIA II dan menjadi anggota SC pada DPIA III. Di sana saya menyaksikan betapa gigih perempuan Aceh memperjuangkan damai dan hak-hak mereka untuk memperoleh keamanan. Saya sempat haru dan merinding saat menyadari betapa besar potensi yang dimiliki perempuan Aceh yang hadir pada momentum-momentum DPIA saat itu.

Memang berat menyatukan pemahaman terkait makna damai. Namun, saya menjadi saksi akan kemampuan para perempuan Aceh dalam memberi pendapat dan menghasilkan buah pikir cemerlang dalam bermufakat.

Oleh karenanya, saya berharap, perempuan Aceh bisa mendapat akses dan peluang yang diperhitungkan untuk berkontribusi di berbagai ranah. Kemudian, saya harapkan juga semua stakeholder memiliki perspektif tentang kesetaraan gender. Sehingga tidak ada lagi yang namanya diskriminasi, kekerasan, dan intimidasi terhadap perempuan baik di ranah privat maupun publik. Selain itu, kebutuhan khas perempuan juga dapat dipenuhi oleh pemerintah. Dengan demikian, relasi hubungan dapat berjalan seimbang.

Mini Profil Ria Fitri

Ria Fitri merupakan anggota SC pada DPIA I dan DPIA IV. Dia juga pernah terlibat sebagai Pj. Sekretaris Jendral Balai Syura 2005—2010 menggantikan posisi Nursiti yang saat itu harus melanjutkan pendidikannya.



“Damai lebih baik dari segalanya. Semoga kita sebagai perempuan tetap terdepan dalam menjaga perdamaian Aceh.”

SYARIFAH RAHMATILLAH

Damai lebih baik dari segalanya. Saya pernah terlibat sebagai juru runding sekaligus tim monitoring pada Jeda Kemanusiaan Aceh. Saat masa-masa penyelesaian pereseteruan konflik Aceh, sebagian pihak menginginkan kondisi tersebut diselesaikan secara operasi militer. Namun kebanyakan perempuan memilih jalan perdamaian.

Saya pernah berperan sebagai SC yang merangkap OC pada DPIA I. Kemudian saya juga pernah menjadi Sekretaris Eksekutif Balai Syura Ureung Inong Aceh pada periode perdana. Harapan saya, semoga perempuan tetap terdepan dalam menjaga perdamaian Aceh.

Mini Profil Syarifah Rahmatillah

Syarifah Rahmatillah merupakan anggota SC DPIA I dan DPIA II. Dia juga pernah menjadi Sekretaris Eksekutif Balai Syura tahun 2000–2002 dan kemudian mengundurkan diri, lalu diganti secara *ex officio* oleh Samsidar yang dalam perjalanan diserahkan kepada Naimah. Kemudian Syarifah menjadi bagian dari Kepengurusan Balai Syura untuk periode 2010–2015.

**“Damai adalah hidup
tanpa tekanan dari
pihak mana pun.”**

ELVIDA



Sebagai perempuan yang saat itu berusia awal dua puluhan, bertemu dengan begitu banyak perempuan hebat dari kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh memberikan kesan mendalam bagi saya pribadi. Saya menyaksikan dan mendengarkan begitu banyak kisah luar biasa tentang perjuangan para perempuan hebat yang hadir di DPIA I.

Saat itu saya terlibat aktif menjadi bagian dari panitia DPIA I selaku fotografer dokumenter. Saya mencoba mengabadikan momen-momen bersejarah dalam pergerakan perempuan Aceh melalui jepretan kamera.

Damai bagi saya bermakna bisa hidup tanpa tekanan dari pihak mana pun. Kiranya damai yang telah kita dapatkan dengan begitu susah payah, bercucuran keringat, air mata, bahkan darah, dapat dipertahankan. Kemudian, saya juga berharap, ke depannya ruang partisipasi bagi perempuan dapat lebih diperluas.

Mini Profil Elvida

Terlibat aktif dalam kepanitiaian DPIA I bidang dokumentasi, Elvida menggunakan kamera sebagai senjata mengabadikan momen sejarah pergerakan perempuan Aceh. Dalam perannya itu, dia tak luput dari ketegangan yang menimpa para aktivis masa itu, misalnya, ketika harus berhadapan langsung dengan aparat militer. Tugasnya sebagai fotografer tentunya membuat Evi, sapaan akrabnya, harus mengikuti setiap acara DPIA. Hal itu menyebabkan dia selalu berpindah-pindah lokasi acara, selaku panitia yang datang cukup awal dan pulang setelah peserta terakhir pergi. Akibatnya, dia kerap mengalami ketegangan saat pulang ke rumah selewat jam malam, yang kala itu diberlakukan di Aceh.

Sampai kini, Evi masih tetap bersahabat dengan kamera, yang menjadi teman setia baginya untuk mendokumentasikan sejarah.

*Galeri
Perjuangan*



Perempuan Aceh berkumpul di depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh pada acara pembukaan DPIA I



Para peserta berkumpul menghadiri pembukaan DPIA I di halaman Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh



Selamat & Sukses
 PERGELARAN DUEK PAKAT INONG ACEH I
 di Anjong Mon Mata Banda Aceh



Para perempuan dari berbagai wilayah berhadir dalam
 melaksanakan DPIA I



Selamat R. Sukana

Panitia pemandu pelaksanaan sidang
DPIA I di Banda Aceh



Konferensi Redaksi Wartawan bersama
panitia, dengan Lutfi Baria selaku PJ,
selama DPIA I



Jurnalis dari media nasional dan lokal
mendapatkan informasi pelaksanaan
DPIA I dari panitia setiap harinya



Unjuk rasa kelompok masyarakat yang
menolak pelaksanaan DPIA I

Keberhasilan & Sukses
BUK PAKAT INONG ACEH
Anjeng Man Mata, 20-22 Februari 2008 Banda Aceh



Para peserta DPIA I dari berbagai daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada Tahun 2000



Perempuan-perempuan yang peduli pada isu perdamaian Aceh dan terpanggil untuk hadir pada DPIA I



Pemukulan tambur oleh Ulama Perempuan dalam pembukaan DPIA I di depan Masjid Raya Baiturrahman



Pembacaan doa pembukaan DPIA I oleh (Almh) Adi Warni dan Rosmawardani

Daftar Pustaka

- Firdausi, Fadrik Aziz. *Aceh Menuntut Referendum, Dua Dekade Lalu*. Tirto.id. Terbit 10 Juni 2019 08.00 WIB. <https://tirto.id/aceh-menuntut-referendum-dua-dekade-lalu-d9pZ>
- Ismiati. 2016. *Eksistensi Aktivis Perempuan Dalam Mewujudkan Damai Aceh*. Al Bayan. Jurnal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar Raniry: Banda Aceh. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/view/643/538>
- Mahmud Adan, Mahyuddin. 2011. *Mendekap Damai Aceh: to see the reality*. Trim Komunikata: Bandung.
- Marzuki, Nashrun, dan Warsidi, Adi (Ed.), dkk. 2011. *Fakta Bicara: Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005*. Koalisi NGO HAM Aceh: Banda Aceh.
- Widjanarko, Tulus, dan Sambodja, Asep (Ed), dkk. 1999. *Aceh Merdeka Dalam Perdebatan*. PT Cita Putra Bangsa: Jakarta.

Biodata Penulis

Ayu 'Ulya, perempuan Aceh yang memiliki ketertarikan di bidang *storytelling*. Dia secara konsisten menghasilkan berbagai karya seni melalui media digital kreatif. Karya-karyanya didominasi tulisan feature, desain poster, dan juga gim. Ayu terlibat aktif mengkoordinasikan komunitas Perempuan Peduli Leuser dan masuk sebagai bagian tim inti media *perempuanleuser.com*. Selama beberapa tahun terakhir, Ayu dan timnya mendedikasikan diri untuk menuliskan cerita-cerita berdampak di Aceh yang mencakup tema lingkungan hidup berkelanjutan, warisan budaya, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, orang muda, dan anak-anak, GEDSI (gender, disabilitas, dan inklusi sosial), serta tema-tema yang berkaitan dengan kemanusiaan dan perdamaian. Ayu percaya pada kekuatan bercerita yang menjadikan orang-orang saling terhubung. Kekuatan kolektif yang dapat menjadikan dunia ini menjadi lebih baik.

Dian Guci adalah nama perempuan berdarah campuran Minang-Sunda, yang menulis sebagai usaha mengawetkan kemampuan kognitif. Memulai jalan kepenulisan di tahun 1988 dari ranah fiksi. Setelah bermukim di Aceh, Dian juga menulis feature dan buku seputar isu HAM dan perempuan. Lulus dari sebuah institut teknik tua di Bandung, belakangan Dian melakukan riset dan menulis seputar budaya, adat istiadat, serta kearifan lokal Aceh. Dian merupakan pegiat di komunitas Perempuan Peduli Leuser dan menulis di *perempuanleuser.com*. Dengan menulis, Dian berharap dapat membuat sketsa lanskap yang bertutur jujur tentang masyarakat Indonesia. Dia percaya pada efektivitas jargon “jurnalisme sastra”, dan tentang ini, dia punya “mantra” yang diconteknya dari kata-kata empu sastra dan jurnalisme Indonesia, Mokhtar Lubis: “Sastra yang baik selalu merupakan cermin sebuah masyarakat.”

Apendiks I Daftar Peserta DPIA I

DUEK PAKAT HADIR ACEH
WILAYAH A. BESAR

A. PESERTA

1. Darma Wanita A. BESAR (Ny. SAYUTI)
2. Aisyiah
3. Muslimah HU
4. Muslimah Alwashliyah
5. Nasyiatul Aisyiah
6. Fatayat HU
7. PMI A. BESAR
8. GOW
9. Ikorda Pili Wabi A. Besar
10. Korp. HMI wabi (Kohati)
11. Kelompok Pengrajin Roban kec. Uho'nga
12. Remaja Mesjid Lampisang, Puliari Bada
13. PKK Darul Imanah
14. Kelompok Pengrajin Lubok, Ingin Jaya
15. Kelompok Pocut Meurah, Krueg Lam karung Indrapuri
16. Kelompok cut Nyak Ohien, Baroeh Krueg Kala
17. Kelompok cut Mutia, Lhong
18. Kelompok Pantai Harapan, Alue Naga
19. Kelompok Dampiran PPC, Saree
20. Wanita Pribadi Guru Republik Indonesia (PGR1)
21. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)
22. Wanita Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI)
23. Wanita Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)
24. Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI)
25. Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT)



26. Waton Sarjana wanita Indonesia (1961)
27. Beaton Beaton Indonesia (1961)
28. Koperasi wanita
29. PHRI
30. UMAYA

B. Peningkatan

1. AFRINA : Penjahit
2. Satri Helvina : Ibu Rumah Tangga
3. Aminah : Petani
4. Satri Helvina : Karyawan
5. DARWANA : WAT
5. HURMAYANI : Pengacara

DAFTAR: NAMA-NAMA CALON PESERTA KONGRES WANITA
"BUK PAKAT TONG AGRI" DI BANDA AGRI
TANGGAL 19 & 22 FEBRUARI 2000
KABUPATEN BIREUN.

NO.	N A M A	A L A M A T	K E T E R A N G A N
1.	Hj. Elida	Kab. Bireuen	PORT Kab. Bireuen
2.	Hj. Hafshah Ahmad	Kab. Bireuen	HAMEDATUL ULAMA
3.	Hj. Suraida	Kab. Bireuen	PORT Lab. Bireuen
4.	Hj. Ernita MA.	Kab. Bireuen	KONT Kab. Bireuen
5.	Hj. Rosmini M. Ali	Kab. Bireuen	P X I Kab. Bireuen
6.	Mur'atiah, S.Pd.	Kab. Bireuen	Alayiah Kab. Bireuen
7.	Hj. Nurjannah	Kab. Bireuen	Kol. Pengajian Pulo Ara
8.	Ny. Yulidar	Kec. Samalanga	WNT. Kec. Samalanga
9.	Ny. Amawati Musa	Kec. Samalanga	TP. PKK Kec. Samalanga
10.	Out A s s a	Kec. Samalanga	Kol. Pengajian Sambao
11.	Ny. Nurhasanti	Kec. Jeunib	TP. PKK Kec. Jeunib
12.	Hj. Hawardani	Kec. Peusangan	WNT. Masjid Agung Bireuen
13.	Ny. Siti Syarifah	Kec. Jeumpa	WNT. Kec. Jeumpa
14.	Ny. Fadriah	Kec. Foudada	WNT. KEC. FUDADA
15.	Ny. Nurlatifah	Kec. Juli	TP. PKK Kec. Juli
16.	Hj. Halidar	Kec. Foudada	TP. PKK Kec. Foudada
17.	Ny. Jamaliah	Kec. Jangka	TP. PKK Kec. Jangka
18.	Ny. Out Nurlaila	Kec. Ganda Pura	WNT. Kec. Ganda Pura
19.	Ny. Nurjannah	Kec. Makmur	TP. PKK Kec. Makmur
20.	Ny. Huseiniah H.M. Daud	Kec. Pandrah	TP. PKK KEC. Pandrah
21.	Ny. Out Nursiah	Kab. Bireuen	Kol. Pengajian Gampeng Gajah
22.	Pipi Soeani	Kec. Matang	GAMAUR PT. AL-Muslin
23.	Muhaira	Kec. Jeumpa	GAMAUR PT. AL-Muslin
24.	Out Salfiana	Kec. Peusangan	GAMAUR PT. AL-Muslin
25.	Ny. Sumarni	Kab. Bireuen	Kol. Pengajian Juli

26. : Dns. Ramlah H. : P. 9. 2. 00.

27. : Nasarunah : Asas Gidur Bireun, 16 Februari 2000

28. : Dns. Lailan : Asas Gidur Koordinator Kabupaten Bireuen,

29. : Ny. Hudaibillah

30. : Ny. Gus Harballah :

31. : Ny. Anjani

32. : Chaniyah H. : K. A. 1. 1. 1. 1. : Abang B. B. B.

Shumjo
Ir. Chaididjah Hasan

Aceh Utara

Peserta duak pakat inong aceh 20 - 22 februari 2000

No	Nama	Berasal dari lembaga	Keterangan
1.	Zubaidah Ismi	GOW	Peserta
2.	Syarifah Marheini	Pkk Mongeudong	Peserta
3.	Juriani	Yabda	Peserta
4.	Azriana	Madika	Peserta
5.	Dra.Nurhayati AY	Camat Kepwil Banda Sakti	Peninjau
6.	Aminah May	Nurul Ma'arif	Peserta
7.	Sumarni	Ikatan Keluarga Ibu-ibu Bumiputera	Peserta
8.	Rosniati	Pengajian BIII	Peserta
9.	Rohani	Pengajian Perempuan Desa Paya Gaboh	Peserta
10.	Khairul Hasni	Relawan Perempuan Untuk Kemanusiaan	Peserta
11.	Irwani	Kelompok Guru Pengajian Keude Aceh	Peserta
12.	Juwairiah	Kelompok Pengajian Hidayatul	Peserta
13.	Nurlela	Kelompok Ibu PKK Genaliraya	Peserta
14.	Ibu Tuti	Kelompok Tapanuli	Peserta
15.	Dra. Sukmawati	Kelompok Nahdatus Aisyah	Peserta
16.	Nurmala	Kelompok Pengajian perempuan Desa Keudep	Peserta
17.	Faridah	Ikatan Persaudaraan Banten Lhoksukon	Peserta
18.	Rosnidar A.Ma.PD	Aisyah Lhoksukon	Peserta
19.	Rosniyah	PGRI	Peserta
20.	Nurrahman Rusyanti Yusuf	Kelompok Pengajian Perempuan Aisyah Lhoksukon Sa. Mng. Oryah	Peserta
21.	Faridah Hanum	Kohati Lhokseumawe	Peserta
22.	Inong Sri Mahanum	Keputrian BEM Unina	Peserta
23.	Nurjubah	Forjadam	Pendamping peserta
24.	Dawiyah	Aisyah Lhokseumawe	Peserta
25.	Badriah	Perempuan Pedang	Peninjau
26.	Funiah	Ibu Rumah Tangga	Peninjau
27.	Nurhavati	Kelompok Perempuan Petani	Peserta
28.	Mariati	Kelompok Perempuan Peternak	Peserta
29.	Siti Mu'minah AR	Pengajian wirit Lancang garam	Peserta
30.	Ibu Dewiana	Kelompok Perempuan Pengajar	Peserta
31.	Mariati,SH	Pengacara	Peninjau
32.	Ainul Mardiah	Kelompok Perempuan Pedang	Peserta
33.	Nuraini	Forjadam	Peserta
34.	Maulidar	BKMT Lhokseumawe	Peserta
35.	Sugito Tazan	Panitia/Media	
36.	Zulfira	Panitia/korlap	
37.	Zahara Daham	Panitia/korlap	
38.	Dewi Kemalasari	Panitia/korlap	

DAFTAR PESERTA
KAB. PIDIE

NO	NAMA	LEMBAGA	ALAMAT
1	Ainal Mardiah	PKK Kesehatan	Grong-Grong-Delima
2	Arjuna	KPKR	Kaude Tangse
3	Asmawati	Kel. Pedagang	Tiro
4	Ayem	PPMNG	Mane Cot Geumpang
5	Darmawati	HWK	Tijue
6	Dr. Herniwati	IDI	Tijue
7	Dra. Nurjanah	Akwasiyah	Sigli
8	Fandah	Kel Nelayan	Pasi Lhok Kb. Tanjung
9	Faridah	HMI	Glee Gapui
10	Faslioti	PKK	Blang Asan
11	Nurtini	Fatayat NU	Bambi
12	Hasrawati	Kodam FA	Karieng
13	Hj. Mariati A. Thaleb	Pompes	Sigli
14	Irma	IPPI	Garot
15	Isna Yalim	Aisyiah	Kp. Are
16	Juniati	Muslimat NU	Beureuneun
17	Kak Nur	Tata Rias Pengantin	Batee
18	Khasyiah A. Gani	JPKM	Kota Bakdi
19	Lailien	KPKGG	Geumpang-Pidie
20	Mardhani	Pengrajin Kasap	Kp. Are
21	Mardiah	PKT	Tang Pila
22	Marinda	BNH	Sigli
23	Marwati Azhar	Muslimat NU	Blang Asan
24	Maulida Susilawati	IFGI	Tijue
25	Munawiah	Pemala	Grong-Grong-Delima
26	Nurhayati	Kel. Pedagang	Tijue
27	Nurhayati	INS	Sigli
28	Nurjanah	Foradom	Paloh Tinggi
29	Nurlela	IBI	Lueng Putu
30	Ny. Said Salim	DW	Blang Asan
31	Ona Delvi	KAPA	Blang Pase
32	Rahmalmah	PGRJ	Sanggus
33	Roslita	IPMA	Benteng-Pidie
34	Ruwaida	IPKDB	Dayah Baroh
35	Sapiah	KPM	Beureuneun
36	Siti Aminah	PS (Penjahit Bordir)	Mns Luang (Saka)
37	Susiyanti	BEM Ungha	Caleu-Pidie
38	Ummi	KIKT	Tiro-Pidie
39	Wardiah	ISSAKTI	Kota Bakdi
40	Wirda	Pili Wali	Pidie
41	Yusmadaniar	PPKL	Kp. Senlosa Beureunin
42	Dra. Muslihah, IT	KU	Sigli
b. Peninjau			
NO	NAMA	LEMBAGA	ALAMAT
1	Nurjanah	Pengungs	Beureunin
2	Mimunah	Akwasiyah	Lamposaka
3	Dra Raisah Cut	Guru	Sanggus

4	Wardiani	Dagang	Kota Bakdi
5	Idawati	Saswi	Tiro
6	Maimunah	Muslimat NU	Blang Asan
7	Cut Meurah Wahyuni	Pili Vati	Blok Sawah
8	Maidar	HMI	Blok Sawah
9	Sudarmi	Foradom	Rambong
10	Nurhayati Taleb	HWK	Tijue
11	Hiasati	Fatayat NU	Bambi
12	Anon Mardiah	IBI	Beureunin
13	Susiyanti	Mahasiswa	Caleu
Peserta			
Peninjau			
Jumlah			

NAME: BUDI D. ACEH
PHONE NO.: +62 651 21099
FEB. 17 2000 12:42:11 PM

THU, 17-FEB-02 12:05 PANGATEL TIDUR TUM 01 055 21072

Jakarta, Diuk Pakat, Unang Aceh
Dari Kab. Aceh (Satam)

1. Zurida Samita S.S. (Rumaf Mesjid)
2. Yusia (Rumaf Mesjid)
3. Amriati B.A. (Guru SMPK J.C. Tuen)
4. I.R. Eoni Dasmawati (Perempuan Manas)
5. H. Nafisah Hasmiati (Perempuan Manas)
6. Wusini (Guru S.D. 4 J.C. Tuen)
7. Rafni (Rumaf Mesjid)
8. Eut Hasmawati (Rumaf Mesjid)
9. Ora Agustinia (Guru SMP II J.C. Tuen)
10. Agus H. M. (SIS BAKEN) (Manas)
11. Rita Epipor (Rumaf Mesjid)
12. Tina Hasliudin (Rumaf Mesjid)
13. Arifoni Dasmawati (Rumaf Mesjid)
14. Huda Khar (Rumaf Mesjid)
15. Valherini (TK. PDI) (Rumaf Mesjid)
16. Waslihati (Rumaf Mesjid)
17. Putu Komelateri (Mudatidun J.C. Tuen)
18. Elli Faida (Rumaf Mesjid)
19. Rosmawati (Rumaf Mesjid)
20. Amawati (Guru) (Rumaf Mesjid)
21. Latra Ranti (Guru SMP J.C. Tuen)

Dari
Sesuai
Kondisi

Kepada
Hati
Jumlah 21099

TOTAL P. 01

KABUPATEN ACEH TENGAH			
a.	Peserta		
NO	NAMA	LEMBAGA	ALAMAT
1	Arlaina	PHRI	Jl. Sentosa
2	Dra. Rahmani	Dekopin	Kebayakan
3	Hasanah	Lapenkop	Jl. Sengeda
4	Hasrah	IBI	Baleatu
5	Ida Laila	YPT.Gajah Putih	Jl. Yos Sudarso
6	Inayah M. Saleh R, S.Ag	Fatayat NU	Pinangan
7	Islamiati	ICMI	Jl. Lebe Kader-Tkn
8	Karmini	CU. Mulia Sari	Simpang Baleq
9	Kemalawati	Yayasan Amanah	Lemah
11	Maryati,	AI Wasliyah	Jl. Yos Sudarso
12	Ratnawati	CU. HWK	Bies Penantanan
13	Selamah Inen Hudnah	CU. Damaran	Bandar lampahan
14	Siti Djeriah	Muslimat NU	Pinangan
15	Sofiah	Dewan Masjid	Jl. Lebe Kader-Tkn
16	Sri Bulkisi	Muslimat MUI	Jl. Lebe Kader-Tkn
17	Sri Iriani	BK3D Aceh	Blang Kolak I
18	Sri Wati	CU. Burbiah	Jl. Lebe Kader-Tkn
19	Suparti Yusri, SKM	CU. Sumber Makmur	Tebes Lues
20	Yusmerida	CU. Belkosa	Blang Kolak I
21	Zuraidah	Nasyiatul Aisyiah	Kemili
22	Samsidar	YPW	Takengon
23			

b.	Peninjau		
1	Mahfudhah, SH	Pengacara	Asir-Asir
2	Marlia, Is	Pedagang	Takengon
3			
4			
5			
	Peserta		22
	Peninjau		2
	Jumlah		24
KABUPATEN ACEH TENGGARA			
A.	Peserta		
NO	NAMA	LEMBAGA	ALAMAT
1	Hj. Melur Daudy	Aisyiah	Ds. Terandam
2	Sri Kartini, SH. M. Hum	GKJI	Mangga Dua-Kutacane
3	Raudiah Karni	PBB	Ds. Bakti
4	Khuzaimah Husny	Pompes	Ds. Bakti

5	Umi Kalsum	RM. Pulo latong	Mesjid Pulo Latong
6	Yuni Sari	Formisa	Bambel-Kutacane
7	Munawarah	RM Taqwa	Pulo Nas-Kutacane
8	Bahagiawati, S. Pd	KNPI	Prapat Hulu-Kutacane
9	Radiah, SAg	Koperwan	Ds. Lawe Rutung
10	Sariah Kaman	BKMT	Mbarung-Kutacane
11	Nurbaiti	PKK Kec.	Mangga Dua-Kutacane
12	Hj. Nurhayati Saleh	GOW	Asrama Pemda-Kutacane
13	Handayani, MA	Gema Kosgoro	P. Hulu-Kutacane
14	Nurullah	RM. Pulo nas	Pulo Nas-Kutacane
15	Abiah	IBI	Purwodadi-Kutacane
16	Hj. Farida, SPd	PGRl	Kutacane
17	Saenahariati	PPI (Petani Ikan)	Pulo Nas-Kutacane
18	Dra. Fajar Ahmad	PKK Kabupaten	Kutacane
19	Ny. Bahagia	HWK	Kutacane
b. Peninjau			
NO	NAMA	LEMBAGA	ALAMAT
1	Hayatun	Ibu RT	Pulo Nas-Kutacane
2	Murni Aty Siahaan	Tani	Pulo Kemiri-Kutacane
3	Aswita	dagang	Pulo Nas-Kutacane
4	Normawati	Politikus	Kutacane
5	Dewi Suhel	Budaya	Purwodadi-Kutacane
	Peserta		19
	Peninjau		5
	Jumlah		24
KABUPATEN ACEH TIMUR			
A.	Peserta		
NO	NAMA	LEMBAGA	ALAMAT
1	Agusnidar Ishak	PIPPRA	Langsa
2	Alawiyah	Wanita Amanat	Langsa
3	Cut Aminah	PKK Ranto Selamat	Ranto Selamat
4	Cut Bidasari	PKK Langsa	Langsa
5	Cut Mardiana	Pengajian Matang Seulimeng	Langsa
6	Dra. Zuhra	Aisyah	Langsa
7	Hafsah, SH	LHB Bening	Langsa
8	Hamidah	PKK Peurelak	Peurelak
9	Hj. Fauziah	Pengajian Al Hidayah	Langsa
10	Hj. Nurhasanah	Pengajian Al Wasilyah	Langsa
11	Ir. Nafisah	RM. Baitul manan	Idi
12	Maria Uffa	Dema STAI Zawiyah	Cot kala
13	Mariana	LSM YCA	Langsa
14	Nona Bahari	PWI Aceh Timur	Langsa
15	Nurhayati	GOW A. Timur	Langsa
16	Nurlely	PKK Kabupaten	Langsa
17	Ny. Agusni Nabhani	Sanggar Pinto Aceh	Langsa
18	Ny. Suprpti	WPI	Langsa
19	Ny. Yuniar Chaidir	AMPI Aceh Timur	Langsa
20	Syarifah Rohana	Pengajian Kp. Jawa	Langsa
21	Roslina Amir	GOW A. Timur	Langsa
22	Sayatul Nuzul	Pompes Darussa'adah	Idi Cut

23 Siti Maryam	Formapak	Langsa
24 Susilawati	Yayasan Pilar Bangsa	Langsa
25 Zainab AR, BA	Majelis Taqim	Langsa
26 Nur Asiah	PCRJ	Langsa
27 Nurhayaton	HWK Aceh Timur	langsa
28 Nurmi M. Ali	Pemraka	Peurelak
29 Ny. Rawiyah	Wanita MKGR	Julok
30 Syaribanun	Pengajian Paya Mauligo	Peurelak
31 Khadjah Adam	Peng. Alue Bu Tuha	Peurelak
32 Normawati	PKK Kec	Langsa Barat
33 Cut Shafiah	Peng. Seunebok Tengoh	Ranto Peurelak
34 Cut Amilul Fuadi	Peng. Seunebok Teupin	Ranto Peurelak
35 Syamsidar	SPSI	langsa
36 Aniyah	Peng. Matang Rayeuk	Peurelak
37 Sakdiah, Sag	pengajian Geudebang	Langsa
38 H.J. Fitri	IHAT	Langsa

b.	Peninjau		
NO	NAMA	LEMBAGA	ALAMAT
1	Cut Elidar, SH	Dosen	Langsa
2	Wardiana, SE	PPL	Langsa
3	Dra. Balqis	PNS	Langsa
4	Fitriani	mahasiswa	peurelak
5	Ny. Asmiati	Ibu Rumah Tangga	Langsa
	Peserta		38
	Peninjau		5
	Jumlah		43

Aceh Utara

Peserta diuk pakat inong aceh 20 - 22 februari 2000

No	Nama	Berasal dari lembaga	Keterangan
1.	Zubaidah Ismi	GOW	Peserta
2.	Syarifah Marheini	Pkk Mongeudong	Peserta
3.	Juriani	Yabda	Peserta
4.	Azriana	Madika	Peserta
5.	Dra.Nurhayati AY	Camat Kepwil Banda Sakti	Peninjau
6.	Aminah May	Nurul Ma'arif	Peserta
7.	Sumarni	Ikatan Keluarga Ibu-ibu Bumiputera	Peserta
8.	Rosniati	Pengajian BIIJ	Peserta
9.	Rohani	Pengajian Perempuan Desa Paya Gaboh	Peserta
10.	Khairul Hasni	Relawan Perempuan Untuk Kemajuan	Peserta
11.	Irwani	Kelompok Guru Pengajian Keude Aceh	Peserta
12.	Juwairiah	Kelompok Pengajian Hidayatul	Peserta
13.	Nurlela	Kelompok Ibu PKK Genaliraya	Peserta
14.	Ibu Tutu	Kelompok Tapanuli	Peserta
15.	Dra. Sukmawati	Kelompok Nahdlatul Aisyah	Peserta
16.	Nurmala	Kelompok Pengajian perempuan Desa Keudep	Peserta
17.	Faridah	Ikatan Persaudaraan Banten Lhoksukon	Peserta
18.	Rosnidar A.Ma.PD	Aisyah Lhoksukon	Peserta
19.	Rosniyah	PGR	Peserta
20.	Nurhidayah Rukiyah Yusuf	Kelompok Pengajian Perempuan Desa Ke Lhoksukon Sa Muc. Dayah	Peserta
21.	Faridah Hanum	Kohati Lhokseumawe	Peserta
22.	Inong Sri Mahanum	Keputrian BEM Unima	Peserta
23.	Nurjubah	Forjodom	Pendamping peserta
24.	Dawiyah	Aisyah Lhokseumawe	Peserta
25.	Badriah	Perempuan Pedagog	Peninjau
26.	Faniah	Ibu Rumah Tangga	Peninjau
27.	Nurhayati	Kelompok Perempuan Petani	Peserta
28.	Mariati	Kelompok Perempuan Peternak	Peserta
29.	Siti Mu'minah AR	Pengajian wirt Lancang garam	Peserta
30.	Ibu Dewiana	Kelompok Perempuan Pengajar	Peserta
31.	Mariati,SH	Pengacara	Peninjau
32.	Ainul Mardiah	Kelompok Perempuan Pedagog	Peserta
33.	Nuraini	Forjodom	Peserta
34.	Maulidar	BKMT Lhokseumawe	Peserta
35.	Sugito Tasan	Panitia/Media	
36.	Zulfira	Panitia/korlap	
37.	Zahara Daham	Panitia/korlap	
38.	Dewi Kemalasari	Panitia/korlap	

KODYA. BANDA ACEH

A. Peserta

NO NAMA

LEMBAGA

ALAMAT

√ 1 Amna Yusra	Al. Hidayah	Jl. Setia Geuce Komplek
√ 2 Asiah	BSPD Unsiahy	Jl. Tj. Slamet 3
√ 3 Cut Intan Salasiah	UKM-Keputrian IAIN	Jl. Teladan Darul Imarah
* 4 Cut Nurasikin	PHRI	Jl. Sisingamangaraja
√ 5 Cut trisnawaty	ISIKI	Jl. T. Nyak Arief 175
√ 6 Dra. Aminah Ahmad	Alisa Khadijah ICMI Orwil Aceh	Jl. Jeumpa Darussalam
√ 7 Dra. Fachriati, MM	IPBI	Darul Imarah
√ 8 Dra. Naimah Hasan, MA	BKOW	Darussalam
√ 9 Dra. Nurhayati Ibrahim	Aisyiah Banda Aceh	Lr. Kenari-Prada Utama
√ 10 Dra. Raihan Putry	Angkatan Putri Alwasliyah	Darussalam
√ 11 Dra. Salmiah Jamil	Wanita Islam	Jl. Sumber Alam-Lambaru
√ 12 Dra. Yusnani Mahmud MPd	YPAJB	Jl. Melati-Kp. Kramat
√ 13 Fauziah Hanum	KB. PII	Jl. Malikul Saleh Lampinen
√ 14 Hafnidar	SMIPA	Lampulo
√ 15 Hastati Hasan	Nasyiatul Aisyiah Aceh	Jl. T. Umar-Stui
√ 16 Hj. Syarifah Fariad	Muslimat NU Aceh	Banda Aceh
√ 17 Hj. Zinnah Wildan Jamaluddin	Perempuan Amanat	Jl. Sudirman-Ketapang
√ 18 Nursiti, SH	KKTGA	Lampineung
√ 19 Maryati B, SH, MH	Yadesa	Sektor Timur Darussalam
√ 20 Nadiatul Hikmah	PII Wati	Jl. Jempe Puteh-Punge
√ 21 Naimah Lampoh	PKK Lam Jame	Jl. Utama-Lamjame
√ 22 Nuraini, K	Wanita Kosgoro TK. I	Perum Kajhu Indah
√ 23 Nurhasdiana	Yayasan Matahari	Jl. T. Panglima Polem
√ 24 HJ. Siti Wildaniar, SH	LKBHuWK	Banda Aceh
√ 25 Reihan	Kohati Cab. Banda Aceh	Sektor Selatan Darussalar
√ 26 Rismawati	PCC Aceh	Sektor Barat Darussalam
√ 27 Rosmawardani Muhammad	MT. IPHI	Jl. hamzah fansuri darussa
√ 28 Rukalyah Ibrahim Naim	Fatayat NU	Jl. Cumi-Cumi Lampriet
√ 29 Salwa Hayati Hasan	RM. Baiturrahman	Jl. Mesjid Raya-Taman Sai
√ 30 Suraiya Kamaruzzaman	Flower Aceh	Jl. Gabus-Lampriet
√ 31 Syarifah Rahmatillah	Mispi	Neusu
√ 32 Intan Cahyani Rahmah	Dara Lajuna	Lampaseh
√ 33 Nurkamisah	Industri Sosial RT	Punge Biang Cut
√ 34 Asmawati, S Ag	Forum Darussalam	Darussalam

B. Peninjau

Wiraswasta

Lamteumen Barat

1 Dra. H. hafnidar	Pos KB	Lam Jame Ulele
2 Zulmi Hakim	Guru	Jl. Melati-Kel. Kramat
3 Mursidah Ibrahim	karyawati	Jl. T. Syarif
4 Rita Susana, Amd		

KABUPATEN ACEH BARAT

A. PESERTA

NO	NAMA	LEMBAGA	ALAMAT
1	Hj. Nuraini Zulkarnaen	GOW A. Barat	Meulaboh
2	Cut baheram	Diveri	Meulaboh
3	Hj. Sitti hajar	majelis Taklim	Meulaboh
4	Hj. Surya Darma	Muslimat Hipm	Meulaboh
5	Hj. Mariani Tanjung	Aisyiah	Meulaboh
6	Dra. Rukayah	Aisyiah	Meulaboh
7	Fauziah, BA	Ndt. Asyiah	Meulaboh

8 Suarni, S Ag	Ndt. Asyiah	Meulaboh
9 Rosni Idham	Wanita PAN	Meulaboh
10 Dasni Husin	Kagempar	Meulaboh
11 Agusni	Papan	Meulaboh
12 Dewi usriati, SE	Yakomda	Meulaboh
13 Armawati	HMI	Meulaboh
14 Emirina	PT. Aceh Barat	Meulaboh
15 Eva Nurlaila SE	PMII	Meulaboh
16 Rohani	Kel. Kesenian	Kr. Sabee
17 Hasanah	Kel. Industri	Samatiga
18 Hamidah Ali	Kel. Tani	Samatiga
19 Fatimah Zuhri	PKK	Sampoinit
20 Cut Adja Daniar	HWK	Meulaboh
21 Syarifah Munawarah	Pengajian	Meulaboh
22 Hurriyati, S Ag	peng. Ummahat	Meulaboh
23 Dra. Maimanah	Kahmi Wati	Meulaboh
24 Rauzah	PKK	Darul Makmur
25 Cut Surya Dewi	Muslimat Alwasliyah	Darul Makmur
26 Cut Mulyana	PKK	Kuala
27 Kamariah Nur	kel. Kerajinan	Meulaboh
28 Asmawati	Fatayat	Meulaboh
29 Dra. Syarifah Asra	Al-Hidayah	Meulaboh
30 ENI	IBI	Meulaboh
31 Nafsiyah	Muslimat NU	Meulaboh
32 Cut Padang	Sanggar Pocut Baren	Meulaboh
33		

B. Peninjau

NO	NAMA	LEMBAGA	ALAMAT
1	Nasyiar Pirus	Sesepuh	Meulaboh
2	Cut Mega Putri Ama	Ibu Rumah tangga	Meulaboh
3	Raznur Wati Joesah	Ibu Rumah tangga	Meulaboh

KODYA SABANG

a. Peserta

NO	NAMA	LEMBAGA	ALAMAT
1	Ainal Mardhiah	PKK	Jl. Tinjau Alam Sabang
2	Sakya Dewi	IBI	Komp. RSU Sabang
3	Mariani Husin	HWK	Komp.BTN Cot Ba'U

b. Peninjau

NO	NAMA	LEMBAGA	ALAMAT
1	Cut Nuraini	Ibu Rumah Tangga	Jl. Sultan hasanuddin
2	Dra. Nurhanizar	Guru	Komp. BTN le Meule
3	Hj. Nurhayati	Pengusaha	Jl. Prof. HM.Yamin
4	Mawarni	Politikus/Anggota DPRD	Kota Bawah Barat
5	Seniwati, SH	Pengacara	Komp. PSB Sabang

Apendiks II Daftar Peserta DPIA II

FORM KONFIRMASI PESERTA WORKSHOP DPIA

No	Kabupaten/Kota	No	Nama peserta	Tempat & tanggal lahir	Usia	Alamat	No. telepon	Tanggal konfirmasi
1	Banda Aceh	1	Gheryanisa		Catua Babai Hong Tex, Chik Lajabhat	A. Noring Hong, Surian, Banda Aceh	085238004200	3/15/2021
		2	Orti, Diah Pitti Handayani		Identitas Bolee leong Tik, Chik Lajabhat	I. Pandellian, Dusun Blang, Lajabhat, Banda Aceh	09136359545	3/15/2021
		3	Arisari					
		4	Rizkiyah					
		5	Isa Alwanadiah					
2	Aceh Besar	6	Dra. Saibaniyati Usdang		Desa NISUVA, Bontol, Aceh			3/15/2021
		7	Rahmawati, S. Pd		Pendawa, BOWA, Aceh			3/15/2021
		8	Satrio		Pengatus PULU A, Bontol			3/15/2021
		9	Suzuki Alinda		Pengatus SUI A, Bontol			3/15/2021
		10	Dra. Saibaniyati		Pengatus SUI A, Bontol			3/15/2021
		11	Fitriani		Pengatus, Mahanadiah A, Bontol			3/15/2021
		12	Tia, Lajabhat		PND			3/15/2021
		13	Syafiq Adhikari		Ulara Syarif, Ulara			3/15/2021
		14	Arini		PNK			3/15/2021
		15	Cat Jaya		Merah			3/15/2021
3	Pidie	16	Agatha Rumsana		Pada A. Bontol			3/15/2021
		17	Rahmawati		Pada A. Bontol			3/15/2021
		18	Rahmawati		Pada A. Bontol			3/15/2021
		19	Yusuf, A. Pd		Korap, Pidie		08523714541	3/15/2021
		20	Indah		Pada			3/15/2021
4	Pidie Jaya	21	Muhammad		Pada			3/15/2021
		22	Muhammad		Pada			3/15/2021
		23	Selvia		Pada			3/15/2021
		24	Cat Hidayat		Pada			3/15/2021
		25	Tiga Nuri		Pada			3/15/2021
5	Bireu	26	Indah		Pada		08523714541	3/15/2021

4	Pidie Jaya	27	Khadiah	Korap, Pidie Jaya, 22-4-1982	Indah	Korap, Pidie Jaya, 22-4-1982	08523714541	3/15/2021
		28	Mariati	Korap, 22-4-1982	Pada	Pada	08523714541	3/15/2021
		29	Dra. Nuzul	Korap, 22-4-1982	Pada	Pada	08523714541	3/15/2021
		30	Zuhairah	Korap, 22-4-1982	Pada	Pada	08523714541	3/15/2021
		31	Indah, H.M.Nur	Korap, 22-4-1982	Pada	Pada	08523714541	3/15/2021
		32	Rahmawati, S.M	Korap, 22-4-1982	Pada	Pada	08523714541	3/15/2021
		33	Dra. H. Redina	Korap, 22-4-1982	Pada	Pada	08523714541	3/15/2021
		34	Dra. Auliya, M.M	Korap, 22-4-1982	Pada	Pada	08523714541	3/15/2021
		35	Maria, H.M. SE	Korap, 22-4-1982	Pada	Pada	08523714541	3/15/2021
		36	Fani Mulyati	Korap, 22-4-1982	Pada	Pada	08523714541	3/15/2021
		37	Dra. Rahmawati, S.M	Korap, 22-4-1982	Pada	Pada	08523714541	3/15/2021
		38	Dra. H. Rier Analla	Korap, 22-4-1982	Pada	Pada	08523714541	3/15/2021
		39	H. Adik	Korap, 22-4-1982	Pada	Pada	08523714541	3/15/2021
		40	H. Retno Dewi	Korap, 22-4-1982	Pada	Pada	08523714541	3/15/2021
		41	Mika Alimdar	Korap, 22-4-1982	Pada	Pada	08523714541	3/15/2021
5	Bireu	42	Arif, Cat Rita Nurita	Korap, 22-4-1982	Pada	Pada	08523714541	3/15/2021
		43	Arif, Cat Rita Nurita	Korap, 22-4-1982	Pada	Pada	08523714541	3/15/2021
		44	Arif, Cat Rita Nurita	Korap, 22-4-1982	Pada	Pada	08523714541	3/15/2021
		45	Arif, Cat Rita Nurita	Korap, 22-4-1982	Pada	Pada	08523714541	3/15/2021
		46	Arif, Cat Rita Nurita	Korap, 22-4-1982	Pada	Pada	08523714541	3/15/2021
		47	Arif, Cat Rita Nurita	Korap, 22-4-1982	Pada	Pada	08523714541	3/15/2021
		48	Arif, Cat Rita Nurita	Korap, 22-4-1982	Pada	Pada	08523714541	3/15/2021
		49	Arif, Cat Rita Nurita	Korap, 22-4-1982	Pada	Pada	08523714541	3/15/2021
		50	Arif, Cat Rita Nurita	Korap, 22-4-1982	Pada	Pada	08523714541	3/15/2021
		51	Arif, Cat Rita Nurita	Korap, 22-4-1982	Pada	Pada	08523714541	3/15/2021

6	Bener Meriah	54	Lunda						8/16/2011
		55	Pomowaci						8/16/2011
		56	Isakanti						8/16/2011
		57	Maulidjati						8/16/2011
		58	Stk Alqah						8/16/2011
		59	Rahmadi						8/16/2011
		60	Wan Asmari						8/16/2011
7	Aceh Tengah	61	Rahaida						8/16/2011
		62	H. Mike Sotso Hakim						8/16/2011
		63	Erwanati						8/16/2011
		64	Hesi Januari	Kuala Simpang, 3-1-1968	Bu Rumah Tanza/ Koriah Aceh Tengah	Tebesen - Takengon	0836067642		8/16/2011
		65	Asnadi	Takengon, 24-1-1971	Sevubi Perempuan	Kp. Peppang - Takengon			8/16/2011
		66	Amra Zalfa	Takengon, 20-3-1969	Alasemay/Emas	Aspel - Takengon			8/16/2011
		67	Haniyah	Takengon, 18-4-1967	Pengusaha Ratus EPD Aceh Tengah	Kelurahan - Takengon			8/16/2011
8	Gayo Lues	68	Arifima	Takengon, 12-11-1968	Pengusaha Perempuan	Simpang Tiri - Takengon			8/16/2011
		69	Hassarah	Takengon, 4-12-1980	Pura legal	W/H Peom - Takengon			8/16/2011
		70	Zuraida		Organisasi	Takengon			8/16/2011
		71	Artiana		Anggota Legislatif				8/16/2011
		72	Siti Zulfari		Ukuk Perempuan				8/16/2011
		73	Sri Mulia		Anggota Takapusi				8/16/2011
		74	Eny Erisa		Anggota PKK				8/16/2011
9	Aceh Tenggara	75	Erizawati						8/16/2011
		76	Arina Munida		Profes/Pengusaha Perempuan				8/16/2011
		77	Huriala		PRPM Musudi				8/16/2011
		78	Endang Fello		Anggota Legislatif				8/16/2011
		79	Arifati Fihri						8/16/2011
		80	Ruhai Hayati						8/16/2011
		81	Ruhalis, S Ag						8/16/2011
10	Aceh Tamiang	82	Rohana						8/16/2011
		83	Nurhid, S.Fid						8/16/2011
		84	Hj. Sri Hastawati, Lc, Mhu	Kuntaw, 20-12-1974	Surup	Bukit Bara, kec. Kutaraja Meda, Aceh Tamiang	08316219858		3/3/2011
		85	Hj. Nuriani, S Ag	T. Cut, 6-10-1974	Ilirna	T. Cut, Kec. Manyak Poyed, Aceh Tamiang	08632687218		3/3/2011
		86	Hj. Ida Emayani, S.Sos	Jakarta, 25-3-1962	Profesi	Pura Bati, kec. Rantau, Aceh Tamiang	08516282577		3/3/2011
		87	Nurzaifah, S. Pd.	Pulau Tiga, 6-4-1973	petani	Pulau Tiga, kec. Tamiang Hulu, Aceh Tamiang	08527040181		3/3/2011
		88	Sri Ramayani, S.Md	Rantau, 6-6-1968	Mahasiswa	Rantau, Kec. Rantau, Aceh Tamiang	08570111413		3/3/2011
11	Kuta Langsa	89	Noraidheria, Amd	Kuala Simpang, 12-6-1976	Anggota Legislatif	Kuala Simpang, Kec. Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang	08516285400		3/3/2011
		90	Dewi Filisatigis, S Ag	Kuta Brigi, 25-1-1977	Gantor PP	Desa Ika Jati, Kec. Karang Bara, Aceh Tamiang	08117746513		3/8/2011

11	Kuta Langsa	91	Pegadon		Anggota Legislatif				
		92	Mardika		Anggota Legislatif				
		93	Putriyanti, Lc, Mhu	Jambi Raya, 20-3-1968	Prosa				
		94	Putriyanti, S.Pd	Medan, 28-6-1965	Orasi Mendangbaya Perempuan B		08334400222		3/10/2011
		95	Putriyanti, S.Pd	A. Bati, 19-4-1962	Stasiun Keras		08334400222		3/10/2011
		96	Putriyanti, S.Pd	Langsa, 16-6-1961	S.M Aceh Pro Langsa		08334400222		3/10/2011
		97	Putriyanti, S.Pd	Langsa, 1-4-1969	Putriyanti		08334400222		3/10/2011
12	Aceh Timur	98	Putriyanti, S.Pd	Langsa, 1-4-1969	Putriyanti		08334400222		3/10/2011
		99	Putriyanti, S.Pd	Langsa, 1-4-1969	Putriyanti		08334400222		3/10/2011
		100	Putriyanti, S.Pd	Langsa, 1-4-1969	Putriyanti		08334400222		3/10/2011
		101	Putriyanti, S.Pd	Langsa, 1-4-1969	Putriyanti		08334400222		3/10/2011
		102	Putriyanti, S.Pd	Langsa, 1-4-1969	Putriyanti		08334400222		3/10/2011
		103	Putriyanti, S.Pd	Langsa, 1-4-1969	Putriyanti		08334400222		3/10/2011
		104	Putriyanti, S.Pd	Langsa, 1-4-1969	Putriyanti		08334400222		3/10/2011
13	Aceh Utara	105	Putriyanti, S.Pd	Langsa, 1-4-1969	Putriyanti		08334400222		3/10/2011
		106	Putriyanti, S.Pd	Langsa, 1-4-1969	Putriyanti		08334400222		3/10/2011
		107	Putriyanti, S.Pd	Langsa, 1-4-1969	Putriyanti		08334400222		3/10/2011
		108	Putriyanti, S.Pd	Langsa, 1-4-1969	Putriyanti		08334400222		3/10/2011
		109	Putriyanti, S.Pd	Langsa, 1-4-1969	Putriyanti		08334400222		3/10/2011
		110	Putriyanti, S.Pd	Langsa, 1-4-1969	Putriyanti		08334400222		3/10/2011
		111	Putriyanti, S.Pd	Langsa, 1-4-1969	Putriyanti		08334400222		3/10/2011
14	Uluksaunwe	112	Putriyanti, S.Pd	Langsa, 1-4-1969	Putriyanti		08334400222		3/10/2011
		113	Putriyanti, S.Pd	Langsa, 1-4-1969	Putriyanti		08334400222		3/10/2011
		114	Putriyanti, S.Pd	Langsa, 1-4-1969	Putriyanti		08334400222		3/10/2011
		115	Putriyanti, S.Pd	Langsa, 1-4-1969	Putriyanti		08334400222		3/10/2011
		116	Putriyanti, S.Pd	Langsa, 1-4-1969	Putriyanti		08334400222		3/10/2011
		117	Putriyanti, S.Pd	Langsa, 1-4-1969	Putriyanti		08334400222		3/10/2011
		118	Putriyanti, S.Pd	Langsa, 1-4-1969	Putriyanti		08334400222		3/10/2011

15	Aceh Jaya	123	Fitriah Zukha	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Peningkatan Anak dan Keluarga Sejahtera Kota Lhokseumawe		081477480		
		124	Daemrosah	Tenora, 3-7-1965	Ormas dan Aktivis Kampung	Desa Datar Luas, Kec. Krueng Saba, Aceh Jaya	08140216540	3/10/2011
		125	Nurwati	Panta Harya, 6-6-1974	Aktivis Kampung	J. Desa Bata Timor, Kec. Saba Bakti, Aceh Jaya	08177884791	3/10/2011
		126	Acidah	Alunjang, 1-7-1977	Ibu Rumah Tangga	J. Desa Irai Jawang, Kec. Tanjung, Aceh Jaya	08527040549	3/10/2011
		127	Nurani	Bak Poch, 17-10-1981	Guru	J. Desa Kari Pate, Lingsa, Aceh Jaya	08140003121	3/10/2011
		128	Rahmawati	Mata K. 11-10-1975	Ormas	J. Desa Mata K. Kec. Kompoten, Aceh Jaya	08530298956	3/10/2011
		129	Nelly Fauziana, SH		Gabid Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan	Badan Pemberdayaan Musyawarah Perempuan dan Keluarga Sejahtera - Aceh Jaya	08156005003	
		130	Udani Hagi, S.Ag		Pengurus Bala Syura		08519062111	
		131	Ena Maimunah		Pengurus Bala Syura			
		132	Fitriah		Pengurus Bala Syura			
16	Aceh Barat	133	Umi Hartati		Jajang Pengusaha			
		134	Rahmawati		Anggota Legislatif			
		135	Fitriah Hani, SH		Ketua PP			
		136	Fitriah Hani		Tokoh perempuan			
		137	Fitriah Hani		GOV			
		138	Fitriah Hani		Tukang			
		139	Fitriah Hani		Alumni			
		140	Fitriah Hani		Alumni			
		141	Fitriah Hani		Ibu Rumah Tangga/Korban Tsunami			
		142	Fitriah Hani	Simbang, 9-10-1963	Berita Nagan Raya	Desa Aluehwa, Kec. Seuteng, Nagan Raya	08136386324	
17	Nagan Raya	143	Fitriah Sani	1/5/1970	Ibu Rumah Tangga	Desa Aluehwa, Kec. Seuteng, Nagan Raya	08145107790	
		144	Fitriah	7/12/1970	Petani	Desa Padang, Kec. Seuteng, Nagan Raya	08136310894	
		145	Enah	8/4/1970	Petani	Desa Sawang Mene, Kec. Seuteng, Nagan Raya	08137717407	
		146	Aur Elidar	1/2/1974	Petani	Desa Padang, Kec. Seuteng, Nagan Raya		
		147	Nasrah		Anggota Legislatif			
		148	Bahwan Rusli, S.Ag					1/1/2011
		149	Fitriah Yetti, ST					1/1/2011
		150	Lon Mulyati					3/1/2011
		151	Mardison, S.Pd					1/1/2011
		152	Sartini					3/2/2011
18	Aceh Barat Daya	153	Fitriah Sani					
		154	Fitriah Sani					
		155	Fitriah Sani					
		156	Fitriah Sani					
		157	Fitriah Sani					
		158	Fitriah Sani					
		159	Fitriah Sani					
		160	Fitriah Sani					
		161	Fitriah Sani					
		162	Fitriah Sani					

19	Aceh Selatan	153	Muslimah	A. Setelan, 10-9-1971	Ketua BUKA A. Setelan dan pengurus pengantar	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		154	Sania	A. Setelan, 25-7-1964	Anggota BUKA A. Setelan dan Ketua Pengantar	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		155	Yusuf	A. Setelan, 16-6-1976	Anggota BUKA A. Setelan dan Ketua Pengantar	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		156	Latifa	Kluet Tengah, 11-4-1968	Pengantar Komunitas	Jl. Koro Indrag - Kluet Tengah	08137960452	3/10/2011
		157	Army		Kelembagaan	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		158	Cuti Rasmala Dewi	Uluh Tawar Sawang, 4-9-1967	Guru honor dan ketua Tiap Pengantar	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		159	Selfi		Pengantar komunitas	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		160	Fitriah	Manggawati, 28-3-1975	Pengantar komunitas dan guru TK	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		161	Fitriah	Sawang, 12-6-1975	Ketua pemuda-pemuda masyarakat desa Kluet	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		162	Fitriah		Ketua pemuda-pemuda masyarakat desa Kluet	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
20	Subulussalam	163	Fitriah		Ketua pemuda-pemuda masyarakat desa Kluet	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		164	Fitriah		Ketua pemuda-pemuda masyarakat desa Kluet	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		165	Fitriah		Ketua pemuda-pemuda masyarakat desa Kluet	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		166	Fitriah		Ketua pemuda-pemuda masyarakat desa Kluet	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		167	Fitriah		Ketua pemuda-pemuda masyarakat desa Kluet	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		168	Fitriah		Ketua pemuda-pemuda masyarakat desa Kluet	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		169	Fitriah		Ketua pemuda-pemuda masyarakat desa Kluet	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		170	Fitriah		Ketua pemuda-pemuda masyarakat desa Kluet	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		171	Fitriah		Ketua pemuda-pemuda masyarakat desa Kluet	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		172	Fitriah		Ketua pemuda-pemuda masyarakat desa Kluet	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
21	Singkil	173	Fitriah		Ketua pemuda-pemuda masyarakat desa Kluet	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		174	Fitriah		Ketua pemuda-pemuda masyarakat desa Kluet	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		175	Fitriah		Ketua pemuda-pemuda masyarakat desa Kluet	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		176	Fitriah		Ketua pemuda-pemuda masyarakat desa Kluet	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		177	Fitriah		Ketua pemuda-pemuda masyarakat desa Kluet	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		178	Fitriah		Ketua pemuda-pemuda masyarakat desa Kluet	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		179	Fitriah		Ketua pemuda-pemuda masyarakat desa Kluet	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		180	Fitriah		Ketua pemuda-pemuda masyarakat desa Kluet	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		181	Fitriah		Ketua pemuda-pemuda masyarakat desa Kluet	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		182	Fitriah		Ketua pemuda-pemuda masyarakat desa Kluet	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
22	Simeulue	183	Fitriah		Ketua pemuda-pemuda masyarakat desa Kluet	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		184	Fitriah		Ketua pemuda-pemuda masyarakat desa Kluet	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		185	Fitriah		Ketua pemuda-pemuda masyarakat desa Kluet	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		186	Fitriah		Ketua pemuda-pemuda masyarakat desa Kluet	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		187	Fitriah		Ketua pemuda-pemuda masyarakat desa Kluet	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		188	Fitriah		Ketua pemuda-pemuda masyarakat desa Kluet	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		189	Fitriah		Ketua pemuda-pemuda masyarakat desa Kluet	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		190	Fitriah		Ketua pemuda-pemuda masyarakat desa Kluet	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		191	Fitriah		Ketua pemuda-pemuda masyarakat desa Kluet	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011
		192	Fitriah		Ketua pemuda-pemuda masyarakat desa Kluet	Jl. T. Etni Mahmud - Gunung Kerinci, Aceh Selatan	08137960452	3/10/2011

23 Sabang	183	Iring Perikanti	Anggota KKKU Sabang/Partai PKB			
	184	Rakirig	Anggota KKKU Sabang/Partai			
	185	Salmati	Anggota KKKU Sabang/Kluban Mubtahir			
	186	Mawardi	Anggota KKKU Sabang/Himpunan Wanita			
	187	Muharini	Anggota KKKU Sabang/Anggota			
	188	Pati	Perempuan Mubtahir			
	189	NurQany	PP Sabang			
	190	Tamir Mordiah, S.Sos	PP Sabang			08511744308
	191	Fachriah, S. Mhs	PP Sabang			081160416644
	192	Safyanti Alfara, Sh	Anggota Linggati			

Bineun	181	Khairunnisa	085260385336	Iring Bakir/Perempuan Aceh
Sigi	184	Fatmali	08120940663	Iring Bakir/Perempuan Aceh
Langsa	185	Lita Jambati		
Aceh Timur	187	Fachriah	08524805000	
Aceh Utara	188	Rur Mulyati	08517948835	
Ukheumoum	189	Ayukh	08527582726	
A. Tengah	190	Mahmud	08577788378	
Bandar Marat	191	Rudali		
	192	Mubtahir		

Apendiks III Daftar Peserta DPIA III**Kabupaten/Kota Banda Aceh**

NO	NAMA
1	Khayanisah
2	Drh. Diah Fitri Handayani
3	Ainun
4	Rasyidah
5	Cut Darnita
6	Ita Mawaddah

Kabupaten/Kota Pidie

NO	NAMA
1	Yusrawati, A.Md
2	Islamiah
3	Nursa'adh
4	Mardhiah
5	Salubiah
6	Syamsiah

Kabupaten/Kota Aceh Besar

NO	NAMA
1	Dra. Samawati bintang
2	Rahmawati, S.Pd
3	Kartini
4	Saidah Afrida
5	Dra. Salbiah
6	Purwati
7	Dra. Faizah
8	Suryati Abdullah
9	Jasmani
10	Cut Asni
11	Aprida Purnama
12	Kemalawati
13	Ruhaimi
14	Nani
15	Idawati
16	Zuhra
17	Raliah
18	Fazriah

Kabupaten/Kota Pidie Jaya

NO	NAMA
1	Marwiyah
2	Khalidah
3	Mariani
4	Dra. Aisyah
5	Zubaidah
6	Lindawati, H.M.Nur
7	Rustina, SKM

Kabupaten/Kota Bireuen

NO	NAMA
1	Arwita
2	Tgk. Nurhayati
3	Cut Salfiana
4	Anisah
5	Desi Saifan
6	Muazzinah, B.Sc
7	Nurathiah, S.Pd
8	Asma AR

Kabupaten/Kota Bener Meriah

NO	NAMA
1	Linda
2	Rosmawati
3	Julianti
4	Maulidani
5	Siti Aisyah
6	Juryani
7	Wan Jasmani
8	Ruhaida
9	Hj. Mike Sketsa Hakim
10	Ernawati
11	Yusdarita

Kabupaten/Kota Aceh Tengah

NO	NAMA
1	Heni Januatri
2	Asnaini
3	Amna Zalifa
4	Hamidah
5	Jurisma
6	Hasanah
7	Zuraida

Kabupaten/Kota Gayo Lues

NO	NAMA
1	Siti Zuraida
2	Sri Muliani
3	Dra. Erlina
4	Erlinawati
5	Hj. Rohana
6	Nurlela

Kabupaten/Kota Aceh Tenggara

NO	NAMA
1	Erdarina Pelis
2	Aryanti Pinem
3	Radiah, S.Ag
4	Rohana
5	Nuraini, S.Pdi

Kabupaten/Kota Langsa

NO	NAMA
1	Nursyamsiah
2	Sri Verawati, SH
3	Mardiati, SH
4	Fitriani Harun
5	Fatimah
6	Ratih Dwi Handayani

Kabupaten/Kota Aceh Tamiang

NO	NAMA
1	Hj. Sri Hidayanti,Lc,Msi
2	Hj. Nur'aini, S.Ag
3	Hj. Ida Ermayani, S.Sos
4	Nurazimah, S.Pd.I
5	Sri Ramayani, S.Pd
6	Noraidahnita, Amd
7	Fatimah Hanun
8	Zuliani Hamzah

Kabupaten/Kota Aceh Timur

NO	NAMA
1	Hj. Nursamsiah
2	Zuraida, S.Pd
3	Darmawati
4	Mirawati
5	Tgk. Nurjannah
6	Ana Sofiana
7	Umi Kalsum
8	Khairul Husna Ahmad
9	Tgk. Fatimah

Kabupaten/Kota Aceh Utara

NO	NAMA
1	Safrida
2	Supartiah, A.Md
3	Dra. Juariah
4	Nurjubah
5	Nurmasitah

Kabupaten/Kota Lhokseumawe

NO	NAMA
1	Mirna Ria Andini
2	Saifura
3	Susilawati
4	Lia Maisarah
5	Fitriah
6	Nursyidah
7	Sifaiyah
8	Suryani
9	Salma
10	Nuaini YS, S.Pd
11	Badriah. A

Kabupaten/Kota Aceh Jaya

NO	NAMA
1	Darmasiah
2	Nurwati
3	Azizah
4	Idariani
5	Rahmawati

Kabupaten/Kota Aceh Barat

NO	NAMA
1	Dasni Husin, S.Ag
2	Dra. Maimanah
3	Rosnidar
4	Umi Hanisah
5	Nurhayati
6	Efrida Hanum, SH
7	Rosni Idham
8	Misni Fitriani
9	Fatimah Zuhri
10	Maria Fifi Yanti
11	Masni
12	Yunismah
13	Sutri Helfianti, SH, MH

Kabupaten/Kota Nagan Raya

NO	NAMA
1	Hariani
2	Fatimah Sari
3	Julidar
4	Emah
5	Anidar
6	Neneng N.

Kabupaten/Kota ABDYA

NO	NAMA
1	Rahmah Rusli, S.Ag
2	Hilda Yanti, SE
3	Leni Marlina
4	Mardhiah, S.Pd
5	Sartini
6	Nyak Biteh
7	Sarifah Rohani

Kabupaten/Kota Subulussalam

NO	NAMA
1	Rahmiati
2	Hj. Anisa Sambo
3	Nurmiana Alwi
4	Emmi Susanti
5	Dewi Susanti

Kabupaten/Kota Aceh Selatan

NO	NAMA
1	Maslih
2	Sarina
3	Yusniar
4	Laila
5	Army
6	Cut Rosmala Dewi
7	Safriati
8	Zarmiati
9	Yusnidah
10	Ernawati

Kabupaten/Kota Aceh Singkil

NO	NAMA
1	Hj. Nurtasnim
2	Erita Zahara
3	Eva Safitri
4	Zunaida
5	Mardhiah
6	Cut Hasniati

Kabupaten/Kota Simeulu

NO	NAMA
1	Fitri Kartika
2	Agustina
3	Ahmawati
4	Erlisa
5	Surasni

Kabupaten/Kota Sabang

NO	NAMA
1	Zahara
2	Inong Novianti
3	Restina
4	Salmiati
5	Mawarni
6	Wulan Indah Sari
7	Ny. Fatmawati
8	Nurbaya
9	Ainal Mardiah, S.Sos
10	Yusriah, SE, MM

Provinsi Aceh

NO	NAMA
1	Dra. Mustabsyirah Husein, M.Ag
2	Maitanur, S.Pd
3	Kusumawati Hatta, M.Pd
4	Badrunnisa
5	Risma Wati
6	Hj. Abriati Yusuf, SE
7	Dra. Hindun Ridwan
8	Nurhayati, RA, SH
9	Hj. Cut Ani Vivianti, SE
10	Desy Arian
11	Rizki Affiat
12	Asmawati Achmad
13	Erliana
14	Efiati, A.Md
15	Dra. Fadlun
16	Chairani ZA, S.Pd
17	Mariati Aji, S.Pd
18	Rukiah
19	Lesly Cristine Lailatul Qadar
20	Dian Marina
21	Wardah Hasyim
22	Yusmawati Khazan

23	Cut Herlina
24	Evany Claura Yanti
25	Afrida Purnama
26	Idaryani
27	Evi Narti Zain
28	Destika Gilang Lestari
29	Evi Kartina
30	Chairani, S.Ag
31	Hafsah, S.Pdi
32	Fauziah Aziz
33	Syamsiah
34	Unsuril Imani
35	Sri Wahyuni
36	Nuraini Muhammad
37	Hj. Sukriyani
38	Kartini Maryeli
39	Maryati
40	Dra. Nurhayati Ibrahim
41	Kasmijan Djakfar
42	Rita Setiawati
43	Hj. Bertina
44	Hj. Darmawati
45	Marlinadia, SE
46	Syarifah Rahmatillah
47	Zuhra

Apendiks IV Daftar Peserta DPIA IV

Nama Peserta DPIA IV

NO	NAMA	
1	Aceh Tenggara	Erdarina Pelis
		Laila S.E
		Fatmawati S.E
		Rabinah
		Nita Ermanila S.E
2	Aceh Tamiang	Zuraidah Bagadir
		Ainun Mardiah
		Hj Sri Hidayanti Lc. MS,i
		Kemalawati
		Mutia
		Zubaidah
3	Aceh Selatan	Yusnidah
		Cut Rosmaladewi
		Dra. Maisarah
		Masliah S.H
		Ernawati
4	Aceh Tengah	Henry Januatri S.Pd
		Amna Zalifa, S.H M.H
		Ramianti
		Asnaini
		Jurisma

5	Nagan Raya	Hariani
		Rusbaidah
		Nurhayati
		Yulidar
		Masyithah, S.Pd
6	Aceh Besar	Saida Afrida S.Sos MM
		Dra. Samawati Bintang
		Zazlina SE
		Dra. Salbiah MM
		Dra. Faridah Ibrahim
7	Aceh Singkil	Frida Siska Sihombing, S.TP
		Najmiati
		Dewa Mahdalena, S.H M.H
		Hj. Sumarni, S.Pd
		Nursinah
8	Pidie Jaya	Safrina
		Fadhlin
		Ulva
		Nya Malik Wirnasih
		Nurmalahayati
		Naziratil Husna

9	Bireuen	Ummi Nurhayati
		Zuliana Rahmah
		Nurbaiti
		Dra. Anisah
		Marhami, S.Pdi
		Ramisa
10	Aceh Utara	Husna
		Khuzaimah
		Wahyuni
		Mastina Berliansungkit S.E
		Diniah, S.Pdi SD
		Eliyati
11	Lhokseumawe	Syarifah Rahmah
		Salma YS
		Nurjubah
		Syifaiyah
		Farida Hanum. SE
		Roslina Rasyid
12	Aceh Barat Daya	Dien Fitrianti Meutia
		Dian Hendrika Sukma
		Muriyanti
		Nahdiar
		Salmairi
		Wardariah

13	Sabang	Zahara
		Restina
		Inong Noviyanti
14	Aceh Timur	Khairul Husna
		Drh. Burdah
		Syarifah Noor Akmal
		Dina Sulaiman
		Yessy Fandiba
		Melani Surbakti
15	Langsa	Fitriani Harun
		Nurul Hayati
		Ratih Dwi Handyanie
		Lia Amelia
16	Gayo Lues	Hj. Halimah S.Pdl
		Sri Mulyani
		Rita Wati
		hijrah Wati
		Salawati Pitriana
		Siti Hamidah
		Nur cahya
17	Aceh Jaya	Dra. Mutia Anzib
		Rica Andriani, SP.d
		Suriani
		Rohani, Spd. SD
		Fitri Maya Lisa, S. Sos



Rekam Jejak Gerakan *Perempuan Aceh* Menyongsong Damai



Pada tahun 2000, di tengah tekanan kuat untuk melaksanakan referendum, para perempuan Aceh melihat ancaman chaos yang mungkin menimpa Aceh bila pilihan rakyat diarahkan pada salah satu dari dua opsi yang saat itu semakin nyaring digemakan: merdeka atau tetap bersama Indonesia.

Apa yang sebenarnya diinginkan oleh perempuan Aceh saat itu yang notabenenya sering menjadi tameng dan tumbal di tengah situasi yang sedang bergejolak? Benarkah mereka ingin Aceh menjadi negara yang berdaulat atau ada alternatif lain yang bisa mengakomodasikan keinginan dan harapan mereka?

Duek Pakat Inong Aceh (DPIA) I yang berlangsung pada awal milenium kedua menghadirkan seluruh perwakilan perempuan dari setiap jengkal tanah Aceh. Mereka berdiskusi dan merumuskan hal-hal yang menjadi suara perempuan untuk kemudian diteruskan sebagai rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia.

Buku ini mencatat jejak langkah gerakan perempuan Aceh dalam memperjuangkan dan mengusung damai melalui agenda duek pakat, walaupun menghadapi risiko yang mengancam nyawa. Buku ini juga dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi yang dibuat secara khusus untuk menangkap dan menghadirkan kembali suasana dan kegentingan tahun itu. Menangkap sejarah dengan cara baru.

Buku ini hadir untuk mengekalkan peran gerakan perempuan dalam menyongsong damai Aceh, mengabadikannya sebagai sejarah. Agar kelak Rekam Jejak Gerakan Perempuan Aceh Menyongsong Damai tidak dianggap sebagai dongeng belaka.

Balai Syura Ureung Inong Aceh, yang biasa disebut Balai Syura, merupakan wadah perempuan Aceh untuk bermusyawarah dan berjuang dalam pemenuhan hak perempuan dan meningkatkan martabat sebagai manusia dan warga negara yang lahir melalui Duek Pakat Inong Aceh I pada bulan Februari tahun 2000.

Balai Syura memiliki 17 simpul di 17 Kabupaten/Kota yang terdiri atas 180 lembaga anggota di seluruh Aceh. Balai Syura aktif mengadvokasi isu terkait hak perempuan dalam upaya pemenuhan hak dasar perempuan, pengakuan dan keterlibatan perempuan di pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, partisipasi perempuan di politik, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan seksual dan juga kaitan perempuan dan Syariat Islam.



Lamgugob, Syiah Kuala
Banda Aceh, Provinsi Aceh
Email: bandar.publishing@gmail.com
www.bandarpublishing.com



ISBN 978-623-449-627-7



9

786234

496277